

Jurnal

Sosial Demokrasi

Batik
Loe
Sia
Lan
made in China

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA:

Berdagang untuk Siapa?

ISSN 2065-8415



772302 641515

Jurnal Sosial Demokrasi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	
ACFTA dan Ancaman Kedaulatan	4
Laporan Utama	
Transkrip Diskusi PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA Berdagang untuk Siapa?	16
Laporan Utama	
Resume Diskusi PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA APA YANG SEHARUSNYA DIKERJAKAN?	38
Artikel	
ACFTA: Memetakan Sektor Berpeluang dan Terancam	43
Artikel	
CINA, ACFTA DAN KITA	48
Artikel	
ACFTA: Menengok Jalan Cina	50
Artikel	
Dilema Politik dalam Menghadapi ACFTA – Apa Pilihan untuk Indonesia?	62
Artikel	
Kekuatan Buruh dalam Proses dan Pola Demokrasi di Amerika Latin	67
Profil Organisasi	
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI)	79
Resensi	
Dilema Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-Cina	82



Dewan Redaksi

Ketua : Amir Effendi Siregar
Wakil Ketua : Ivan Hadar
Anggota : Faisal Basri
Mian Manurung
Nur Iman Subono
Arie Sujito

Pelaksana Redaksi

Koordinator : Azman Fajar
Redaksi : Puji Riyanto
Launa

Alamat Redaksi

Jl. Kemang Selatan II No.2A
Jakarta 12730
Telp. 021 -719 3711 (hunting)
Fax. 021 - 7179 1358

Ilustrasi*

Kuss Indarto
Friedrich-Ebert-Stiftung

Cover dan Layout

Malhaf Budiharto

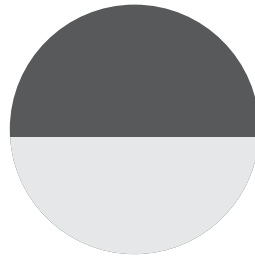
Penerbit**

Pergerakan Indonesia dan Komite
Persiapan Yayasan Indonesia Kita

ISSN: 2085-6415

*) Dilarang mengkopi dan memperbanyak
ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stif-
tung

**) Untuk mendapatkan edisi softcopy silakan
lihat di www.fes.or.id



ACFTA dan Ancaman

ACFTA and Sovereignty



SETIDAKNYA ada tiga kecenderungan penyakit endemis yang diidap pemerintahan hasil reformasi terkait kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina atau ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*). Pertama, kecenderungan berpikir “jangka pendek” (*short term*) alias lemah dalam mengalkulasi atau mendeteksi berbagai dampak sistemik yang akan dituai dari sebuah kebijakan (termasuk kesepakatan internasional) dalam jangka panjang (*long term*).

Teramat banyak contoh yang bisa kita kemukakan untuk meyoal kebiasaan berpikir short term pemerintahan kita ini. Di jaman Soeharto misalnya, utang luar negeri selalu menjadi andalan untuk menambal biaya pembangunan, sehingga negeri ini tak pernah bisa melepaskan diri dari jebakan utang. Di jaman reformasi, pertumbuhan ekonomi dan kue pembangunan yang kita raih tak berbanding lurus dengan mengecilnya angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan dus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat secara lebih konkret dan bermakna. Akibatnya, negeri ini tak pernah bisa melepaskan diri dari predikat negara lemah (*weak state*) atau bahkan negara gagal (*failed state*). Lihat saja perkembangan indeks pembangunan manusia Indonesia yang terus terjun bebas. Peringkat IPM kita, bahkan kini berada di bawah Vietnam.

Kedua, kecenderungan “malas” berpikir rumit alias bersikap permisif. Kecenderungan bersikap dan berpikir lemot ini dapat kita lihat dari kebiasaan pemerintah menghindari diskusi dan perdebatan panjang yang rumit, butuh energi ekstra, dan siap mengakomodasi beragam aspirasi dan menyerap sebanyak mungkin kepentingan dan partisipasi publik. Per definisi, refleksi, diskusi, deseminasi atau debat pemikiran yang cerdas dan argumentatif yang menyertakan seluruh komponen dan sektor-sektor strategis yang akan terlibat dan poten-

ATLEAST there are three tendencies of endemic disease which suffered by reform-outcome government in relation to free trade agreement of ASEAN-China or ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement). Firstly, the tendency to think “short term” in other word weak in calculating or detecting various systemic impacts which will be resulted by the policy (including international agreement) in the long term.

Plenty examples can be brought to question the habit of short term thinking of our government. In Soeharto era, for example, foreign debts were always relied to patch development deficit, this had made the country unable to escape debt trap. In Reformasi era, the economic growth and development cake that we achieved are not directly proportional with the decrease of unemployment rate and poverty alleviation which can bring prosperity in a concrete and

man Kedaulatan

ereignty Threat



sial terimbas dampak negatif dari panggung perdagangan bebas jelas dibutuhkan guna merakit sebuah fondasi kebijakan *free trade* yang kokoh, komprehensif, visioner serta tidak mencederai kedaulatan (politik) dan kepentingan (ekonomi) nasional.

Ketiga, kecenderungan bersikap “*nekat*” alias terlalu percaya diri. Faktor ini mungkin didasari oleh cara pandang pemerintah yang miopik, yang meyakini bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang *gemah ripah loh jinawi*; yang memiliki sumberdaya alam dan manusia yang melimpah. Percaya diri adalah modal penting bagi sebuah bangsa dalam pergaulan dan kerjasama internasional. Namun, percaya diri yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek national interest yang signifikan bagi yang potensial mengancam eksistensi perekonomian dan kedaulatan politik bangsa, adalah sebuah kekhoyolan.

Merunut agak kebelakang, gagasan perdagangan bebas regional ASEAN-Cina sesungguhnya sudah mulai dirundingkan sejak tahun 2003 lalu. Untuk mengkonkretkan gagasan *free trade* regional itu,

meaningful way. As a result, this country can never break off the notion of weak state or even failed state. See how Indonesia’s Human Development Index (HDI) continues to do freefall. Currently our HDI rank is even below Vietnam.

Secondly, the tendency of “lazy” to think wholly, in other word acting permissive. This tendency of slow thinking can be seen from the government’s habit to avoid discussion and long complicated debate, debate which needs extra energy, and ready to accommodate various aspirations and absorb as much as interests and public participation as possible. By definition, reflection, discussion or intelligent and argumentative debate that includes all components and strategic sectors which will be included and potentially affected from the negative impact of the free trade stage is clearly required in order to assemble a free trade foundation which is strong, comprehensive, visionary and does not injure national sovereignty (politics) and interest (economics).

Thirdly, the tendency of being “reckless” in other word over

pada 4 November 2004 ditandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and PRC* oleh para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN dan China, di Phnom Penh, Vietnam. Pasca kesepakatan Phnom Penh, pada 24 November 2004 ditandatangani kesepakatan ACFTA di bidang barang, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bidang perdagangan jasa yang disahkan pada 14 Januari 2007 dan kesepakatan di bidang investasi yang disahkan pada 15 Oktober 2009.

Sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas, ACFTA bisa dikatakan merupakan region perdagangan bebas terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa (dengan 491 juta jiwa penduduk dan total PDB sebesar 14,38 triliun dollar AS) dan Amerika Utara (dengan 455 juta penduduk dan total PDB sebesar 15,85 triliun dollar AS). Dengan kata lain, kawasan perdagangan bebas ASEAN-China adalah pasar potensial, yang mengombinasi 1,9 milyar penduduk, dengan total PDB 6,6 triliun dollar AS, dan nilai perdagangan mencapai 4,3 triliun dollar AS.

Seperti ditulis banyak pengamat, Cina tak hanya berposisi sebagai kekuatan ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik, namun diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi global yang akan menyudahi dominasi Jepang, Uni Eropa, dan AS. Sebagai negara yang menduduki posisi paling kaya di dunia saat ini, Cina ditaksir memiliki cadangan devisa mencapai 2,13 triliun dollar AS; terbesar di seluruh dunia. Pada Juni 2009, cadangan devisa Cina bertambah 42,1 miliar dollar AS, dan meningkat menjadi 30,2 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun 2008. Pada akhir 2008, cadangan devisa Cina tercatat hanya 1,946 triliun dollar AS. Namun, pada akhir Juni 2009, Cina cadangan devisa Cina melonjak menjadi 2,13 triliun dollar AS (atau naik 17,8 persen secara *year on year*). Dalam kurun 6 bulan pertama tahun 2009, cadangan devisa Cina bertambah hingga 185,6 miliar dollar AS.

Menurut Bank Sentral Cina, seperti dikutip dari AFP (15/7/2009), kenaikan cadangan devisa itu menunjukkan bahwa aliran modal ke Cina sudah kembali normal seiring pemulihan ekonomi negara tersebut setelah sebelumnya ikut merasakan dampak krisis finansial global. Cadangan devisa Cina memang terus menggelembung dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh melonjaknya investasi asing, surplus perdagangan dan masuknya aliran "hot money". Setelah Cina, cadangan devisa terbesar kedua di dunia diduduki oleh Jepang, dengan cadangan devisa sebesar 1,056 triliun dollar AS per akhir Mei 2009.

Ekspansi pasar Cina, meski terkesan dilakukan dengan hati-hati, namun cukup meresahkan negari jiran (seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN), karena diikuti basis pertumbuhan ekonomi Cina yang kokoh. Cina telah tampil sebagai *the new miracle of Asia*. Pertumbuhan pesat ekonomi Cina tentu tak bisa dilepaskan dari stagnasi ekonomi yang dihadapi AS, dan belum pulihnya perekonomian Uni Eropa dan Jepang. Kekuatan ekonomi Cina diperkirakan akan menjadi pemain utama di kawasan Asia Pasifik, *the motor penggerak* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Futurolog John Naisbitt dalam *Megatrend Asia* (1995) sudah

confident. This factor maybe based by the government's miopic perspective, which believes that Indonesia is a country that is gemah ripah loh jinawi (prosperous and fertile felt by all the people); that has abundant natural and human resource. But, over confidence, without considering the aspect of significant national interests can cause threat to state's economic existence and political sovereignty, which is an absurdity.

By tracing history, the idea of ASEAN-China regional free trade actually has been negotiated since 2003. To consolidate the regional free trade idea, on November 4th, 2004 had been signed the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and PRC by heads of government of ASEAN and China in Phnom Penh, Vietnam. After the Phnom Penh Agreement, on November 24th, 2004, the ACFTA was signed on the issue of goods, and followed by the signing of trade service agreement which was approved on January 14th, 2007 and agreement in the field of investment was approved on October 15th, 2009.

As a free trade zone, ACFTA is practically the third largest free trade region in the world after European Union (with 491 million population and a total GDP of 14.38 trillion US\$) and North America (with 455 million population and a total GDP of 15.85 trillion US\$). In other words, the region of ASEAN-China free trade is a potential market, which combines 1.9 million population with a total GDP of 6.6 trillion US\$ and trade value reaching 4.3 trillion US\$.

As written by many observers, China is not only playing the position of regional economic power in Asia Pacific, but is predicted to become global economic giant that will end Japan, European Union and U.S. domination. As a country that holds the world's richest position today, China was estimated to own foreign exchange reserves reaching 2.13 trillion US\$; the largest in the world. In June 2009, China's foreign exchange reserves gained 42.1 billion US\$, which was increased to 30.2 billion US\$ compared with the same period of 2008. In the end of 2008, China's foreign exchange reserves listed were only 1.946 trillion US\$. However, in late June 2009, the foreign exchange reserves peaked to 2.13 trillion US\$ (or an increase of 17.8 percent on 'year on year' base). Within the first semester of 2009, China's foreign exchange reserves increased to 185.6 billion US\$.

According to Central Bank of China, as quoted from AFP (15/7/2009), the increase of foreign exchange reserves indicate that capital flows to China have returned to normal as economic recovery felt by the country after previously impacted by the effect of global financial crisis. China's foreign exchange reserves continue to rise in recent years triggered by the soaring foreign investment, trade surplus and the entry of 'hot money'. After China, the biggest foreign exchange reserves is owned by Japan, with reserves of 1.056 trillion US\$ as on end of May 2009.

China's market expansion, despite the impression it was made with caution, nevertheless quite disturbing for neighboring countries (such as Japan, South Korea, and ASEAN countries), because it was followed by a robust growth of China's economic base. China has emerged as the new miracle of Asia. China's rapid economic



memprediksi bahwa dalam abad XXI ini, perekonomian kawasan Asia Pasifik akan beralih ke perekonomian yang dikuasai Cina dan orang-orang Cina perantauan (hoakiao) yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ramalan Nasibitt bukan tanpa bukti. Pada akhir tahun 2009, Cina diprediksi akan menggeser dominasi Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke dua di dunia (Kompas, 28/7/2009). Hal ini terjadi hanya dua tahun setelah Cina melampaui Jerman sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga dunia. Tahun 2007, *gross domestic product* (GDP) Cina mencapai 3,5 triliun dollar AS dan Jerman 3,3 triliun dollar AS. Tahun 2008, GDP Cina melonjak ke 4,42 triliun dollar AS, mendekati GDP Jepang yang 4,68 triliun dollar AS. Dengan kemampuannya, ekonomi Cina tumbuh mampu tumbuh antara 7,5-8 persen, sementara pertumbuhan Jepang minus 6,0 persen (data Juli 2009), dipastikan Cina akan melampaui Jepang dalam total angka GDP tahun ini.

Dibandingkan dengan Jepang yang tengah menjalankan program *zero growth*, sukses ekonomi Cina merupakan bagian dari strategi *market economy* yang menjadi orientasi Cina pasca-Jiang Zemin. Melalui reformasi Partai Komunis Cina (PKC) dalam Kongresnya November 2001, rezim komunis Cina memasukkan kelas kapitalis (*shehui qita fangmian de youxiu fenzi*) ke dalam unsur PKC. Reformasi ini tak hanya bertujuan merombak total hubungan majikan-pekerja dalam tradisi komunis Cina yang binen, tetapi juga memperkuat basis dukungan dari para industriawan dan kapitalis Cina untuk melakukan ekspansi pasar besar-besar produk Cina ke seluruh penjuru dunia guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negeri Tirai Bambu ini.

Faktor penting lain di balik bertahannya ekonomi Cina adalah stimulus ekonomi sebesar 586 miliar dollar AS yang digelontorkan pemerintah Cina dalam menghadapi krisis finansial global beberapa waktu lalu. Stimulus ekonomi bekerja amat baik di tengah penurunan

growth is surely cannot be separated from economic stagnation faced by the U.S., and the not yet restored EU and Japan economy. China's economic power is predicted to be a major player in the Asia Pacific region, thus being the driving force in promoting global economic growth.

Futurologist John Naisbitt in Megatrend Asia (1995) had predicted that in this XXI century, the Asia Pacific regional economy will switch to China-controlled economy and by the overseas travelling Chinese (hoakiao) that spread all over the world. Naisbitt prediction is not without evidence. In the end of 2009, China was predicted to shift Japan domination as the second biggest economic power in the world (Kompas, 28/7/2009). This happened in only two years after China's economic strength surpassed Germany as the world's number three. In 2007, China's GDP reached 3.5 trillion US\$ while Germany's 3.3 trillion US\$. In 2008, China's GDP surged to 4.42 trillion US\$, approaching Japan's 4.68 trillion US\$. With its abilities, China's economy was capable to grow between 7.5 to 8 percent, while Japan's experienced minus 6.0 percent growth (July 2009 data), it has confirmed that China will surpass Japan in this year total GDP.

Compared with Japan that is currently implementing zero growth program, China's economic success is part of market economy strategy that has been China's post-Jiang Zemin orientation. Through the reform of Communist Party of China (CCP) in its congress in November 2001, the communist regime of China had included capitalist class (shehui qita fangmian de youxiu fenzi) into elements of the CCP. This reform is not only aiming to totally reform the relations of owner-labor in communist China rich tradition, but also to strengthen the base support among industrialist and capitalist to immensely expand China's market products from the country to all over the world for accelerating its economic growth.

an ekspor sebagai dampak dari lesunya pasar global. Ini berbeda dengan kebijakan stimulus Pemerintah AS sebesar 787 miliar dollar AS, yang hingga kini praktis belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi AS masih negatif (minus 2,6 persen) dan angka pengangguran di AS hingga kini diperkirakan masih cukup besar, sekitar 10,2 persen.

Ironisnya, kini AS justru bergantung pada Cina. Defisit anggaran AS tahun ini melampaui 1,8 triliun dollar AS dengan utang kumulatif mendekati 12 triliun dollar AS. Diperkirakan Cina mewakili 83 persen dari seluruh defisit perdagangan AS dalam produk non-minyak. Cina kini mengakumulasi pembelian surat berharga negeri Paman Sam itu senilai 763,5 miliar dollar AS. Namun, seperti ketika menghadapi “perang ekonomi” AS-Jepang pada 1980-an, AS berusaha menekan Cina untuk menaikkan nilai mata uangnya. Dalam pertemuan tingkat tinggi AS-China akhir Juli 2009 lalu, pemerintah AS menuding rendahnya nilai mata uang Cina menyebabkan harga produk AS menjadi jauh lebih mahal, berbanding terbalik dengan harga-harga produk Cina yang jauh lebih murah. Mengantisipasi tekanan AS ini, Cina berupaya menyerang balik AS dengan menyuarakan perlunya mata uang alternatif dunia di luar dollar AS.

Tampilnya ekonomi Cina yang kian digdaya, tentu tak muncul begitu saja (*taken for granted*). Ia tampil menguat melewati jalan “zig zag” ala Cina, *dua* ikhtiar dan kerja keras yang terkenal dari bangsa ini. Sejak Mao berkuasa pada Oktober 1949, Cina menerapkan sistem ekonomi terencana yang diadopsi dari model ekonomi terpusat Uni Soviet. Model ini dianggap cocok untuk menjalankan tugas pembangunan ekonomi saat itu, di mana negara ditempatkan pada posisi yang sentral dan partai pada posisi yang menentukan. Negara memiliki, sekaligus mengontrol kekuatan produksi dalam masyarakat.

Namun, jika kita menukil pandangan I Wibowo (Kompas, 9/10/2006), melesatnya ekonomi dan kemakmuran di Cina sesungguhnya secara konseptual sulit dilacak, karena pada awalnya Cina tidak mempunyai cetak biru. Malah bisa dibilang, di antara para pemimpin tertinggi Cina saat itu terjadi pertikaian internal yang tajam, diiringi dengan gejolak sosial yang luar biasa, seperti maraknya demonstrasi massa dan aksi protes mahasiswa, yang kemudian meledak menjadi “Peristiwa Tian’anmen” pada tahun 1989. Saat itu, setiap faksi politik dalam PKC saling tuding, dan setelah terjadi peristiwa berdarah itu, pemimpin Cina bahkan pernah sampai pada kesimpulan untuk menghentikan reformasi. Ketika Deng Xiaoping mendobrak dengan pidato-pidatonya dalam reli politik yang digelar di wilayah Cina selatan awal tahun 1992 lalu, Deng sebenarnya juga tidak memiliki rencana yang pasti. Satu-satunya rencana jelas yang diusung Deng adalah bahwa rakyat Cina harus mencapai taraf hidup yang pantas (*xiaokang*) yang diukur dengan angka 1.000 dollar AS per kapita pada tahun 2000. Jiang Zemin dan Zhu Rongji berusaha keras menerjemahkan kebijakan besar ini menjadi program-program aksi yang konkret.

Singkatnya, Deng Xiaoping—yang dikenal sebagai “bapak Cina modern”—telah berhasil membumikan paradigma Mao yang berwatak ideologis-utopis menjadi program modernisasi Cina yang

Another important factor behind China’s economic survival is the 586 billion US\$ economic stimulus handed out by the government in facing global economic crisis some time ago. The stimulus was working very well amid the declining export impacted by sluggish global market. This is different with the US government’s 787 billion US\$ economic stimulus policy, which until now has not shown expected result. The US economic growth is still negative (minus 2.6 percent) and unemployment rate in the country is still estimated to remain fairly large until now, which is around 10.2 percent.

Ironically, the U.S. is now very dependent on China. U.S. budget deficit this year exceeded 1.8 trillion US\$ with accumulative debt approaching 12 trillion US\$. China is estimated to represent 83 percent of all U.S. trade deficit in non-oil products. Now China has accumulated securities/bond purchase from Uncle Sam’s country of 763.5 billion US\$ worth. However, just like facing a “war economy” between US-Japan in the 1980s, the U.S. tried to pressure China to raise the value of its currency. In the US-China high-level meeting in the end of July 2009, the U.S. government blamed the low value of China’s currency had caused the price of U.S. products become more expensive, which is inverted to the prices of products from China which are much cheaper. Anticipating the U.S. pressure, China tried to counter by voicing the need for an alternative world currency outside the U.S. dollar.

China’s economic emergence that has becoming significance, is certainly not appear out of nowhere. It has been strengthened through the “zig zag” route a la China, by the effort and hard work which is famous for this nation. From the time Mao gaining power in October 1949, China adopted a planned economic system adopted from the Soviet’s centralized economic model. This model is considered suitable for the task of economic development at that time, in which the state was placed in a central position and the party was in a decisive position. The state has, as well as, controls the productive power in the society.

*However, if we look at the perspective presented by I. Wibowo (Kompas, 9/10/2006), the economic boom and prosperity of China is conceptually difficult to track, because in the beginning China did not have a blueprint. In fact, the highest leaders of China at that time had had sharp internal dispute, accompanied by great social upheavals, such as mass demonstrations and student protests, which then exploded into “Tian’anmen Incident” in 1989. At that time, every political faction in CCP were pointing finger at each other, and after the bloody incident happened, China’s leaders had even came to the conclusion to stop the reform. When Deng Xiaoping was breaking the situation with his speeches in a political rally held in southern China and early 1992, Deng was in fact also had no definite plans. The only plan that was clearly carried by Deng is that the people of China must achieve a decent standard of living (*xiaokang*) which is measured by the number 1,000 dollars per capita by the year 2000. Jiang Zemin and Zhu Rongji tried hard to translate this major policy into concrete action program.*

In short, Deng Xiaoping –who was known as the “father of

berorientasi empiris-pragmatik. Deng terkenal dengan pameonya, “tak penting kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus”. Sikap pragmatik ini juga sangat dirasakan dalam kebijakan dan komunikasi politik yang berusaha mengombinasikan kebijakan modernisasi ekonomi Cina melalui pendekatan kombinitif: *top-down* dan *bottom-up*.

Yang pasti, Cina menyadari sepenuhnya bahwa modernisasi tidak selalu menyediakan jalan untuk meraih kedua tujuan pokok yang menjadi mimpi setiap bangsa: kemakmuran ekonomi dan demokratisasi secara bersamaan. Salah satu harus mendahului yang lain. Seperti modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang pada umumnya, Cina mendahulukan kemakmuran ekonomi, sambil perlahan-lahan membangun sistem politik demokratis. Cina menempuh jalan ini dengan mengembangkan *East Asian model of state-led economic development*. Model ini menempatkan negara sebagai pemegang kendali kebijakan reformasi ekonomi; sambil perlahan membuka keran demokratisasi. Cina adalah fenomena kontras yang sedang memacu proyek modernisasi untuk menjadi raksasa ekonomi dunia yang tampil elegan di pertengahan abad ke-21 ini.

Jika aktor utama demokrasi adalah rakyat dan tujuan akhir adalah melayani rakyat, maka para elite politik Cina dapat bisa berbangga bahwa modernisasi Cina yang dimulai sejak tahun 1978 secara sangat menakjubkan telah terbukti mampu memakmurkan ratusan juta rakyatnya. Dalam jargon ilmu sosial, prototipe unik sistem politik dan ekonomi Cina saat ini sering disebut sebagai “ekonomi pasar sosialis”, “kapitalisme ala Cina” atau “sosialisme dengan karakter Cina”.

Dengan ungkapan lain, dinamika ekonomi Cina kini tengah mengalami pergeseran signifikan dari sistem ekonomi terpusat-terencana ke sistem ekonomi pasar yang berporos pada kedaulatan dan kreativitas individual; yang sesungguhnya menjadi ciri dari moda ekonomi masyarakat kapitalis. Dengan pergeseran ini, ruang partisipasi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kian diperluas; di samping memanfaatkan etos Konfusianisme bangsa Cina—yang ratusan tahun telah dikenal sebagai bangsa pedagang ulet. Seperti di kemukakan sosiolog Max Weber dan Robert Bellah, tradisi Konfusianisme (Cina) dan Tokugawaisme (Jepang) memiliki etos yang mirip dengan tradisi kapitalisme, yang me-nimba sumber inspirasi religiusitasnya dari nilai-nilai Protestanisme.

Namun, yang menganggumkan dari Cina, gerak menuju puncak kekuatan ekonomi dunia justru di dimulai dari kendali rezim otoriter yang opresif dan anakronistik. Fenomena Cina jelas di luar kelaziman, amat berbeda dengan pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika, dimana kemajuan ekonomi di negara-negara industri maju ini hanya tumbuh dan berkembang di bawah sistem politik demokrasi. Pola di luar kelaziman ini juga kerap disebut banyak pihak sebagai “kapitalisme dengan didukung penuh negara” atau “pasar kapitalisme tanpa demokrasi” (*China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest*, 2008).

Berbeda dengan Cina, menurut Naisbitt, dalam sejarah kemanusiaan, AS selalu memandang dirinya sebagai bangsa dan negara yang

modern China”— has been successfully earthed Mao’s paradigm that has utopian-ideological character into China’s modernization program of empirical-pragmatic orientation. Deng’s famous slogan, “it is insignificant whether it is a black or white cat, which is important is that it catches mice”. This pragmatic attitude was also strongly felt in the policy and political communication which tries to combine China’s economic modernization through mix approaches: top-down and bottom-up.

For sure, China is fully aware that modernization does not always provide way to reach the two ultimate goals that are desired by every nation: economic prosperity and democratization which run simultaneously. One must precedes the other. As modernization takes place in developing countries in general, China prioritize economic prosperity, while slowly building a democratic political system. China takes this road by developing East Asian model of state-led economic development. This model puts the control of the state as the holder of the economic reform policy, while slowly opening the tap of democratization. China is the contrasting phenomenon that is racing modernization project to become an elegant world’s economic giant in the mid-21st century.

If the main actor of democracy is the people and the ultimate goal is to serve the people, the political elites of China can be proud that the modernization of China, which began in 1978, has proven to be astonishingly able to prosper hundreds of millions of people. In social science jargon, a prototype of a unique political and economic system of China today often referred to as a “socialist market economy”, “China-style capitalism” or “socialism with China’s characteristics.”

In other words, the dynamic of China’s economy is currently experiencing significant shift from centrally-planned economic system to market system economy which based on individual sovereignty and creativity; which is actually the characteristic of capitalist society’s economic mode. With this shift, the space for public participation in fostering economic growth increasingly expanded, in addition to take advantage of China’s Confucian ethos which for hundreds of years has been known as a nation of hardworking merchants. As the sociologists Max Weber and Robert Bellah had pointed out, the tradition of Confucianism (China) and Tokugawaisme (Japan) has a similar ethos to the tradition of capitalism which drew inspiration from the religious values of Protestantism.

*Nevertheless, what is amazing from China is that its struggle to reach the top of world’s economic power was started under the control of an oppressive authoritarian regime and anachronistic. China phenomenon is clearly outside the norm, quite different from the experience of European countries and America, where economic progress in the advanced industrial countries grow and develop only under a democratic political system. Patterns outside the norm is also often referred by many experts as “capitalism with full support of the state” or “market capitalism without democracy” (*China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest*, 2008).*

In contrast to China, according to Naisbitt, in the history of

ideal; penopang dan pengemban konsep demokrasi dan humanisme universal. AS lalu bertindak sebagai polisi dan guru dunia dengan mengeksport dan mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan seluruh atribut liberalisme kepada negara-negara lain. Konsekuensi logisnya, politik luar negeri AS sangat agresif dan impresif. Sebaliknya, masyarakat Cina lebih memilih sebagai masyarakat pembelajar. Mereka belajar dari kegagalan Uni Soviet dalam mempraktikkan ajaran Marxisme-Leninisme dan keberhasilan Barat dalam mewujudkan ideologi kapitalisme, lalu semua itu diadaptasikan ke dalam sejarah dan tradisi Cina. Meminjam istilah Naisbitt, dari delapan pilar mewujudkan masyarakat Cina modern, pilar pertama yang dilakukan Deng Xiaoping adalah emansipasi cara berpikir.

Pembebasan dan perubahan cara berpikir dan mentalitas warisan Mao yang terbelenggu ideologi komunisme yang eksklusif-konservatif menjadi inklusif-partisipatif menjadi babak baru dalam kehidupan bangsa Cina. Jadi kaya itu tidak dosa, kata Deng. Sekarang sudah berkembang lagi menjadi kaya ternyata enak dan disegani dunia. Ketika Hongkong dikembalikan Inggris ke tangan Cina (1997), dunia khawatir iklim demokrasi, wirausaha, dan penegakan hukum yang telah begitu kuat akan pudar hanyut ke dalam sistem sosialisme-komunisme. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: berlangsung proses yang amat cepat "Hongkongisasi" Cina daratan. Hongkong jadi model masa depan bagi seluruh bangsa Cina yang dibesarkan dalam inkubator kapitalisme, kebebasan berusaha, penegakan hukum serta kedaulatan individu sebagaimana berlangsung dalam tradisi Inggris.

Proses demokratisasi di Cina rupanya mengambil jalannya sendiri, tidak dilakukan secara gegabah meniru Barat. Negara tetap memegang kendali secara solid, tetapi ruang gerak masyarakat untuk berusaha justru didorong dengan kebijakan desentralisasi daerah. Individu dan masyarakat didorong untuk mengembangkan "ekonomi inovatif". Mesin produktivitas Cina saat ini adalah buruh yang murah, inovasi, dan menggeliatnya kapitalisme dengan pangsa pasar yang sangat besar. Tidak mengherankan bahwa Cina juga dikenal sebagai tukang bajak kekayaan intelektual terbesar di dunia.

Meski mendatangkan keuntungan besar, barang bajakan dan tiruan akan mengancam Cina kalau dunia kehilangan kepercayaan. Dunia pun sekarang tengah berspekulasi, ke mana arah kemajuan Cina, apakah akan mengancam negara lain (terutama negara-negara Barat yang selama ini menjadi jantung kapitalisme dan menjadi hegemon ekonomi global) atau mendorong kemakmuran dan perdamaian dunia. Namun, perlu diakui, dalam tiga dekade terakhir Cina mampu mengentaskan 400 juta penduduknya (terutama para petani desa) dari lumpur miskin.

Yang pasti, sebagai bangsa multi-etnis dengan penduduk lebih dari 1,2 miliar, sulit bagi siapa pun untuk mewujudkan reformasi dan demokratisasi tanpa gejolak jika tidak ada *strong leadership* dan kepemimpinan berkarakter. Cina tak ingin reformasi politik dan modernisasi ekonomi yang dilakukannya berjalan tanpa kontrol yang kuat dari negara. Fenomena Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur telah cukup menjadi pelajaran berharga bagi

humanity, the U.S. always sees itself as the ideal state and nation; supporter and carrier of universal concept of democracy and humanism. The U.S. then act as the world's police and teachers by exporting and promoting democracy, human rights, and all the attributes of liberalism to other countries. The logical consequence is that the U.S. foreign policy is very aggressive and impressive. In contrary, Chinese people prefer China as a community of learners. They learn from the failures of the Soviet Union in practicing the teachings of Marxism-Leninism and Western success in realizing the ideology of capitalism, then all was adapted to the history and traditions of China. As in Naisbitt's phrase, out of the eight pillars of forming modern China's community, the first pillar by Deng Xiaoping is the emancipation of mind.

The Mao's thinking and mentality liberation and change out of the shackles of exclusive- conservative communism ideology to became an inclusive-participatory, has been a new chapter in the life of China. Therefore being rich is not a sin, said Deng. The term now grows to saying become rich is actually nice and respected by the world. When Hong Kong was returned by England into the hands of China (1997), the world worried about the climate of democracy, entrepreneurship, and law enforcement which had been strongly implemented in the area will fade and drifted to the system of socialism-communism. However, what happened is the opposite: the process of 'Hongkongnization' of mainland China occurred very fast. Hong Kong's future became a model for all Chinese people who was raised in the incubators of capitalism, free enterprise, rule of law and individual sovereignty as it had took place under the British tradition.

Democratization process in China apparently took its own path, it has not done in a hasty way imitating the West. State remains solidly in control, but the space for the community to conduct business was actually driven by regional decentralization policy. Individuals and communities are encouraged to develop "innovative economy". China's current productivity machine is cheap labor, innovation, and the waking of capitalism with a very large market share. It is no wonder that China is also known as the world's largest violator of intellectual property rights.

Despite producing big profit, pirated and fake goods can threaten China if the world is losing its confidence. The world is currently in the middle of speculation, where the direction of China's progress, whether it will threaten other countries (mainly Western countries which have become the heart of capitalism and global economic hegemon) or to encourage prosperity and world peace. However, it must be recognized, in the last three decades China was able to alleviate 400 million people (mainly rural peasants) from poverty.

What is sure, as a multiethnic nation with population exceeding 1.2 billion, it is difficult to realize the reform and democratization without fluctuation if there is no strong leadership and leadership with character. China did not want to have political reform and economic modernization which run without strong control from the state. The phenomenon of the Soviet Union and communist coun-



Cina untuk menepis jalan demokratisasi model *copy paste* ala tradisi demokrasi liberal yang menjadi ciri khas masyarakat politik kapitalis Barat.

Cina sangat menyadari bahwa demokrasi tanpa kontrol kuat negara hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki sosial; seperti modernisasi dan reformasi Soviet yang buyar bagai gundukan pasir diterpa gelombang. Menjawab kritik bahwa rezim komunis Cina anti-demokrasi, Jiang Zemin dengan gaya diplomatis (mengutip pendapat Lincoln) menyatakan bahwa inti demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jiang melanjutkan “pemerintah Cina sangat peduli dalam soal kesejahteraan rakyatnya”, demikian pernyataan Jiang dalam sebuah wawancara khusus dengan harian ternama AS, *New York Times* (2001).

Mengutip Pete Engardio dalam *Chindia, How China and India Are Revolutionizing Global* (2007), kunci keberhasilan reformasi ekonomi Cina ini terletak pada stabilitas politik domestik yang terus terjaga. Bagi Cina, stabilitas politik adalah harga mati untuk kelanjutan reformasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemimpin Cina percaya bahwa mereka harus memelihara keseimbangan antara reformasi, pembangunan, dan stabilitas. Meski tidak secara eksplisit dinyatakan, Engardio meyakini bahwa kemakmuran Cina di masa mendatang tidak akan direcoki oleh kondisi politik internal mereka. Politik, bagi rezim komunis Cina adalah sebuah konstanta. Para pemimpin Cina meyakini sepenuhnya, jika mereka mampu menjaga stabilitas politik secara konstan, maka dalam beberapa tahun mendatang Cina akan meneguhkan diri sebagai negara “kapitalis-komunis”; sebuah kombinasi rumit yang hampir mustahil bisa dipadukan oleh negara lain di luar Cina.

Terkait kekuatan ekonomi Cina yang tumbuh luar biasa itu, apakah para pemimpin kita sudah memikirkan atau membuat kalkulasi terkait masa depan ketahanan ekonomi Indonesia dalam konteks ACFTA dalam 15 atau 25 tahun ke depan? Apakah ketika pemerintah menandatangani perundingan ACFTA tahun 2003 lalu sudah menyiapkan dengan matang prasyarat-prasyarat penting yang harus dipenuhi, semisal kesiapan infrastruktur, sinkronisasi regulasi (baik dalam rangka menjaga dan meningkatkan daya saing produk nasional maupun pengamanan pasar dalam negeri), sumberdaya manusia dan pendidikan, skenario industri, peran UMKM dan sektor pertanian yang bisa diandalkan, kebijakan finansial dan suku bunga perbankan yang kompetitif, tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik yang efektif, reformasi birokrasi dan pemangkasan *high cost economy*, *law enforcement* dan pemberantasan korupsi serta selusin aspek penting lainnya dalam konteks implementasi ACFTA yang berlaku efektif per Januari 2010 lalu?

Jika kita mau jujur, tanpa kesepakatan ACFTA pun, pasar domestik kita dewasa ini sudah kalah bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik kita, khususnya barang Cina. Di luar Cina, produk impor dari AS, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, dan India juga kian sesak menjejali pasar kita. Sepanjang tahun 2009 bahkan terjadi lonjakan produk impor dari Cina di pasar domestik kita. Fakta ini sejalan dengan hasil perhitungan BPS, dimana neraca

tries in Eastern Europe has been quite a lesson for the democratization of China to ward off the ‘copy and paste’ model of liberal democratic tradition that is a characteristic owned by Western capitalist political society.

China is fully aware that democracy without strong state control would only produce chaos and social anarchy, such as the Soviet’s modernization and reform that shattered like a sand dune wiped by the wind. Answering the criticism that China’s communist regime is antidemocratic, Jiang Zemin with diplomatic style (quoting Lincoln) stated that the core of democracy is a government that comes from the people, by the people, and for the people. Jiang went on that “the government in China is very concerned on the welfare of its people,” in a statement in a special interview with a leading U.S. daily newspaper, the New York Times (2001).

Citing Pete Engardio in Chindia, How China and India Are Revolutionizing Global (2007), the key to the success of China’s economic reform lies in domestic political stability which is continually maintained. For China, political stability is a necessity for the continuation of reforms and economic growth. Leaders of China believe that they must maintain a balance between reform, development and stability. Although it is not explicitly stated, Engardio believe that China’s future prosperity will not be harassed by their internal political conditions. Politics, for the communist regime of China is a fixed value. China’s leaders are fully convinced, if they were able to maintain political stability in constant, then in the next few years China will establish itself as a “capitalist-communist” country, a complicated combination that’s almost impossible can be met by other countries outside China.

Related to China’s extraordinary growing economic strength, is whether our leaders are already thinking or making calculations related to the future of Indonesia’s economic resilience in the context of the ACFTA in 15 or 25 years ahead? When the government entered into negotiations of ACFTA in 2003, has the important preconditions that must be met been well prepared? Such as the readiness of infrastructure, regulatory synchronization (both in order to maintain and improve the competitiveness of national products as well as securing the domestic market), human resources and education, industrial scenario, the role of SMEs and the agricultural sector that can be relied upon, financial policies and bank interest rate that is competitive, good governance and effective public service, bureaucratic reform and cutting the high cost economy, law enforcement and corruption eradication, and a dozen other important aspects in the implementation context of ACFTA which will be effective as of January 2010?

If we are honest, without ACFTA agreement, our domestic market today has been unable to compete with imported products that continue to flood our domestic market, especially China goods. Outside China, the products imported from the U.S., Japan, EU, South Korea, and India are also increasingly crowding our markets. During the year 2009 even there was an increase of imported products from China in our domestic market. This fact is coherent with the

perdagangan antara Indonesia dan Cina kini mengalami defisit. Artinya, nilai impor dari Cina masih lebih besar dibanding ekspor Indonesia ke Cina. Mengutip catatan BPS (2010), nilai ekspor Indonesia ke Cina pada Februari 2010 ini mencapai 986,2 juta dollar AS, turun dari 1,01 miliar dollar AS dari Januari 2010. Sementara data tahun 2008 lalu menunjukkan, impor dari Cina telah mengambil alih 70 persen pangsa pasar domestik yang semula dikuasai sektor usaha kecil dan menengah nasional.

Dari sisi dampak perdagangan bebas Cina-ASEAN dalam konteks kemampuan daya tahan dan daya saing industri nasional, mengutip Martin Manurung (2010), setidaknya terdapat 10 sektor industri manufaktur Indonesia yang tercatat akan terimbas dampak negatif jika ACFTA benar-benar direalisasikan. Jika kita mau jujur, saat ini saja kondisi industri nasional berada dalam posisi sulit dan kalah bersaing dengan produk impor. Kesepuluh sektor industri tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri makanan dan minuman, industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.

Jika dampak deindustrialisasi itu benar, maka bisa dipastikan kampanye pemerintahan SBY-Boediono untuk memerangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran hanya tinggal wacana. Diprediksi, ancaman deindustrialisasi itu berpotensi bagi terjadinya PHK massal terhadap 3 hingga 7,5 juta pekerja kita. Sebagai catatan, sebelum ACFTA diberlakukan, sektor tekstil dan produk tekstil kita sudah jauh-jauh hari kalah bersaing. Di tahun 2009 lalu saja, setidaknya sekitar 271 pabrik atau perusahaan tutup. Akibatnya 18.396 buruh yang bekerja di industri ini harus rela menjadi penganggur karena ter-PHK.

Sementara, ditilik dari aspek neraca perdagangan Indonesia-Cina, menurut catatan Faisal Basri (Kompas, 21/12/2009), setidaknya sejak tahun 2008, neraca perdagangan Indonesia-Cina mendadak sontak berbalik arah menjadi defisit bagi pihak Indonesia sebesar 3,6 miliar dollar AS. Padahal, setahun sebelumnya Indonesia masih menikmati surplus sebesar 1,1 miliar dollar AS. Lebih mencengangkan lagi, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan Cina meroket dari 1,3 miliar dollar AS pada tahun 2007 menjadi 9,2 miliar dollar AS pada tahun 2008, atau meningkat lebih dari 600 persen. Selama Januari-Oktober 2009, defisit sudah mencapai 3,9 miliar dollar AS. Pelonjakan defisit perdagangan dengan Cina pada tahun 2008 disebabkan sebelum tahun 2008 data impor tak memasukkan barang yang berasal dari kawasan berikat. Berarti, sebenarnya, defisit perdagangan dengan Cina sangat boleh jadi sudah berlangsung sebelum tahun 2008.

Problem lain terkait kesiapan kita dalam menghadapi CAFTA adalah ekonomi biaya tinggi (*high cost*) yang kerap mewujud dalam retribusi, uang keamanan, uang sumbangan, biaya pengawalan barang, uang jago, dan beragam bentuk biaya siluman lainnya. Dari seluruh biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan negeri ini, ditaksir sekitar 12-15 persennya adalah biaya siluman. Pola rente

calculation of BPS, in which the balance of trade between Indonesia and China was now in deficit. That is, the value of imports from China are higher than Indonesia's exports to China. Citing BPS records (2010), the value of Indonesian exports to China in February 2010 reached 986.2 million U.S. dollars, down from 1.01 billion U.S. dollars from January 2010. While the data in 2008 shown that imported goods from China has taken over 70 percent domestic market share which was previously seized by small and medium business sectors nationwide.

From the impact side of China-ASEAN free trade in the context of national industries' survivability and competitiveness, quoting Martin Manurung (2010), there are recorded at least 10 Indonesian manufacturing sectors that will suffer negative impact when ACFTA is truly realized. If we are honest, currently the condition of the national industry is already in a difficult position and cannot stand to compete with imported products. The ten industry sectors include textiles and textile products (TPT), food and beverage industry, petrochemical industry, industrial equipment and agricultural machinery, footwear, synthetic fiber industry, electronic industry (including cable and electrical equipment), industrial machinery, industrial engineering and steel industries.

If the impact of deindustrialization is true, then certainly the campaigns of SBY-Boediono government to fight poverty and reduce unemployment is only a discourse. It was predicted that the threat of de-industrialization has the potential to trigger mass layoff toward three to 7.5 million workers. For the record, before ACFTA enacted, the textile and apparel sector has been out of league for quite some time. In the year 2009 alone, at least 271 factories or companies were closed. As a result 18,396 workers who worked in this industry must be willing to become unemployed because of the job cut.

Meanwhile, judging from the aspect of Indonesia-China trade balance, according to the record of Faisal Basri (Kompas, 21/12/2009), at least since 2008, the Indonesia-China trade balance has turned drastically into deficit for the Indonesia side amounted to 3.6 billion US\$. In fact, a year before Indonesia was still enjoying a surplus of 1.1 billion U.S. dollars. More surprisingly, the trade balance between Indonesia's non-oil deficit with China soared from 1.3 billion US\$ in 2007 to 9.2 billion US\$ in the year 2008, or an increase of more than 600 percent. During January-October 2009, the deficit had reached 3.9 billion US\$. The high trade deficit with China in 2008 was because before the year 2008 the trade data did not include imports of goods originating from the bonded area. This means, in fact, the trade deficit with China is probably already underway before the year 2008.

Another problem related to our readiness in the face of ACFTA is the high economic cost which is often manifest in retribution, security money, money donations, cost of securing the goods, money rooster, and various forms of other hidden costs. Of all the production costs incurred by companies of this country, an estimated cost of around 12-15 percent of them is invisible/unregister cost. The pattern of economic renten is causing the high price of Indonesian

ekonomi ini menyebabkan harga produk barang kita Indonesia (terutama untuk pasar ekspor) menjadi berbiaya tinggi dan sulit bersaing. Masalahnya, hingga kini pemerintah tak terlihat serius memberantas bandit-bandit berseragam dan preman jalanan yang menjadi penyebab tingginya biaya produksi ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, jelas daya saing produk industri nasional kita sampai kiamat sekalipun tak akan pernah bisa kompetitif.

Berikutnya, infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, saluran telepon, dan seterusnya. Lemahnya infrastruktur ini menyebabkan akselerasi pembangunan (terutama dalam rangka memacu investasi asing) sampai detik ini terus berjalan tertatih-tatih. Kendala utama pembangunan infrastruktur ini adalah biaya. Sebagai contoh, pendanaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6,3-6,9 persen sepanjang 2009-2014 diperkirakan baru mencapai Rp 2.019 triliun. Ironisnya, kemampuan APBN/APBD untuk belanja infrastruktur hanya berkisar 15 persen. Kemampuan belanja infrastruktur APBN yang minim ini antara lain disebabkan pembayaran cicilan utang periode 2009 sebesar Rp 92,242 triliun. Cicilan ini terus membengkak disebabkan volume utang yang juga terus membengkak, ditambah defisit APBN 2010 sebesar Rp 77,1 triliun.

Soal lain adalah birokrasi yang tidak efisien, misalnya mekanisme pengurusan izin usaha yang kerap berbelit dan memakan waktu lama. Kondisi tak hanya berdampak psikis, yakni melemahkan etos dan spirit berusaha masyarakat kita, namun juga membuat gerah para investor untuk menanamkan berinvestasi di Indonesia. Berikutnya, akses kredit yang terbatas, terutama bagi usaha-usaha mikro dan kecil. Padahal, jenis usaha inilah yang paling banyak menampung tenaga kerja. Diperkirakan 80-90 persen angkatan kerja ada menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Faktor teknis lainnya adalah tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi. Berbeda dengan Indonesia, bunga pinjaman yang diterapkan pemerintah Cina dalam rangka menggairahkan usaha rakyat hanya dipatok pemerintah antara 4-6 persen per tahun, sedangkan di Indonesia suku bunga kredit masih bertengger di angka 14-16 persen. Dengan suku bunga pinjaman sebesar itu, bisa dipastikan iklim usaha di Indonesia akan terus melesu.

Berikutnya, terkait sumberdaya angkatan kerja dan tenaga kerja yang mayoritas (60 persennya) masih berpendidikan level SD ke bawah. Kondisi itu tentu sangat mempengaruhi kualitas kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja kita. Soal lain yang juga tak kalah penting adalah terkait penegakan dan kepastian hukum. Di tengah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberantas korupsi, dan mereformasi birokrasi agar belaku sebagai abdi negara dan pelayan rakyat, yang mencuat ke permukaan justru beragam ironi, mulai dari kasus "Century Gate" yang merugikan uang negara sebesar 6,7 triliun, perampokan pajak perusahaan yang dilakukan Gayus Cs di Kantor Dirjen Pajak (dengan total kerugian negara mencapai Rp 28 miliar), hingga tindak pidana manipulasi pajak 350 perusahaan yang dilakukan oknum Kanwil Pajak Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 miliar.

products (especially for export markets) and resulted to face tough competition. The problem is until now the government is not serious to combat the 'uniform bandits' and street thugs that were causing the high production cost. If this condition continues, clearly the product competitiveness of national industries, even until the end of the world comes, will never be competitive.

Next, inadequate infrastructure, such as roads, ports, railways, electricity, phone lines, and so on. The weakness has led to accelerated development of infrastructure (especially in the context of boosting foreign investment) to this moment still continue to lumber. The main obstacle is the cost of building these infrastructures. For example, the infrastructure funding to encourage economic growth from 6.3 to 6.9 percent during 2009-2014 are estimated to reach IDR 2019 trillion. Ironically, the ability of national or local state budget (APBN/APBD) for infrastructure spending is only about 15 percent. The low budget of infrastructure spending is partly due to lack of payment of national debt repayment period of 2009 amounting to IDR 92.242 trillion. This installment continues to swell due to the volume of debt that continues to swell, plus the state budget deficit in 2010 has amounted to reach Rp 77.1 trillion.

Another issue is the inefficient bureaucracy, such as mechanism of application permits that are often cumbersome and time consuming. The condition affects not only psychological, which weaken the ethos and spirit of entrepreneurship in our society, but also repel investors to make investment in Indonesia. Next, limited credit access, especially for small and micro enterprises. Whereas, this type of business is the most accommodating for labor. An estimated 80-90 percent of the workforce are relying on this sector.

Another technical factor is the high interest rate for loan. Unlike Indonesia, China's government imposed low interest in order to stimulate people's business, which is pegged by the government between 4-6 percent per year, while loan rates in Indonesia are still perched between 14-16 percent. With interest rates at that, we can be sure the business climate in Indonesia will continue to slumber.

Next, related to the workforce and manpower resources that majority (60 percent) are having education of primary level and below. This condition is greatly affect the quality of work and productivity levels of our workforce. Another issue that is also no less important is related to legal enforcement and certainty. In the midst of a government commitment to improve people's welfare, combating corruption, and reforming the bureaucracy in order to present as good servant of the state and the people, instead what is raising to the surface is various ironies, ranging from cases of "Century Gate" that causing the state loss of IDR 6.7 trillion, corporate taxes robbery by Gayus Cs in the Office of the Director General of Taxation (which gave total loss to the state reaching IDR 28 billion), to 350 companies criminal tax manipulation by unscrupulous officer of Surabaya Regional Tax Office which negatively impacts the state as much as IDR 300 billion.

It is a fact that corruption and state money plundering are still intensely ongoing in this country. Daniel Lev indication of

Faktual, korupsi dan penggerogotan uang negara masih terus berlangsung intens di negeri ini. Sinyalemen Daniel Lev tentang “birokrasi pencuri” (*cleptocracy*) yang terus menguat di Indonesia pasca reformasi memang benar adanya. Aktor-aktor parasitis semacam mafia kasus, mafia peradilan, broker jabatan, dan sejenisnya dipastikan masih eksis dan terus mengintip celah hukum yang bisa dipakai untuk menguras uang negara; tentu dengan kiat dan modus korupsi yang lebih canggih. *Law enforcement* yang lemah adalah titik masuk dari mewabahnya beragam kasus korupsi dan penyimpangan keuangan negara. Jangan salahkan jika komunitas ekonomi dan bisnis internasional memberi stempel Indonesia sebagai “negeri sejuta transaksi”, dimana hukum dan keadilan tak lebih dari komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Jurnal Sosial Demokrasi volume 8 dirancang untuk mendiskusikan sekaligus menuangkan beragam ide dan gagasan terkait perdagangan bebas regional Cina-ASEAN. Mungkinkah ACFTA menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat? Atau jangan-jangan ACFTA malah kian menggerus kedaulatan ekonomi nasional? Sebab, mengutip data *World Economic Forum* (WEF, 2009-2010), kinerja ekonomi dan tingkat produktivitas Indonesia dalam perdagangan global (terkait *global competitiveness index*, yang meliputi indikator institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, efisiensi pasar barang, tenaga kerja, pasar keuangan, teknologi, dan *market size*) masih berada pada posisi 54 dari 134 negara, jauh di bawah Cina yang menduduki urutan ke-29.

Yang pasti, ACFTA tidak akan memberi keuntungan apa pun bagi Indonesia jika kesiapan Indonesia tidak dibangun. Apalagi, menghadapi lawan dagang seperti Cina yang sudah berada jauh di depan. Seperti dikatakan Seneca (filsuf Roma abad I), keberuntungan hanya terjadi saat “peluang bertemu kesiapan.” Dengan kata lain, ACFTA harus menjadi momentum sekaligus medium yang menguntungkan para pihak yang bersepakat. Semua bangsa yang berdagang tahu persis hukum kesepakatan dagang, yaitu *win-win solution*; dimana kedua belah pihak harus sama-sama merasakan manfaatnya.

Harapan kami, beragam ide dan gagasan yang tersaji dalam berbagai tulisan di *Jurnal Sosial Demokrasi* edisi ke-8 (bertajuk: “Perdagangan Bebas ASEAN-Cina: Berdagang Untuk Siapa?”) ini dapat menjadi konstribusi pemikiran yang konstruktif, sekaligus ajang koreksi bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dan mawas diri dalam membuat sebuah kebijakan, yang langsung atau tidak akan berdampak pada kedaulatan politik dan kepentingan ekonomi nasional kita ke depan. *Akhirul kalam*, selamat membaca, dan tetap berpikir merdeka! ■

Launa dan Azman Fajar,
Pelaksana Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi

the “birorasi thief” (cleptocracy) which continues to strengthen in post-reformation Indonesia is true. Parasitic actors such as mafia of legal cases, the judicial mafia, broker for position, and the like are certainly still exist and continue to peek the legal gaps that could be used to drain state money; of course with more sophisticated way and modes of corruption. Weak law enforcement is the entry point for the outbreak of various cases of corruption and deviation of state’s finance. The international business and economic community cannot be blamed for giving Indonesia stamp as a “land of a million transactions”, where law and justice are no more than commodities that can be traded.

This 8th edition of Journal of Social Democracy is designed to discuss and convey various ideas and thoughts related w China-ASEAN ith regional free trade. Can ACFTA become an opportunity to enhance the welfare of the people? Or perhaps ACFTA weakens national economic sovereignty? Because, quoting the data of the World Economic Forum (WEF, 2009-2010), Indonesia’s economic performance and level of productivity in global trade (related to global competitiveness index, which includes indicators of institutions, infrastructure, macroeconomic stability, efficiency of goods markets, labor, financial markets, technology, and market size) is still placed in the 54th position out of 134 countries, far below China which took the 29th position.

What is sure, ACFTA will not give any advantage for Indonesia if the readiness of the country is not built. Moreover, facing trade opponents such as China that is already far ahead. As said by Seneca (Roman philosopher of the first century), luck only happens when the “opportunity meets preparedness.” In other words, ACFTA should become a profitable momentum and also medium for the consenting parties. All the states that conduct trade know exactly the legal trade trade agreements, which is win-win, where both parties should equally benefit.

Our hope that various ideas presented in many papers in this Journal of Social Democracy the 8th edition (which titled: “ASEAN-China Free Trade: Trading For Who?”) can be a constructive contribution of thoughts, as well as a correction for the government so it can be more cautious and introspective in drafting a policy, which directly or not will have impact on the national political sovereignty and economic interests in the future. In our last words, happy reading, and keep thinking independently! ■

Launa and Azman Fajar,
Executing Editors Journal of Social Democracy



Transkrip diskusi edisi kedelapan
Jurnal Sosial Demokrasi,
17 Februari 2010

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA:

Berdagang untuk S



Siapa?



PENGANTAR REDAKSI

Dalam rangka menyambut perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA), pengusaha dan buruh berdiri di sisi yang sama dalam melakukan penolakan atas implementasi kesepakatan tersebut. Keduanya meradang karena beratnya konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai akibat diberlakukannya perdagangan bebas itu, baik dari sisi industri maupun tenaga kerja. Oleh karena itu, salah satu pertanyaan pokok bertanya bahwa untuk kepentingan siapakah sebenarnya Indonesia masuk perdagangan bebas ASEAN-Cina tersebut?

Sinyalemen negatif perekonomian Indonesia terlihat jelas dengan diimplementasikannya kesepakatan perdagangan bebas diantara negara-negara ASEAN serta antara Cina dan ASEAN (AFTA dan ACFTA). Cina akan lebih dominan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN ketika kesepakatan perdagangan bebas Cina dan ASEAN (ACFTA) diberlakukan. Implikasinya, termasuk untuk Indonesia, ACFTA mendorong peningkatan pengangguran karena banyaknya industri manu-

faktur dan sektor produktif lainnya yang akan tutup. Setidaknya, ada 10 sektor industri manufaktur Indonesia akan berada di titik nadir jika Indonesia merealisasikan ACFTA. Kesepuluh sektor industri yang akan terpuruk jika ACFTA dilaksanakan meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri makanan dan minuman, industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja. Padahal, saat ini jauh sebelum ACFTA diberlakukan, industri dalam negeri sudah kalah bersaing dengan produk impor.

Jika 10 sektor industri itu makin sulit dan terjadi defisit perdagangan, maka jumlah pengangguran akan meningkat. Hal ini bisa terlihat, untuk perusahaan atau pabrik tekstil, pada tahun 2009 saja sebelum ACFTA diberlakukan secara efektif, ada sekitar 271 pabrik atau perusahaan tutup karena kalah bersaing, dan akibat dari itu ada 18.396 orang yang menjadi pengangguran akibat PHK. Disamping itu,

dari sisi permodalan, Indonesia masih kalah bersaing dengan Cina. Misalnya, bunga pinjaman yang diterapkan di China berkisar antara 4% sampai 6% per tahun, sedangkan di Indonesia mencapai 14% sampai 16%. Hal ini tentu akan membuat iklim perindustrian di Indonesia akan semakin berat tatkala perdagangan bebas dilakukan tanpa menurunkan suku bunga pinjaman. Tingginya bunga pinjaman ini menandakan bahwa kinerja sektor keuangan di Indonesia masih tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian tindakan cepat dan sistematis yang harus dilakukan Indonesia bila ingin melaksanakan perdagangan bebas ASEAN-China tersebut.

Kemudian, dalam rangka menyikapi berbagai persoalan berkait dengan implementasi ACFTA, Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi mengundang berbagai pihak untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Beberapa pihak yang diundang diantaranya adalah Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDIP), Andito (SP Maritim), Jaki Andrianto (Warta Ekonomi), Alexander C. Chandra (Trade Knowledge Network), Willy Aditya (Nasional Demokrat), Aditya Perdana Putra (Warta Ekonomi), Timboel Siregar (OPSI), dan seluruh awak redaksi Jurnal Sosial Demokrasi. Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan menyangkut diberlakukannya kesepakatan ACFTA antara Asian dengan China. Bagaimana implikasi kesepakatannya tersebut dan langkah apa yang seharusnya diambil Indonesia dalam merespon diberlakukannya kesepakatan tersebut? Seperti biasanya, diskusi dipimpin oleh Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi, Ivan A. Hadar dan dibuka oleh Pemimpin Redaksi, Amir Effendi Siregar.

Amir Effendi Siregar

Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya banyak orang baru yang datang dalam diskusi kita malam ini. Oleh karena itu, saya ber-

harap, secara singkat, masing-masing peserta memperkenalkan diri.

Diskusi kita kali ini akan di-cover oleh majalah *Warta Ekonomi* supaya amplifier-nya lebih besar. Jadi, disamping dimuat dalam *Jurnal Sosial Demokrasi* edisi kedelapan, juga akan disebarluaskan melalui majalah *Warta Ekonomi*.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, seperti biasa, diskusi kita akan dipimpin oleh Saudara Ivan A. Hadar. Selain itu, dalam kesempatan ini, saya juga hendak menyampaikan bahwa pada hari Senin nanti akan ada diskusi tentang Jaringan Demokrasi Asia dengan isu yang masih sama dan juga akan di-cover oleh majalah *Warta Ekonomi*. Saya berharap ada beberapa media seperti Kompas yang akan meng-cover diskusi ini. Kemarin, mereka bersedia untuk datang, tetapi belum hadir hingga sekarang. Mudah-mudahan nanti menyusul. Silahkan Bung Ivan memimpin diskusi kita malam ini!

Ivan A. Hadar

Terimakasih. Baiklah saudara-saudara sekalian. Saat ini, kita masih berada pada suasana perayaan *Gong Xi Fa Cai*. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan *Asian China Free Trade Agreement* (ACFTA)? Seperti Martin bilang, jarang-jarang ada pengusaha dan pekerja sepakat dengan menyatakan bahwa ACFTA kayaknya berbahaya. ACFTA ini sudah disepakati delapan tahun yang lalu. Namun, seperti biasa, Indonesia suka tanda tangan tanpa melihat isinya dengan jelas. Sekedar ikut-ikutan, dan ketika sampai pada waktunya, baru kemudian kalang kabut. Semuanya mengeluh, terkaget-kaget, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika jauh sebelumnya kita telah melakukan berbagai persiapan yang diperlukan.

Tanggal 4 November 2002 di Kamboja, Pnom Penh, perjanjian tentang

ACFTA disepakati. Sepanjang persidangan Januari 2010, Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak, Pemerintah, Ekonom, Asosiasi Pengusaha, Kejati, PAPMI, PERKOSMI, dan lain-lain. Kesimpulan yang didapat dan utama dari pertemuan itu adalah melakukan penangguhan berkenaan dengan kesepakatan ACFTA untuk beberapa jenis produk lokal. Itu DPR. Kalau kita pakai istilah ABG ini bisa dibilang banci karena sudah sepakat, tetapi hendak ditanggihkan.

Sofyan Wanandi mengatakan bahwa ACFTA merupakan persoalan kecil. Dia juga bilang Malaysia, Thailand kondisinya juga mirip dengan Indonesia. Oleh karena itu, dia mengusulkan perlunya dilakukan negosiasi ulang karena mungkin akan didukung oleh Malaysia dan Thailand. Bahkan, besar kemungkinan akan didukung oleh negara-negara lain yang, katakanlah, memiliki persoalan yang sama.

Cina memang sebuah fenomena. Ketika Uni Soviet ambruk banyak yang mengatakan akan terjadi ini dan itu, ada juga yang mengatakan akan terjadi benturan peradaban (*the clash of civilization, red*). Amerika akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat *approach*, usulan-usulan untuk *good governance*, dan lain sebagainya. Namun, belum ada yang mengatakan bahwa Cina akan menjadi sebuah fenomena dalam rentang waktu sepuluh sampai lima belas tahun kemudian. Tiba-tiba saja, Cina diperkirakan akan melejit karena dalam sektor ekonomi telah menjadi nomor dua di dunia melebihi Jepang. Pada tahun 2025, ada yang memprediksi bahwa Cina akan menjadi yang pertama di dunia mengalahkan Amerika Serikat. Cina dan segala kehebatannya adalah hal yang konkrit. Pengusaha Indonesia pernah melakukan perjalanan dari pantai utara Jepara sampai Jakarta. Mereka mendapati jalan yang rusak, berlubang, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, sistem transportasi di Cina sudah sangat baik dan maju. Nah, pertanyaannya, dalam situasi semacam ini, bagaimana kita bisa menang melawan Cina?

Pertanyaan berikutnya yang layak dijawab adalah apakah Indonesia harus melakukan negosiasi dalam beberapa bidang dengan Cina atau maju terus pantang mundur mengingat Indonesia adalah Negara besar, pasar besar, dan punya harga diri? Oleh karena itu, tidak mungkin lari dari kesepakatan yang sudah dilakukan.

Saya kira cukup itu saja sebagai pengantar singkat. Martin yang membuat TOR diskusi malam ini barangkali bisa mengawali diskusi. Silahkan!

Martin Manurung

Menurut saya, intinya begini. Dulu, awal-awal terbentuknya Pansus Century, Bang Faisal pernah berbicara bahwa sebenarnya yang perlu dipansuskan itu ACFTA bukan Century. Meskipun merupakan pilihan untuk mempansuskan keduanya, tapi untuk mempansuskan ACFTA, menurut saya, juga masuk akal. Ini karena ACFTA merupakan persetujuan yang ditandatangani oleh pemerintah dan berlaku seperti undang-undang. Nah, tanpa ada partisipasi dari publik, kita tidak pernah tahu, tapi konsekuensinya sudah terjadi. Persoalannya adalah ada beberapa ekonom- yang berasal dari *mahzab* sebelah Kanan- yang mengatakan bahwa dari sisi *general equilibrium* kita akan lebih baik kalau melakukan ACFTA karena akan mendapatkan barang yang lebih murah dengan jumlah lebih banyak dan kualitas lebih bagus.

Namun, persoalannya bahwa dalam sebuah negara kita tidak hanya melihat *welfare effect*-nya saja. Konsumen kita mungkin akan lebih baik karena mempunyai pilihan lebih banyak dan harga lebih murah, tapi persoalannya adalah bagaimana *treatment* negara terhadap mereka

Namun, persoalannya bahwa dalam sebuah negara kita tidak hanya melihat *welfare effect*-nya saja. Konsumen kita mungkin akan lebih baik karena mempunyai pilihan lebih banyak dan harga lebih murah, tapi persoalannya adalah bagaimana *treatment* negara terhadap mereka yang “kalah” akibat diberlakukannya ACFTA?

yang “kalah” akibat diberlakukannya ACFTA? Dari sisi *employment*, siapapun harus mengakui bahwa ini akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Dari sisi produksi, dampaknya lebih jelas lagi. Di sini, akan ada beberapa industri yang tutup meskipun teman-teman liberal mengatakan bahwa kita tidak harus menjadi negara yang berkonsentrasi pada sektor manufaktur. Sebaliknya, kita bisa mengerjakan bidang-bidang yang lain.

Hal-hal semacam itu mungkin tidak akan menjadi masalah jika kita mempunyai *strategic planning* atau *blue print* yang baik. Namun, dari sisi ini, kita acapkali membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya temporer.

Kita tidak mempunyai *blue print* yang jelas. Lalu, dari sisi pemihakan, kita tidak pernah tahu Negara ini memiliki pemihakan terhadap apa ataupun kepada siapa? Jika kita mengamati negara-negara lain, misalnya, sebagai perbandingan, komparatif analisisnya, bahkan negara-negara yang secara terbuka menyatakan negaranya menganut sistem ekonomi liberal sekalipun mempunyai pemihakan yang jelas. Amerika Serikat meskipun tidak mempunyai skema *benefit* sekomprensif Uni Eropa, tapi *employment benefit* tetap dibayarkan. Ada pemihakan di situ.

Kekacauan finansial ketika krisis global terjadi yang mempunyai implikasi politik sampai sekarang ini sebenarnya terjadi karena Amerika Serikat mempunyai keberpihakan terhadap ekonomi domestiknya. Ketika terjadi krisis likuiditas di dalam negeri, Amerika menarik likuiditas dari luar untuk menutup kesenjangan (*gap*) dalam negeri. Nah, dalam konteks ini, ada pemihakan dari otoritas negara. Di Indonesia, pemihakan semacam itu tidak jelas.

Menurut saya, apakah ACFTA bisa ditunda atau tidak bukanlah *the basic question*. Menurut saya, hal yang lebih mendasar adalah bahwa baik dalam konteks ACFTA maupun dalam kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya memperlihatkan bahwa negara tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana seharusnya. Itu saja. Oleh karena itu, saya lebih fokus pada hilangnya tanggung jawab negara terhadap warganya. Menurut saya, harus ada yang mengurus mereka yang kalah, dan itu yang harus lebih dipikirkan dibandingkan dengan meributkan sesuatu yang bersifat *trivial*, permukaan. Mungkin Rieke akan menambahkan.

Rieke Diah Pitaloka

Terima kasih. Saya ingin mengatakan dengan tegas bahwa kita



memang tidak siap menghadapi ACFTA. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa malu kalau memang harus renegotiasi. Kalau *mindset*-nya untuk kepentingan rakyat, maka jauh-jauh hari mestinya kita harus sudah mempersiapkan diri. Tadi, misalnya, dikatakan bahwa infrastruktur kita kalah jauh dibandingkan dengan Cina. Banyaknya jalan yang rusak membuat ongkos produksi kita menjadi tinggi. Meskipun saya tidak mengetahui angkanya secara pasti, tapi tampaknya bahwa panjang jalan kita saja jauh lebih pendek dibandingkan dengan Cina.

Kondisi energi kita juga memprihatinkan. Ketersediaan energi yang *byar pet* (hidup mati, red.) juga mengakibatkan ongkos ekonomi tinggi. Dari segi dunia usaha, kondisi ini jelas membuat kita tidak bisa bersaing, belum lagi menyangkut perda-perda retribusi daerah. Itu luar biasa. Para pengusaha jelas cukup tercekik. Di daerah pemilihan saya, pabrik tekstil sudah banyak yang tutup. Memang,

tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, tapi tiap hari ada saja yang di-PHK.

Jika sebelum ada ACFTA saja banyak perusahaan yang sudah tutup, maka kondisinya sangat mungkin akan lebih parah ketika ACFTA dilaksanakan. Itu berarti akan semakin banyak pengangguran. Kebijakan kita juga tidak mendukung industri dalam negeri. Sebagai misal, ada pabrik sepatu di Bandung kelas menengah dengan kualitas bagus. Namun, dia tidak bisa bersaing karena karet mentah yang kita produksi dijual keluar. Akibatnya, untuk sol sepatu, kita harus membeli bahannya dari luar. Padahal, harga sol sepatu mahal sekali sehingga ongkos produksi menjadi sangat tinggi. Akibatnya, kita tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Pemerintah telah menandatangani perjanjian delapan tahun lalu. Mestinya, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menghadapi hal tersebut. Ironisnya, pemerintah malah bilang, "Saya tidak tahu, bukan saya

yang menandatangani perjanjian. Itu perjanjian pada masa pemerintahan Gus Dur". Padahal, dengan jangka waktu itu, seharusnya, kita sudah mempersiapkan diri.

Dari sisi ketenagakerjaan, seharusnya, ada proteksi. Tadi, saya sempat diskusi dengan Pak Erwin, proteksi terhadap warga negara terutama berkenaan dengan ACFTA mestinya dilakukan terutama pada pekerja. Di sini, seharusnya, ada proteksi perlindungan jaminan sosial dasar. Saya pernah mendapat surat dari Dewan Pertimbangan Agung- waktu itu ketua bironya Bapak Ahmadi, memberikan apresiasi terhadap pidato Gus Dur- ketika menjadi presiden- yang mendorong adanya jaminan sosial nasional tahun 2000. Pada jamannya Megawati, sehari sebelum jabatannya usai, tanggal 19 Oktober 2004, undang-undang jaminan sosial nasional ditandatangani yang sebenarnya merupakan amanat pasal 28 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dan pasal 34 bahwa Negara wajib menyelenggarakan jaminan sosial. Mestinya, jika undang-undang ini hendak dilaksanakan, keempat badan yang menjadi penyelenggara jaminan sosial ini, ASKES, JAMSOSTEK, TASPEN dan ASABRI harus berproses menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ini berarti bahwa dia harus menjadi badan yang nirlaba, tidak boleh *profit oriented*.

Dalam undang-undang tentang jaminan sosial, dikatakan bahwa setelah lima tahun diundangkan maka harus sudah menjadi BPJS, dan ini berarti Oktober 2009. Tetapi ternyata, tidak juga digubris oleh pemerintahan SBY. Padahal, jaminan sosial ini mestinya bagian dari strategi menghadapi ACFTA karena ini berlaku pada seluruh warga negara, tidak pandang kaya atau miskin. Namun, undang-undang jaminan sosial tersebut tidak dilakukan bahkan hingga ACFTA diberlakukan.

Di Komisi IX, kami sudah memasukkan ini dalam Proleknas, prioritas pada 2010. Namun, badan-badan yang seharusnya menjadi pelaksana jaminan sosial seperti halnya enggan untuk melaksanakannya. Hanya ASKES yang sudah berproses menjadi badan nirlaba. Menurut saya, hal inilah yang harus didorong untuk menyikapi ACFTA 2010 ini karena persoalannya mau ada atau tidak ada ACFTA sistem jaminan sosial merupakan proteksi yang harus ada. Terlebih dengan adanya ACFTA.

Ke depan, kebijakan yang harus kita dorong bahwa sistem jaminan sosial ini harus ada, BPJS ini harus ada. Ironisnya, SBY justru menargetkan tahun 2014. Menurut saya, ini hanya merupakan strategi memenangkan pemilu. Padahal, ACFTA-nya terus bergulir. Ancaman prediksi 7,5 juta PHK itu, menurut saya, kemungkinan bisa menjadi kenyataan. Pertanyaannya kemudian apa perlindungan negara terhadap mereka yang di PHK? Saya pikir sampai hari ini perlindungan itu tidak ada.

Saya rasa itu saja. Sekali lagi, saya minta masukan utamanya dari pengalaman dengan negara lain. Pertanyaan saya terakhir kalau mau menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan pengalaman negara lain apakah harus nirlaba atautah tidak? Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Menarik. Nanti, kita akan membahas sistem jaminan sosial.

Kalau tadi Rieke bilang perlunya melakukan negosiasi ulang. Menteri Perindustrian mengusulkan perlunya negosiasi ulang untuk 228 pos-pos tarif industri tertentu dengan perincian 146 pos tarif yang sudah masuk ke dalam pos normal tarif (NP1). Sekarang, tarif masuk adalah 0% mulai Januari 2010 akan dinegosiasi ulang agar masuk ke dalam pos tarif NP 2 yang berlaku tahun 2012. Jadi,

masih ada tenggang waktu kira-kira 2 tahun. Lalu, sebanyak 160 pos tarif yang harus 0% di tahun 2010 akan diusulkan dimasukkan pos tarif 0,75% yang akan diberlakukan tahun 2018. Kemudian, ada 22 pos tarif yang sudah 0% pada saat ini akan dinaikkan menjadi 5% pada 2014.

Seperti yang dibilang tadi, kalau pun pemerintah berhasil melakukan negosiasi ulang dan komite ACFTA setuju maka pertanyaannya kemudian adalah apakah betul para pelaku usaha kita akan mampu bersaing? Dalam hal ini, kita bisa mengidentifikasi beberapa kelemahan, diantaranya adalah ketersediaan primer proses produksi, institusi dan juga lemahnya penegakan hukum, dan lain

Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Itu jelas. Setiap perubahan kebijakan ekonomi pasti ada *adjustment cost*-nya, ada angka penyesuaian. Yang menjadi masalah adalah apakah masyarakat yang *vulnerable* itu dapat dilindungi dalam sistem jaminan sosial atautah tidak?

sebagainya. Kondisi ini akan menjadi semakin buruk jika kita lihat bahwa pemerintah, dalam hal ini bea cukai, tidak dapat menanggulangi penyelundupan. Selain itu, badan pemantau obat dan makanan belum sanggup mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Kesimpulan Komisi VI DPR RI pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah seperti Menteri Perindustrian, UKM dan Koperasi, BUMN dan Keuangan pada 20 Januari 2010 adalah Komisi VI memberikan waktu 6 bulan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkret, tapi elegan terkait kesepakatan ini. Jika pemerintah tidak berhasil, maka Komisi VI akan membentuk panitia kerja atau PANJA. Jika panja tersusun, maka waktu pemerintah dan DPR akan habis di ruang perdebatan, yang melelahkan, memboroskan anggaran dan akan membingungkan publik, sementara hasil konkritnya tidak muncul.

Nah, apakah negosiasi menghasilkan, katakanlah, pengunduran waktu 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, ataupun 8 tahun, tetap saja pertanyaannya sama, yakni apakah kita akan mampu bersaing? Ada yang bilang bahwa pemerintah harus tahu Negara ini mau dibawa kemana? Apakah akan menjadi Negara industri, Negara pertanian atau Negara saudagar saja?

Alexander C. Chandra

Menurut saya, pembicaraan mengenai negosiasi itu nonsens. Alasannya, kesepakatan ini sudah ditandatangani delapan tahun lalu. Kita bisa membayangkan posisi Cina yang sudah bernegosiasi panjang dengan Negara ASEAN, lalu kita bilang kita mau menegosiasikan ulang. Jadi, kesannya seperti orang pinjam uang pada Anda lalu dia bilang, "Saya gak bisa bayar".

Maksud saya adalah pelaku usaha di Indonesia itu, jujur saja, mengece-



wakan. Meskipun hal ini bukan hanya dari kelompok usaha saja, tapi juga dari kelompok masyarakat sipil. Isu tentang kesepakatan ACFTA ini sudah berkembang sejak 2004, tapi tanggapan yang muncul itu baru akhir tahun lalu saja. Ketika Departemen industri memberikan pernyataan bahwa kita akan kebobolan dengan ACFTA, kita tidak melakukan persiapan seperti dikatakan tadi. Meskipun ACFTA diberlakukan tahun 2012 tanggapan para pelaku usaha kita akan sama seperti sekarang. Oleh karena itu, kalau kita mundur 2 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahunpun maka tidak akan ada dampaknya. *Eventually*, kita tetap akan ketemu dengan Cina.

Inti yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa menutup mata bahwa ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Itu jelas. Setiap perubahan kebijakan ekonomi pasti ada *adjustment cost*-nya, ada angka penyesuaian. Yang menjadi masalah adalah apakah masyarakat yang

vulnerable itu dapat *discover* dalam sistem jaminan sosial ataukah tidak? Jaminan sosial tersebut yang belum pernah dibahas, selama dalam perundingan negosiasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka biasanya hanya membicarakan kemungkinan keuntungan jangka panjang.

Kita memang bisa saja membahas regulasi sekarang dan mengatakan keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dalam, katakanlah, 10 atau 20 tahun kedepan. Namun, yang tidak pernah dibahas adalah bagaimana industri beroperasi ketika merespon dalam waktu dekat pembentukan pasar yang akan terjadi? Itu saja. Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Cina sebenarnya bisa menjadi lokomotif pertumbuhan di luar sisi buruknya tadi. Bung Faisal pernah menulis tentang terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia. Ini

menjadi salah satu aspek penting yang menjadi, katakanlah, penyebab utama dari kekalahan kita. Ada yang bilang bahwa jika pemerintah diminta melakukan negosiasi ulang maka pemerintah akan kebingungan karena semua kementerian bingung, tidak ada koordinasi satu dengan yang lain sehingga jika pemerintah didorong melakukan negosiasi ulang mereka tidak mempunyai cukup pegangan sehingga akan justru berbahaya. Pemerintah akan kesulitan dalam menentukan mana industri yang masih kompetitif dan mana yang tidak. Banyak industri yang sudah diproteksi selama 10 tahun, tetapi tetap saja tidak kompetitif. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah hal-hal semacam ini harus dibuang saja, dalam pengertian tidak perlu ada negosiasi ulang ataukah perlu adanya langkah-langkah yang harus diambil?

Faisal Basri

Kita bisa mulai pembahasan dari AFTA. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah ekspor Indonesia ke negara ASEAN lainnya jauh lebih kecil daripada ASEAN ke Indonesia (lihat gambar 1 dan 2). Jadi, defisit. Nah, diantara negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang mempunyai pasar yang besar sehingga wajar bila kita menjadi sasaran masuk. Nah, ini delapan tahun dimajukan, seharusnya tahun 2018 jadi 2010 bebasnya. Kita tidak pernah membahas evaluasinya dengan Cina. Namun, inti persoalannya sebenarnya begini kira-kira, yang kesemuanya ada untung-ruginya.

Sekarang, mari kita sedikit melakukan hitung-hitungan teknis untuk melihat dampak-dampak *Free Trade Area* (lihat gambar 3). Jika kita umpakan A adalah Indonesia, B Malaysia dan C India, maka, misalnya, kira-kira begini. Sebelum ada ACFTA, kita kenakan biaya masuk 50% untuk barang import, Malaysia 60 dan India

45. Pada masa ini, kita membeli barang dari India karena lebih murah. Kemudian, kita dengan Malaysia bergabung sehingga Malaysia tidak terkena biaya masuk, 40 juga. Nah, dengan adanya *Free Trade Area*, yang tadinya kita import dari India kemudian import dari Malaysia. Ini tidak ada pengaruhnya terhadap industri dalam negeri, hanya terjadi pergeseran saja. Dari negara yang ongkos produksinya tinggi karena kita masuk AFTA, namanya *free trade nation*.

Nah sekarang sama, tapi biaya masuknya 100 %. Malaysia menjadi 40 dan India 60. Walaupun kita mempunyai ongkos produksi murah, tetapi kita kenakan harga tinggi untuk dalam negeri karena tetap 100%. Makanya, barang-barang dari luar negeri jauh lebih murah dari kita. Nah, sekarang kita bergabung dengan Malaysia sehingga menjadi 40 maka mati industri kita. Nah, sayangnya, studi-studi yang ditujukan untuk menentukan mana yang lebih baik diantara keduanya tidak ada. Studi-studi yang berusaha melihat dampak-dampak semacam itu tidak ada. Inilah yang menjadi *concern* kita.

ASEAN ini, menurut saya, menakutkan. Bayangkan, perdagangan de-

Gambar 1

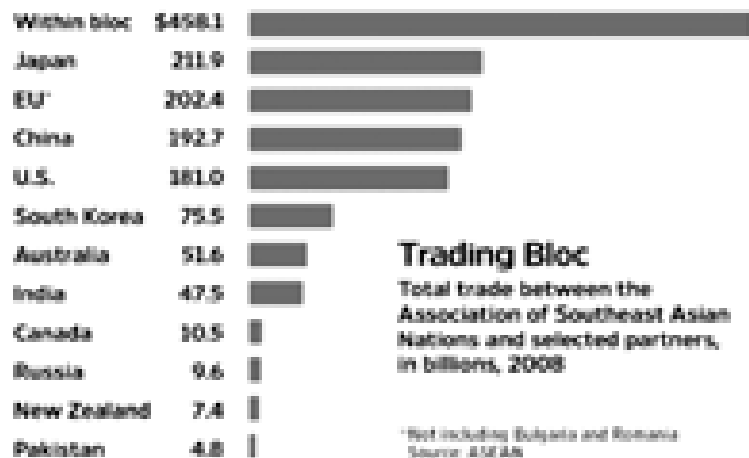
Direction of trade: Asean and Indonesia

Ingat: Peran Singapura !!!

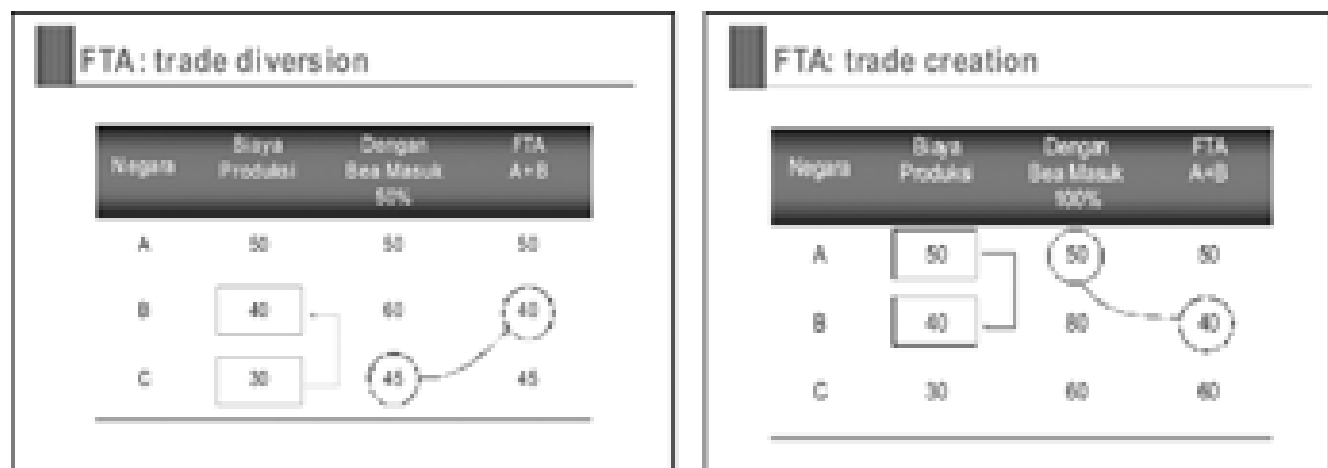
To \ From	Asean		Indonesia	
	2000	2007	2000	2007
Developing Asia	37,4	41,2	33,1	37,1
China	3,7	8,9	4,2	8,1
Japan	12,6	9,4	27,1	18,1
United States	18,2	12,2	13,0	9,4
European Union	14,4	11,1	13,7	10,0
Others	13,7	17,2	13,7	17,3

Source: AFTA Secretariat

Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

The World competitiveness scoreboard

Country	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
USA	1	1	1	1	1	1	1
Singapore	4	2	3	3	2	2	3
Hong Kong	10	6	2	2	3	3	2
Switzerland	9	14	8	8	6	4	4
Australia	7	4	9	6	12	7	7
China	27	22	29	18	15	17	20
Taiwan	17	12	11	17	18	13	20
Malaysia	21	16	26	22	23	19	18
India	42	36	33	27	27	29	30
Korea	32	31	27	32	29	31	27
Thailand	38	26	25	29	33	27	26
Philippines	41	43	46	42	45	40	43
Indonesia	49	49	50	52	54	51	43
Venezuela	91	91	91	93	93	93	97

ngan sesama negara ASEAN mencapai 1,5 triliun dollar. Semua negara ingin berdagang dengan ASEAN. ASEAN telah menjadi *the most attracted region*, dan inilah yang juga harus menjadi pertimbangan kita. Cina telah menjadi mitra ASEAN nomor tiga. Saya tidak menyangka sebegitu hebatnya pasar ASEAN.

ASEAN yang sudah terintegrasi tersebut menarik untuk investor asing. Dulu, misalnya, sebuah perusahaan multinasional seperti Toyota harus membangun pabrik di Indonesia, Thailand, dan Filipina. Ia terpaksa harus membangun pabrik di setiap negara. Sekarang ini, perusahaan seperti Toyota tidak perlu lagi membangun pabrik seperti tadi. Ia cukup membangun pabrik, katakanlah, di Indonesia sehingga nanti tinggal memasarkannya di seluruh negara ASEAN lainnya. Di sini, yang menjadi persoalannya kemudian adalah daya saing kita dalam menarik investor.

Misalnya, Jepang yang merupakan investor terbesar daya tarik Indonesia adalah nomor tiga, kemudian turun menjadi nomor empat dan terus tu-

run menjadi nomor sembilan untuk kemudian naik lagi menjadi nomor delapan dalam dua tahun terakhir. Jepang tiba-tiba saja lebih tertarik China, India, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya (lihat 4). Inilah yang menjadi masalah bagi Indonesia. Oleh karena itu, jika faktor daya tarik tidak mengalami perubahan maka akan seperti yang dibilang Rieke dan Martin tadi serta teman-teman lain bahwa persoalannya ada dalam diri kita. Kalau daya saing kita melorot terus, maka kita tidak akan menang dalam persaingan tersebut.

Pada tahun 2008-2009, ekspor kita ke Cina naik. Import kita dari Cina turun dari 14 ke 13. Ini memang laporannya baru sebulan dari tahun 2009. Tapi, dari laporan ini, kelihatan bahwa sejak tahun 2008 *balance* eksport-Import kita dengan Cina dari surplus 1,1 menjadi defisit 3,6 milyar. Nah ini data dari bulan Juli, tapi ini eksport total. Mestinya, dikurangi migasnya. Data ekspor nonmigas ternyata tidak jelek-jelek amat. Secara keseluruhan, kita sudah tahu banyak nonmigasnya. Cina memang menjadi

partner dagang kita yang semakin penting karena dalam hal ekspor menjadi tujuan dagang nomor tiga, sedangkan import nomor satu.

KT ASEAN-Cina 2001 yang kemudian dilanjutkan tahun 2004 dan 2006 sudah ada yang bebas, cabe sudah dari dulu tarifnya 0%. Perjanjian dagang bagaimanapun pasti akan membutuhkan waktu panjang. Sebelum ACFTA diberlakukan, beberapa komoditi sebenarnya sudah 0%.

Saya baru saja diskusi dengan beberapa kontraktor dan baru sadar bahwa perdagangan bebas ini juga meliputi bidang jasa, dan hal ini tidak banyak dimengerti. Kontraktor-kontraktor Cina masuk ke Indonesia secara bebas. Walaupun disebutkan bahwa manajer saja yang diijinkan masuk secara bebas, tapi tukang-tukangnya ternyata juga ikut masuk. Jadi, kita termasuk parah dalam mengawal perjanjian-perjanjian tersebut. Nanti kajiannya akan saya *share* dengan teman-teman.

Yang saya maksudkan tadi seperti yang Martin bilang, "Yuk kita membuat target, mempersiapkan diri atas perjanjian yang sudah diteken (ditandatangani, red)". Itu yang pertama. Kedua, jika pemerintah tunduk, taat dan patuh pada warga asing, pada warga dunia, maka mengapa pemerintah tidak patuh pada warga negaranya sendiri? Tanggung jawab negara pada rakyatnya harus diutamakan daripada perjanjian internasional dan diplomasi. Kalau kita mau ikut *free trade* area, maka mestinya ada proses pengintegrasian perekonomian kita dengan regional. Mengintegrasikan perekonomian kita dengan global. Syarat mutlaknya adalah bilik kita terintegrasi dulu. Sayangnya, ekonomi kita belum terintegrasi. Ini dibuktikan oleh adanya disparitas harga yang tinggi. Nah, bagaimana kita bisa menyebut negara kesatuan jika kondisi semacam ini. Orang akan lebih memilih membeli beras Thai-

land daripada Indonesia karena ongkos transportnya rendah. Sementara di kita, 30% biaya yang dikeluarkan habis di ongkos.

Kalau teman-teman pernah lihat, harga durian di Pontianak Rp. 5000-Rp.10.000, di Jakarta ini bisa menjadi Rp. 50.000. Partanyaannya bagaimana mungkin terjadi dalam suatu negara ada daerah yang harga durennya Rp. 5.000, tetapi ada juga yang Rp. 50.000. Sekali lagi, disparitas ini terjadi karena mahalnya biaya transportasi. Ongkos angkut dari Gorontalo dan Lampung ke Jakarta, misalnya, lebih mahal daripada biaya angkut dari California ke Lampung. Oleh karena itu, daripada membeli Jagung dari Lampung, maka lebih baik kita membeli jagung dari California. Dalam konteks ini, kita gagal mempertukarkan komoditas-komoditas antara sesama kita.

Selama ini, sering dikatakan bahwa pasar domestik kita sangat besar. Menurut saya, itu bohong. Pasar domestik dikatakan besar jika investor asing datang ke Indonesia dan mendirikan pabrik di Indonesia. Kemudian, memasarkan barang-barang yang mereka produksi ke wilayah regional. Kenyataannya, mereka lebih suka mendatangkan barang dari luar. Ini terjadi karena kita kurang terintegrasi.

Sekarang ini, indeks kita sudah dikalahkan oleh Vietnam. Pada tahun 2007, kita masih berada di atas Vietnam. Namun, tahun 2010 ini, kita telah dikalahkan oleh Vietnam. Oleh karena itu, kita jelas kalah dalam *free trade area*. SWOT kita paling nggak efektif sedunia. Di pasar pagi Brastagi, jeruk medan harganya Rp.14.600, sedangkan jeruk Cina harganya Rp. 6.800, - meskipun jeruk tersebut tidak begitu sehat karena airnya sudah banyak berkurang. Jeruk Medan mahal karena ongkos angkut dari Belawan ke Priok mahal sekali. Akhirnya, mereka menggunakan jalan darat. Padahal, jika mereka melewati jalan darat

Energi dan juga struktur kepebeanaan dalam sepuluh tahun kedepan kalau memang terjadi negosiasi ulang perlu dipastikan adanya *market obligation* untuk gas dan batu bara yang sudah diambil alih oleh kepres dan *Production Sharing Contractor* atau PSC. Produksi gas dan batu bara wajib menyediakan minimal 35 % dari gas dan batu bara yang digunakan untuk industri dalam negeri dan dijual dengan harga ekspor terendah

maka akan melewati 26 pos ibukota dan 14 jembatan. Ini akan mengurangi kualitas jeruk, dan yang tidak kalah penting adalah harga jeruk menjadi lebih mahal.

Yang terakhir, Cina maju pesat bukanlah mukjizat. Menurut saya, Cina biasa-biasa saja. Cina bahkan menyimpan potensi krisis yang berba-

haya karena, dalam sejarahnya, *market system* tidak cocok dengan sistem otoritarian. Cina menciptakan *market system*, tetapi tidak dalam suasana demokratis. Oleh karena itu, sekarang sudah mulai ada tanda-tanda krisis sebagai akibat proses *adjustment* di Cina yang terganggu oleh kungkungan pemerintah. Cina tidak mungkin mengalami pertumbuhan secara terus-menerus sebesar 10%. Padahal, jaminan sosial mereka belum mapan. Bahkan, penduduk usia produktif dikenai pajak lebih tinggi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mereka menaikkan upah? Oleh karena itu, mari kita persiapkan dengan baik jika krisis di Cina benar-benar terjadi. Setidaknya, Undang-Undang tahun 2004 tentang Jaminan Sosial lebih digiatkan.

Ivan A. Hadar

Energi dan juga struktur kepebeanaan dalam sepuluh tahun kedepan kalau memang terjadi negosiasi ulang perlu dipastikan adanya *market obligation* untuk gas dan batu bara yang sudah diambil alih oleh kepres dan *Production Sharing Contractor* atau PSC. Produksi gas dan batu bara wajib menyediakan minimal 35% dari gas dan batu bara yang digunakan untuk industri dalam negeri dan dijual dengan harga ekspor terendah.

Dalam hal jasa, sebenarnya ada satu lagi keuntungan yang bisa diambil dari Cina, yaitu karena cadangan devisanya melimpah maka Cina mampu memberikan *loan* tanpa embel-embel *good governance* dan sebagainya. Mereka dipastikan menang dalam tender-tender listrik dan sebagainya. Ini karena direktur utama PLN juga mempunyai kerja sama dengan Cina di beberapa daerah. Ada yang mengatakan *Washington Consensus* dijadikan sama dengan BI *consensus*. Pertanyaannya adalah apakah hal ini realistis? Pada satu sisi, Cina dipandang sebagai bahaya, tapi, di sisi yang

lain, mempunyai potensi yang besar jika pemerintah dan DPR kita tanggap. Itu bisa saja dilakukan. Dalam waktu dua tahun, kalau kekuatan yang *concern* melakukan terobosan-terobosan maka akan menghasilkan sesuatu apalagi jika didukung penuh oleh “Kabinet Indonesia Muda”.

Erwin Schweishelm

Mungkin saya hanya mau bertanya lagi kepada Bung Faisal tentang masalah deindustrialisasi karena saya kira disamping masalah demokrasi, kompetisi, lapangan kerja dan sebagainya, ACFTA merupakan *trend* yang juga mendukung *trade* deindustrialisasi di Indonesia karena yang diimpor dari Cina adalah *manufacturing goods*.

Kalau saya tidak salah yang diekspor adalah gas, minyak, batubara, dan sebagainya. Jadi, apakah hal tersebut tidak memperkuat *trend* deindustrialisasi di Indonesia? Saya juga membaca tulisan yang sangat menarik di *Jakarta Post* yang ditulis oleh praktisi perbankan dari Danamon, Helmi Al Muhammad, yang menurut saya isinya sangat sosdem karena dia bilang bahwa 30 perusahaan besar di Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bank dan sebagainya. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut mestinya tidak dipengaruhi oleh ACFTA mengingat mereka tidak mempunyai kepentingan dengan hal tersebut. Sebaliknya, yang justru menjadi masalah adalah perusahaan menengah dan kecil. Oleh karena itu, apakah hal ini juga bisa menambah lagi *trend* deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia? Sekarang ini, sebagian ekspor Indonesia di bidang nonmanufaktur telah mengalami penurunan sekitar 50 persen.

Ivan A. Hadar

Mungkin Bung Faisal akan menjawab?

Rieke Diah Pitaloka

Saya boleh menambahkan sedikit karena besok harus ke Ngawi dan mesti naik pesawat jam 6 sehingga mesti berangkat dari rumah jam 4.

Sebetulnya sudah jelas, kita memang tidak akan pernah siap jika kondisinya terus seperti ini. Dalam pemahaman saya, ada atau tidak ada ACFTA sistem jaminan sosial menjadi sebuah keharusan. Untuk itu, kita memerlukan sensus penduduk yang sifatnya *immediate*. Ini bukan persoalan DPT saja, tapi Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) karena SJSN memerlukan *data base* yang lengkap dan benar tentang penduduk. Saya selalu bertanya-tanya berapa sebenarnya jumlah penduduk kita? Ada hal yang mengkhawatirkan, karena saya juga membidangi kesehatan, pemerintah tidak mengetahui angka pasti berapa jumlah tenaga kesehatan dan klasifikasinya. Nah, bagaimana mungkin kita akan melaksanakan sistem jaminan kesehatan jika kita tidak mempunyai data tenaga kesehatan beserta kualifikasinya?

Selain itu, kita harus mendorong pemerintah untuk membuat strategi penyiapan lapangan kerja. Katanya, pemerintah akan melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). BLK yang kategori baik hanya tujuh, yang sedang tujuh, yang jelek delapan puluh tiga, tiga belas dalam tahap persiapan. Seluruh Indonesia kita bersandar hanya pada tujuh BLK. Untuk itu, kita memang tidak siap bersaing dengan Cina. Oleh karena itu, perlu ditanya apakah strategi penyiapan lapangan kerja ke depan? Jika kita tidak mempunyai strategi penyiapan lapangan kerja, maka kita hanya akan menargetkan pengiriman TKI keluar negeri sebagai komoditas. Itulah yang saya *sharing*-kan di sini.

Faisal Basri

Data tahun 2009 ini sebenarnya banyak yang aneh-aneh. Industri kita



tiba-tiba naik menjadi 4,2 sehingga penjelasan tentang deindustrialisasi macet. Biasanya, hanya satu koma sekian. Nah, *trend* jangka panjangnya kira-kira begini. Pada masa Orde Baru, industri tumbuh 12% sementara PDB separuhnya. Selama ini, industri selalu di atas PDB. Kemudian, efisiensi obligasi harusnya naik terus, laporannya sampai 35%. Kita baru 27,90 dan ini merata di hampir semua jenis industri kecuali makanan, minuman, alat rumah tangga dan alat kebersihan dan perawatan.

Yang lebih mengerikan lagi, jika kita dalam lebih jauh, maka industri baru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan industri yang keluar atau bangkrut sehingga jumlah pabrik terus mengalami penurunan setelah krisis meskipun menengahnya lebih



besar. Ini terjadi karena penjelasannya kira-kira begini. Misalnya, pabrik yang skala menengah tutup, maka mereka akan cenderung menanamkan modalnya ke UKM-UKM. Kemudian, terus mengalami pertumbuhan. Saya kira, dalam kaitan ini, basis sosdem adalah perusahaan-perusahaan industri manufaktur skala besar dan menengah.

Alokasi kredit perbankan untuk sektor manufaktur juga merosot tajam. Pada 1985, hampir 40% kredit perbankan disalurkan ke sektor industri pengolahan. Pada 2008, industri manufaktur hanya memperoleh 16% kredit perbankan. Perbankan lebih tertarik pada pembiayaan konsumsi dan pembangunan properti. Penurunan volume kredit perbankan berarti kelangkaan pembiayaan in-

Gejala deindustrialisasi
jelas nyata-nyata
melanggar basis
sosial demokrasi di
Indonesia. Ini karena
pertumbuhan kelas
menengahnya akan
lebih lambat, kemudian
kelas pekerjajnya juga
akan sangat rentan.

vestasi dan modal kerja bagi sektor industri. Dana yang tersedia tidak cukup untuk mendorong industrialisasi.

Nah, ketika industri manufaktur melemah, pos konsumsi listrik ke industri juga negatif. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai kategori sosial, rumah tangga, bisnis, dan industri umum. Rata-rata konsumsi di semua kategori yang disebutkan mengalami kenaikan kecuali industri. Ini meyakinkan bahwa memang industri kita sedang tergopoh-gopoh. Bayangkan, rata-rata semuanya naik 7-8%, tetapi untuk sektor industri negatif hingga 9%. Menurut saya, implikasinya akan menjadi cukup berat. Jumlah pekerja di sektor formal turun, sementara jaminan sosial tidak bisa naik. Oleh karena itu, *we have to be more concern* tentang hal ini. Jadi, kita



harus melakukan “*emergency call*”, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi ACFTA dan *binding*. Jadi, bagaimana mungkin industri membeli listrik lebih mahal dibandingkan dengan rumah tangga.

Gejala deindustrialisasi, kalau menurut saya, jelas nyata-nyata melanggar basis sosial demokrasi di Indonesia. Ini karena pertumbuhan kelas menengahnya akan lebih lambat, kemudian kelas pekerja juga akan sangat rentan. Itu terlihat dari jumlah orang yang di Jamsostek makin turun. Menurut saya, ini tidak boleh terus berlangsung. Untuk itu, kita harus berperjuang bersama-sama.

Satu lagi, ada keunikan Indonesia bahwa ketika terjadi krisis global kita mengklaim hebat karena tidak mengalami krisis. Namun, ketika negara lain tengah mengalami *recovery* maka kita justru sayup-sayup. Jadi, pasti ada sesuatu yang salah dalam struktur industri kita. Struktur negara kita tidak *compatible* dengan struktur negara lain karena kita masih mengeksport komoditi. Jadi, sekali lagi, ini menunjukkan bahwa struktur industri kita

lemah. Terbukti, ekspor *parts* dan komponen kita terendah. Kalau di Filipina ekspor *parts* dan komponennya mencapai 60% dari total ekspor. Nah, ini tanda-tanda pula deindustrialisasi. Padahal, dengan adanya *parts* dan komponen, kita bisa mengembangkan apapun.

Ivan A. Hadar

Ini ada produsen di Indonesia yang meminta pemerintah memaksa Cina menaikkan import dari Indonesia dengan sejumlah pakaian sebagai kompensasi dari diferensiasi mata uang, rupiah terhadap yuan sebesar 17-18%. Jadi, menaikkan harga ekspor ke Cina lebih tinggi menjadi 17-18 % sehingga barang-barang Cina yang masuk harganya lebih rendah. Tadinya, hal ini dilakukan oleh India. Ini semacam usulan para produsen di Indonesia supaya pemerintah melakukan negosiasi membawa isu ini.

Amerika juga memaksa supaya pemerintah Cina menaikkan nilai mata uangnya. Nah, masalah di negara nondemokratik dalam melakukan *automatic adjustment* terhadap pasar.

Di negara nondemokratik, proses *adjustment*-nya harus dipaksa.

Martin Manurung

Tapi bukankah itu terjadi karena Cina sedang menata impor, sama seperti Amerika. Namun, ada beberapa persoalan seperti yang dikatakan Bang Ivan tentang *loan* misalnya. Di Cina terjadi *surplus of fund*. Jadi, ketika dia kebanyakan duit maka perlu pengeluaran. Oleh karena itu, jika hal tersebut merupakan kompensasi dari negosiasi kita, maka akan terlalu *bloon* mengingat Cina memang perlu penempatan dana. Persoalannya kemudian mana yang lebih menarik?

Kedua, mengenai poin yang tadi disampaikan Bang Faisal mengenai *binding* ke pemerintah. Terus terang, saya sedang berada pada kondisi pesimistik terhadap apapun yang bisa dicapai pemerintahan sekarang. Alasannya, undang-undang itu kurang *binding* apa? Undang-undang apapun yang dibuat negara ini bukankah *binding*? Namun, itupun tidak dilaksanakan. Menurut saya, ini semua berkaitan dengan tanggung jawab

negara terhadap rakyatnya, dan negara tidak melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang dibilang Rieke tadi tentang sensus penduduk, menurut saya, merupakan jalan keluar palsu dari ketidaksiapan negara atau pemerintah dalam mempersiapkan sistem kependudukan yang saya katakan tadi, yang harus selesai pada tahun 2011. Kalau undang-undang yang *binding by constitution* saja tidak dilaksanakan terus apa lagi yang bisa diharapkan? Oleh karena itu, tidak ada poin lagi yang bisa dibuat dengan pemerintahan yang berkuasa? Saya sangat pesimistis mengenai hal tersebut.

Andito

Saya dari Serikat Pekerja Maritim Indonesia yang pekerjaannya hanya menunggui dan mengurus kontainer. Tadi, Pak Faisal bilang 130 dolar, jika tidak salah sekarang sudah berkurang. Setahu saya, sudah berkurang 44 dolar sehingga tinggal 84 dolar. Namun, 84 dolar itu saja merupakan dua kali lipat biaya di Hongkong karena di sana hanya 40 dolar. Namun, gaji pekerja di sana empat kalinya jika dibandingkan dengan gaji pekerja di Indonesia. Sebagai perbandingan, *budget*-nya dalam trayek itu paling kecil 7 juta. Kontainernya P-P dengan menggunakan lisensi Hongkong bisa mendapatkan 20 juta untuk trayek 3 bulan, lulusan SMA. Lulusan SMA trayek 3 bulan bisa mendapatkan gaji 20 juta per bulan. Dengan gaji sebesar itu, gaji orang-orang di Sudirman (karyawan yang bekerja di kawasan perkantoran Jl. Sudirman, red) tampaknya tidak akan sampai segitu.

Di Hongkong, nilai pertumbuhan, naiknya harga dolar, nilai P itu 1000, di konsumen bisa naik sepuluh kali. Jadi 1:10. Nah, yang kita lihat di P, Price, ketika PELINDO masih menguasai regulator, maaf, sebagai pelaksana regulator dengan 130 dolar mereka tidak mendapatkan laba. Tapi,

ketika asing masuk, misalnya, HPI masuk, langsung berubah drastis. Gaji karya-wan mengalami kenaikan sebesar 18%, yang kita lihat dari perspektif buruh adalah bahwa ini bukan masalah transportasi, tapi Indonesia yang terbiasa dengan koneksi dan monopoli, dan mungkin di-*setting* seperti itu. Akhirnya, kita menjadi tidak terbiasa berkompetisi dengan pihak luar. Mereka hanya jago kandang dan akhirnya tidak bisa mempromosikan apa-apa.

Masalah berikutnya adalah pengusaha selalu memainkan faktor eksternal. Dulu, tahun '97, mereka mem-PHK buruh, krisis tahun 2008 mereka juga melakukan PHK. Di sini, krisis dijadikan alasan untuk melakukan pemecatan. Padahal, dalam banyak kasus, para buruh yang telah di-PHK ditawarkan kontrak baru, *outsourcing*, dan itu terjadi. Jadi, kalau kita melihat Tanjung Priok sebagai barometer pelabuhan di Indonesia, maka 70% karyawan di pelabuhan itu *outsourcing*, yang digaji hanya 30% dari jumlah total buruh yang bekerja di sana. Inilah masalah buruh yang sekarang kita hadapi.

Dalam perspektif buruh, pemerintah sudah jelas dalam perjanjian, masalah *free trade* ini sudah sejak dulu. Pada masa Pak Harto, sudah ada AFTA. Oleh karena itu, teman-teman di bawah mempunyai pandangan bahwa, "Oke, ini masalah naga dengan macan, siapapun yang menang nasib buruh tetap tidak berubah". Tapi, bahwa nanti pengusaha Indonesia bangkrut, maka, bagi kita, bisa membuat sejarah lain. Buruh bisa membuat kontrak sosial baru dengan *policy* baru. Ini karena pada kenyataannya, berbicara mengenai jaminan sosial ujung-ujungnya adalah masalah asuransi. Persoalannya Jamsostek tidak mempunyai kualifikasi yang jelas. Saat ini, jumlah dana yang dimiliki konon katanya 12 trilyun. Artinya, dalam menyikapi ACFTA, kita akan

melihat banyak faktor. Dalam pemahaman kami, ini masalah naga dengan macan. Nah, siapa pemenangnya baru nanti berurusan dengan kita.

Nur Iman Subono

Kalau kita mau jujur, maka seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Faisal bahwa ini merupakan kegagalan jika teman-teman mengaku sosdem karena kita belum berhasil membangun kesadaran buruh untuk mengidentifikasi dimana area pertempurannya. Kalau naga dengan macan sedang berperang maka seharusnya kaum buruh melakukan *positioning*. Kaum buruh mestinya tidak terjebak ke dalam cara pandang yang menempatkan Cina atau yang di luar sebagai *common enemy*. Mestinya, bukan *common enemy*, tapi sebenarnya *laveraging* ini justru bisa digunakan untuk meningkatkan *bargaining* buruh karena sebetulnya ada momentum dimana pengusaha-pengusaha nasional ada dalam posisi depresif, yang selama ini dianggap mengeksploitasi buruh. Jadi, strategi gerakan buruh tidak bisa lagi memakai strategi konvensional yang berbasis pada buruh itu sendiri. Jumlah buruh dengan merujuk pada deindustrialisasi sebagaimana tadi telah disampaikan membuat jumlah buruh mestinya semakin berkurang. Untuk itu, kita perlu mengembangkan beberapa model, misalnya, gerakan buruh yang berbasis pada komunitas, yakni di lingkungan dimana buruh dan keluarganya tinggal.

Di sini, basis gerakan bisa buruh lepas, *outsourcing*, ataupun buruh organik. Kesemuanya bisa menjadi bagian dari kekuatan gerakan buruh secara menyeluruh. Memang, repotnya dari yang digambarkan secara jelas oleh Mas Faisal, sektor-sektor dimana modal dapat bergerak dengan mudah dan cepat, kekuatan buruh biasanya semakin lemah. Ini karena internasionalisasi modal akan selalu berpikir untuk pergi ke tempat-tem-

pat yang menghasilkan keuntungan tertinggi. Di lembaga-lembaga yang tidak mungkin pindah, misalnya, rumah sakit atau universitas serikat buruhnya pasti kuat. Namun, sektor-sektor yang digambarkan Mas Faisal tadi memang makin lama makin lemah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau tetap konsisten dengan basis sosdem dengan buruh sebagai basisnya atau mungkin teorinya yang harus diubah?

Saya rasa Tony Blair pernah melakukan itu. Menurut saya, dia menang bukan karena Partai Buruhnya melakukan hal yang spektakuler, tapi, dalam beberapa cara, Blair mengambil cara partai konservatif. Makanya, dia dibilang murid terbaiknya Margareth Thatcher. Saya kira itu bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk memperluas basis buruh sebagai elemen penting gerakan sosdem. Jika tidak, maka deindustrialisasi semakin membuat jumlah buruh berkurang. Beberapa elemen buruh telah membuat basis komunitas sebagai sumber gerakan dan tidak lagi berbasis pabrik. Selain itu, perlu aliansi berbagai sektor seperti buruh garmen, metal, dan lain sebagainya mengingat kita tidak lagi bisa bergantung pada perusahaan-perusahaan sebagaimana tadi telah disampaikan.

Amir Effendi Siregar

Kalau boleh saya menambahkan, apakah bisa diidentifikasi industri dari sektor-sektor mana saja yang bangkrut, *survive* dan sedang tumbuh (*growing*)? Artinya, kalau itu teridentifikasi maka kita bisa mengaitkannya dengan *free trade*. Menurut pikiran saya, jika hal tersebut bisa diidentifikasi, maka akan jauh lebih bagus. Pertanyaan kedua, menurut saya, sosdem tidak anti pengusaha, tetapi perilaku industrinya yang harus diperbaiki. Barangkali, ini bisa dijadikan suatu momentum untuk bisa melakukan *bargaining* bukan membiarkan dia

kalah.

Taryadi

Saya mau melihatnya dengan bergeser sedikit, dari kota kita melihatnya ke kampung. Kita merupakan negara agraris yang juga sedang mencoba industrialisasi. Barangkali, yang tepat bukan mencoba, tapi meramunya dengan industrialisasi. Jika kita melihat ke kampung, maka sudah beberapa tahun mungkin sejak tahun '93 sudah terjadi perebutan sumber daya alam antara orang kota dan orang kampung. Nah, saya khawatir justru dengan data-data yang disampaikan Bang Faisal tadi, penurunan industri akan membawa dampak luar biasa terhadap perebutan tersebut. Orang-orang kota akan bergeser ke kampung dan akan terjadi perebutan sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi pemicu konflik dan mungkin ini akan menjadi konflik sosial. Menurut saya, peluangnya semakin besar.

Dengan Cina yang sangat besar sekali, baik ada ACFTA maupun tidak pengaruhnya akan sangat besar. Saya dari Riau, banyak produk Cina yang tidak terdaftar di BPOM Riau, dan itu banyak sekali. Barang-barang tersebut beredar di pasar-pasar di Kepulauan Riau dan di tempat-tempat lain. Dengan demikian, dalam pemahaman saya, ACFTA akan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan orang kota yang akhirnya akan bergeser ke arah perdesaan atau perkampungan sehingga akan terjadi pertarungan diantara kita sendiri, antara orang kota dengan orang kampung, terutama pelaku-pelaku industri yang selama ini dimanjakan dengan korupsi, proteksi dan lain-lain. Dalam kaitan ini, akan terjadi peningkatan tingkat pengurusan sumber daya alam yang ada di kampung sebagai akibat ketidakmampuannya bersaing di kota. Para pelaku industri yang kalah ini pergi ke kampung dan mengambil

apa yang ada di kampung dengan mudah melalui korupsi, kolusi dan lain-lain. Itu yang sebenarnya menjadi persoalan. Nah, dampaknya pada masyarakat-masyarakat adat atau lokal yang selama ini nyaman dengan kehidupannya dan mereka harus bersaing dengan orang kota yang punya modal, ilmu pengetahuan dan lain-lain, dapat kita bayangkan. Itu pandangan saya dalam melihat ACFTA.

Amir Effendi Siregar

Saya ingin menambahkan sedikit lagi. Saya melihat pada tingkatan sosial demokrat di tingkatan regional juga melaksanakan pertemuan sosial demokrat. Menurut saya, ini juga momentum dimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perilaku usaha agar tingkah laku dan perbu-



tan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip sosdem.

Willy Aditya

Melanjutkan *statement* yang terakhir, tentang *regional social democrat*. Mengenai proteksi negara, saya takut kita akan terjebak ke dalam pandangan yang bersifat chauvinis. Pertanyaan saya adalah apakah kita tidak bisa bicara sosial demokrat tidak hanya dalam tataran proteksi negara, tapi demokrasi sosial dalam perspektif regionalism. Apakah kira-kira bisa seperti itu? Dalam pemahaman saya, walaupun dilandasi oleh integrasi bisnis atau ekonomi, toh belum dikerangkakan sebagai sebuah *union* seperti Uni Eropa meskipun ASEAN beberapa kali menempuh usaha ke arah itu.

Di sini, saya ingin mempertegas pertanyaan saya bahwa apakah ada perspektif sosial demokrasi yang diletakkan dalam kerangka regionalism sehingga ia tidak hanya berbicara *self protection*, tapi juga tanggung jawab regional itu sendiri. Dalam pemahaman saya, kalau rakyat bisa membeli barang murah maka apakah itu tidak menyejahterakan rakyat? Ini penting agar kita tidak terjebak. Di Tanjung Priok, misalnya, pada satu sisi berteori pro rakyat, nasionalisme, tetapi pada sisi yang lain mereka menjual beras murah dari Thailand. Lantas, bagaimana kita mengkategorisasikan praktik-praktik semacam itu? Mungkin, Pak Erwin bisa bercerita bagaimana EU, dalam tataran sosial demokrat, apakah ada proteksi-proteksi atau jaminan-jaminan yang

diberikan oleh Uni Eropa yang diberikan kepada masyarakatnya dan tidak hanya berbicara pada sekat-sekat sempit negara.

J. Andrianto

Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan, maka hal tersebut sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi pendapatan dan pengeluaran. Kalau yang ditekan atau difokuskan itu adalah harga, maka kita melihatnya dari sisi pembelian. Ketika perdagangan bebas diimplementasikan, maka tidak akan ada proteksi. Sektor industri akan terintegrasi. Akibat buruknya, industri bisa menurun dan ketika industri menurun, maka menurunkan pula pendapatan. Ini berarti tidak ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau dikaitkan dengan



ACFTA secara keseluruhan, maka, secara pribadi, menurut saya, ini bisa menjadi momentum untuk mengubah ancaman menjadi peluang.

Selama ini, pengusaha-pengusaha kita sudah menikmati proteksi-proteksi yang ada. Liberalisasi yang bagi sebagian memberi ancaman, tapi di sisi lain memberi dampak positif. Liberalisasi sektor telekomunikasi pada tahun '99, misalnya, banyak sekali pihak-pihak yang menentang, tapi setelah liberalisasi telekomunikasi dilakukan kita menikmatinya. Bahkan, sampai saat ini, kita menikmati tarifnya walaupun sebagian perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki asing. Namun, menurut saya, itu hal lain. Dalam konteks ini, masyarakat menikmati hasil liberalisasi telekomunikasi. Itu yang pertama. Kedua, liberalisasi di sektor migas. Awalnya, banyak sekali yang mengkritik. Bahkan, beberapa waktu yang lalu, saya membuat perhitungan dimana Indonesia sangat dirugikan akibat liberalisasi migas karena pendapatan yang diperoleh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketika Pertamina masih menguasai sektor hulu. Tapi, liberalisasi sektor migas menguntungkan masyarakat. Pom bensin sekarang bisa lebih bagus, ukuran-ukurannya lebih pasti, tepat.

Sebelumnya, ukuran dapat dimanipulasi sehingga masyarakat tidak mendapatkan ukuran pasti terhadap apa yang dibelinya. Selanjutnya, kalau dikaitkan dengan apa yang tadi dikatakan Pak Amir, maka sebetulnya kemarin kita mempunyai perhitungan. Ada kurang sepuluh sektor yang ada dalam ACFTA, dan dari jumlah tersebut ada dua sektor yang sebenarnya kita bisa unggul. Dua sektor itu adalah tambang dan otomotif, sedangkan delapan sektor lainnya kita terancam. Dua sektor ini bisa kita kembangkan lebih lanjut.

Untuk sektor otomotif, kita mempunyai daya saing cukup besar.



TOYOTA dan DAIHATSU mengerjakannya di sini dan bisa kita ekspor. Selanjutnya, kalau dikaitkan dengan peluang, maka peluang tersebut cukup bagus. Artinya, ancaman-ancaman inilah yang akan kita ubah menjadi peluang, memakai pola pikir pebisnis, pikiran pebisnis. Bukankah demikian? Ancaman-ancaman yang ada tidak semata-mata dipandang sebagai ancaman yang harus dihindari atau mengurangi aktivitas kita, tapi justru ancaman itu yang harus kita ubah menjadi suatu peluang. Itu bisa dilakukan dengan apa yang telah dikatakan Pak Faisal Basri tadi bahwa pemerintah harus melakukan A,B,C dan seterusnya.

Faisal Basri

Menjawab pertanyaan Bang Amir sektor mana saja yang kompetitif dan mana yang tidak? Pertama, sektor yang padat karya. Di Menteng, ada 10.000 batik. Namun, itu bisa dari Cina bisa dari Solo. Batik dari Cina adalah batik *printing*. Kedua, sektor-sektor yang tidak sensitif terhadap ongkos transportasi, misalnya, *hospital product*. Semen agak berat karena

biaya ongkos angkutnya tinggi. Ketiga, sektor konstruksi. Misalnya, perumahan. Namun, bila rumah sakit dan kampus konsumennya bisa kabur dari Indonesia. Jadi, kalau rumah sakit pelayanannya tidak beres, maka orang Indonesia bisa berobatnya ke luar negeri. Sebaliknya, kalau konstruksi tidak karena perancangannya ada di Indonesia.

Nah, coba bayangkan teman-teman, dalam setahun, 7 trilyun rupiah dihabiskan orang Indonesia untuk berobat ke Singapura. Kemudian, tekstil dibagi dua, yang susah kita *commit* dengan tekstil yang berbasis katun karena katunnya diimport dari Cina, tetapi kalau yang berbahan poliester kita mempunyai keunggulan. Memang, salah satu dimensi *free trade area* ini adalah kita harus semakin memilih apa yang betul-betul unggul. Ini karena tidak semua negara bisa unggul di semua sektor industri. Konsekuensinya, kita harus melakukan restrukturisasi dalam ekonomi. EU juga mempercepat proses agar negara-negara yang di bawah standar bisa segera distandarkan sehingga mampu menguatkan potensi yang mereka mi-

liki. Dalam kaitan ini, ada *structural adjustment fund* yang disediakan EU. Persoalannya adalah kita harus *survive* sendiri-sendiri.

Saya sepakat dengan Mas Boni tentang komunitas tadi. Namun, komunitas ini baru bisa mulai dijadikan basis setelah industri ini matang. Industri tetap tidak bisa kita tinggalkan karena industri manufaktur membangun kapasitas sistem jaminan sosial, sedangkan komunitas tidak. Jadi, dalam perspektif sosdem, secara keseluruhan, bagi saya, industri tetap penting. Komunitas memang harus kita mulai, tetapi industri tidak boleh kita abaikan. Terkait dengan pendapat tadi, saya setuju. Kita harus hati-hati karena omong kosong jika perusahaan tidak tahu, terlebih perusahaan besar. Perusahaan hanya mencari *justify* untuk melakukan PHK kepada buruh tanpa memberikan uang pesangon. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam menyikapi siapa bilang apa. Nah, kira-kira begitu.

Kemudian, tentang *regional social democrat*. Dalam kasus ini, yang paling penting dalam sosdem adalah *solidarity*. Jadi, misalnya, atas nama sosial demokrasi, kita harus mendorong, katakanlah, import dari Cina. Selanjutnya, Cina dengan *loan* yang kita gunakan untuk membangun jembatan Suramadu. Dalam kaitan ini, kita berhak dan harus mendorong buruh-buruh Cina yang di sini untuk memperoleh fasilitas yang memadai sesuai dengan standart karena kita tidak mempedulikan ras, suku bangsa. Itulah sosial demokrasi. Jadi, standart harus berlaku untuk semua. Apa yang kita dapat harus kita berikan juga.

Kalau kita melihat buruh-buruh yang ada di daerah itu satu kamar 4 X 5 bisa 10 orang. Di sini, kita bisa membuat standart sesuai sosial demokrasi. Kita bisa melindungi buruh Cina juga dari perlakuan-perlakuan di bawah standart. *Automatically*, hal ini akan mendorong berlakunya nilai-nilai so-

sial demokrasi di lapangan. Sementara di sisi lain, kita juga bisa mengangkat derajat orang-orang kita juga.

Erwin Schweisshelm

Mungkin saya bisa menambah sedikit tentang Uni Eropa. Saya kira yang pertama tentang gerakan sosdem, maksud saya gerakan sosial demokrat di Eropa. Gerakan sosial demokrat di wilayah tersebut paling tidak diawali dengan internasionalisme, akibat dari masa perang, terutama berbicara dari sudut pandang Jerman, sosial-demokrat di Jerman, tidak ada pilihan lain: menjadi internasionalis atau proteksionis. Ini karena sepertiga dari pekerjaan di Jerman tergantung pada ekspor sehingga kita tidak mempunyai pilihan lain. Kami tidak menemukan sosial demokrat di Jerman, yang tidak berbicara tentang proteksi karena hal itu sudah menjadi pandangan politik itu sendiri.

Berbicara tentang persatuan Eropa, saya kira sosdem telah benar-benar kehilangan kesempatan. Seperti yang Anda ketahui, penyatuan Eropa dimulai dari masyarakat ekonomi, sampai didirikannya pasar umum (*common market*). Langkah kedua, adalah komunitas politik. Pada awalnya, menghadapi banyak masalah, tapi akhirnya setelah kesepakatan Maachstricht diratifikasi oleh semua negara, dan kita sekarang mempunyai Ketua Komisi Eropa yang permanen, memiliki perwakilan internasional dan masing-masing Negara yang permanen sehingga, sekarang ini, kami memiliki beberapa bentuk pemerintahan politik dalam persatuan Eropa. Dengan demikian, setelah terbentuknya masyarakat ekonomi, terbentuk masyarakat politik.

Saat ini, kita memang mempunyai masalah besar dengan Yunani. Kita menyadari yang kita butuhkan saat ini adalah pengaturan ekonomi pemerintah. Bila tidak, maka kita tidak dapat bekerja lagi, dan itu akan berbahaya.

Kita mempunyai mata uang publik, tetapi jika kita tidak memiliki kebijakan ekonomi bersama, maka kita akan mengalami kesulitan. Jadi, saya pikir langkah berikutnya selain pasar umum, juga terutama perlunya kebijakan ekonomi. Ini karena kita memerlukan kebijakan yang baik, kebijakan mata uang dan sebagainya.

Namun, sosdem di Eropa telah benar-benar kehilangan jati dirinya untuk membangun masyarakat sosial. Ini karena dalam istilah pembangunan sosial kita berbicara tentang harmonisasi standar seperti yang disebutkan Bung Faisal, misalnya, tentang standarisasi sistem jaminan sosial. Sayangnya, hal ini sangat sedikit terjadi. Kami mempunyai beberapa standar tertentu untuk perlindungan, misalnya, cuti melahirkan, jaminan hari tua, perlindungan dasar pada umumnya, dan peraturan-peraturan lain yang melindungi jaminan mendapatkan pekerjaan dan jaminan kesehatan, yang umum juga untuk semua negara-negara Eropa agar kita memiliki standar dasar. Namun sayangnya, kita benar-benar tidak melihat adanya tujuan nyata Sosdem guna melengkapi masyarakat sosial atau masyarakat politik, masyarakat ekonomi atau komunitas sosial sehingga Eropa adalah salah satu komunitas sosial besar, yang juga harus dikembangkan atas dasar sosial dengan tahapan yang sama dan bukan yang berbeda.

Saya pikir berbicara masalah ASEAN sekarang ini, tentang ACFTA seperti yang disebut Bung Faisal, pada awalnya AFTA, perjanjian perdagangan bebas sejak awal sudah menjadi masalah karena itu juga akan berlanjut terus dan tak seorang pun yang benar-benar peduli. Namun, dalam berbagai fase dan di ASEAN tidak ada komunitas politik. Saya berpikir ini akan menjadi masalah besar bagi ASEAN di masa depan dan juga tidak ada yang bicara tentang komunitas

sosial. Jaminan sosial ASEAN Charta di dalam ASEAN Charta, jika Anda cek paling terdapat dua atau tiga poin dimana para pemimpin ASEAN menyebutkan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial, tetapi tidak ada yang menyebutkan tentang harmonisasi sosial, dan sepanjang yang saya ketahui, tidak ada perspektif standar di ASEAN. Saya rasa ini adalah masalah dampak berbeda, tahapan yang berbeda, berbagai perkembangan di ASEAN akan terus berlanjut dan walaupun ASEAN semakin diperbesar, apakah itu sebagai ASEAN plus tiga, atau plus lima akan tetap menjadi masalah yang lebih besar.

Masalah lain adalah karena tidak adanya kelompok Sosdem di ASEAN. Kita telah mencoba “bermain” di ASEAN dengan membentuk Jaringan Sosdem Asia, dan itu menjadi satu hal lain, tetapi paling tidak kita telah mencoba. Saya baru saja makan siang bersama Dr Surin, Sekjen ASEAN, atas undangan Duta Besar Jerman dan Sekretaris Duta Besar Jerman, dan memberitahukan kepadanya tentang rencana diskusi kita untuk membahas ACFTA. Maksud saya, dia adalah orang yang sangat baik, kita bisa membicarakan tentang banyak hal dengannya. Namun, ia benar-benar seorang neoliberal. Saya masih ingat ketika dia bicara di televisi di pertemuan di Davos, ketika itu puncak-puncaknya masa krisis, dia sama sekali tidak bicara, misalnya, tentang deregulasi perbankan dalam menangani krisis. Untuk mengatasi krisis, dia hanya berbicara tentang perdagangan bebas. Menurutnya, apa yang diperlukan ASEAN adalah perdagangan bebas, lebih banyak lagi perjanjian-perjanjian.

Amir Effendi Siregar

Saya mau menambahkan sedikit saja yang, menurut saya, menarik. Tadi, Faisal melontarkan pendapat bahwa Cina akan mengalami krisis

karena pemerintah otoritarian tidak *compatible* dengan *market system*. Namun, yang menarik, Cina melakukan perubahannya sistem ekonominya *step by step*. Ini fenomena yang menarik dari segi ekonomi. Pada awalnya, dalam konstitusinya, dia menyebutkan *our economic system is socialist*, sistem ekonomi yang mereka anut adalah sosialis. Amandemen kedua mereka menyebutkan bahwa *market economic is complementary to the socialist economic system*. Kemudian, mereka mengubahnya lagi menjadi *our economic system is socialist market economy*. Dengan demikian, Cina melakukan perubahan secara bertahap, satu persatu, *adjustment*-yang mereka melakukan *step by step*. Nah, menurut saya, yang menarik adalah, sebagai sebuah prediksi, memang ekonomi Cina bisa mengalami krisis karena tidak demokratis, tapi bisa juga sistem politiknya berubah menjadi demokratis karena *pressure*. Saya kira apa yang terjadi, dengan kondisi semacam ini, sangat berbeda dengan apa yang telah terjadi di Rusia. Mereka mengalami *shock*.

Pengalaman menarik lainnya adalah Amerika Latin. Negara-negara di Amerika Latin menggunakan sistem *civil right*-nya *democratic*, tetapi prinsip ekonominya sosialis. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Cina barangkali memang bisa saja terjadi krisis, tetapi kalau reformasinya dilakukan *step by step*, maka, menurut saya, akan menarik untuk dilihat. Dalam kaitan, Cina mungkin justru bisa menjadi semakin kuat.

Faisal Basri

Dalam kasus Cina, krisis yang saya maksudkan bukan krisis sosial seperti yang terjadi di Amerika, tetapi lebih karena dia tidak bisa *maintain* pertumbuhan secara terus-menerus. Cina, menurut saya, tidak akan mampu mempertahankan pertumbuhan sepuluh persen. Oleh karena itu, Cina

pasti akan mengalami suatu fase dimana akan terjadi penurunan. Sehalus-halusnya *adjustment* yang mereka lakukan, tapi tetap akan ada tekanan politik. Ini karena sistem politiknya tidak *visible*. Dalam sistem otoritarian, akan tetap kita temukan kondisi begitu. Setidaknya, apa yang terjadi di Venezuela dapat kita jadikan sebagai salah satu contoh yang menarik untuk mendukung hal ini. Karena tidak dimungkinkan adanya *adjustment* di pasar, akhirnya harga minyak anjlok, subsidi yang sebelumnya besar dan tidak menjadi masalah karena harga minyak tinggi, tapi sekarang Venezuela mengalami kesulitan setelah harga minyak turun. Venezuela tidak mampu melakukan apa-apa lagi, setidaknya jika dibandingkan ketika harga minyak tinggi seperti waktu-waktu sebelumnya. Jadi, dalam pemahaman saya, *adjustment* yang dilakukan dalam sistem otoritarian akan sulit ketika menghadapi tekanan-tekanan dalam sistem pasar. Jadi, akan ada *adjustment* yang sifatnya pahit.

Amir Effendi Siregar

Namun, mungkin saja *market pressure* mampu mengubah sistem politiknya yang otoritarian. Jadi, ada dinamika-dinamika internal sehingga yang kemudian terjadi Cina justru semakin kuat.

Timboel Siregar

Waktu saya ke Beijing, ke kantornya partai komunis di Cina, partai komunis di Cina anggotanya sudah mencapai 90 juta, dihitung dari yang mengambil KTA (Kartu Tanda Anggota, *red.*). Tentunya, hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan di Indonesia dimana tidak ada satu pun partai di sini yang mempunyai KTA sebanyak itu. Di Cina, yang punya KTA sudah mencapai 90 juta. Bayangkan saja, jika satu orang menyumbang satu dolar, maka akan terkumpul setidaknya 90 juta dolar. Oleh

karena itu, kita bisa membayangkan betapa banyaknya uang Partai Komunis, bisa dijadikan modal. Golkar bahkan menurut saya belum ada satu juta yang punya kartu anggota. PDI Perjuangan belum ada lima ratus ribu yang punya kartu anggota sehingga jika kita bandingkan dengan Cina masih sangat jauh.

Martin Manurung

Kalau menurut saya, sistem pasar pada hakekatnya krisis. *Eventually, came to crisis* tanpa harus melihat sistem demokrasi atau bukan. Nah, menurut saya, persoalannya di *governance*. Krisis di Amerika sebenarnya, menurut saya, merupakan sesuatu yang bersifat alamiah karena memang akumulasi kapitalnya luar biasa. Kegagalan Amerika adalah masalah *governance*. Padahal, Amerika merupakan negara demokrasi.

Cina, menurut saya, apakah akan mengalami krisis atau tidak dan seberapa besar *magnitude*-nya maka akan sangat ditentukan oleh *governance*-nya juga. Selama Cina mempunyai *governance* yang baik, dan ini tidak berarti harus demokratis, maka mungkin krisis tidak akan terjadi. Singapura, misalnya, sistem politiknya tidak demokratis, tetapi ia mempunyai *governance* yang baik. Sementara Jerman, misalnya, *governance*-nya baik sekaligus demokratis. Jadi, menurut saya, persoalannya bukan apakah sistemnya demokratis atau tidak, tetapi lebih pada masalah tata kelola pemerintahan yang baik. Jika tata kelolanya baik, maka ia akan bisa mengelola potensi krisis yang selalu terjadi dalam sistem pasar atau saya lebih senang menyebutnya dengan sistem kapitalis.

Faisal Basri

Ini menarik. Di Singapura, tidak ada yang mengoreksi tindakan Temasek ketika mereka menginvestasikan sebagian besar dananya di *Bank*

of Center. Parlemennya tidak bisa melakukan koreksi. Oleh karena itu, ketika Temasek mau membeli maka beli saja dan tidak ada yang mengontrol. Akibatnya, ketika terjadi krisis maka Singapura lebih parah daripada Indonesia. Padahal, di kita, 6,7 trilyun sudah diteriaki banyak orang.

Cina, *governance*-nya bagus, tapi ada kekuatan politik di sana. Sekarang, bank terbesar di dunia adalah Construction Bank di Cina yang pekerjaannya adalah memberikan kredit ke property, dan ini jumlahnya tidak terbatas (*unlimited*). Tidak ada koreksi. Kepentingan partai politik, Politburo, untuk mendapatkan dukungan dalam elektorasinya nanti dalam Partai Komunis di basis-basis yang membutuhkan itu maka dia gunakan kekuatan tersebut untuk *landing*. Maka, terjadi *bubble housing*-nya, dimana-mana krisis dimulai dari *housing* karena akan menimbulkan banyak akibat. Jadi, bagi saya, democratic dan nondemocratic bedanya apa? Respon yang menghadapi krisis yang berbeda-beda dan saya setuju dengan Bang Amir, *the most superior one* adalah democratic dan *market system*. Terbukti dalam sejarah dan tujuan.

Martin Manurung

Lalu, bagaimana dengan Amerika Serikat? Ia demokratis, tetapi juga mengalami krisis.

Faisal Basri

Nah, di Amerika ada suatu keyakinan, di era Clinton, bahwa pasar akan menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, di Amerika, krisis terjadi bukan karena lemahnya *governance*, tetapi sebagai akibat liberalisasi di sektor keuangan yang tidak lagi memisahkan *investment bank* dan *commercial bank* dimana hal tersebut didukung oleh parlemen sehingga mengakibatkan kebablasan bebas.

Martin Manurung

Dari sisi sensitivitas barangkali betul, sistem demokrasi akan lebih baik. Namun, poinnya sebenarnya sejauh mana efektivitas *government* dalam melakukan *governance*. Ini karena di pasar pada dasarnya mengandung krisis setiap saat.

Amir Effendi Siregar

Jadi, *role of the state*-nya kuat meskipun harus tetap dalam sistem demokratik

Martin Manurung

Betul, dan itu melibatkan peran negara.

Ridaya Loodengkow

Kita tahu bahwa Cina saat ini atau mungkin sudah sejak lama saya kira, peran panjang mereka bersama Amerika salah satunya adalah soal nilai tukar. Bertahun-tahun dia percaya diri untuk mengikat Yuan pada nilai tertentu bukan bebas seperti kita. Saya ingat pada saat tahun '97, saat krisis, salah satunya dipicu oleh nilai tukar. Kemudian, dampaknya begitu luas. Nah, saya ingat bahwa Cina selalu mengatakan mereka mempunyai daya tahan yang kuat untuk mempertahankan nilai Yuan yang dipatok oleh pemerintah bukan ditentukan oleh pasar. Dalam bayangan saya, kalau, misalnya, karena kompetisinya dibuka, tadinya *front*-nya antara Cina dengan Amerika, Cina dengan Eropa, sekarang *front*-nya Cina dengan Asia Tenggara, yang ditinjau dari besaran *market*-nya *comparable* dengan Eropa dan Amerika. Yang ingin saya tanyakan kira-kira adalah apakah masih ada peluang untuk memaksa Cina meskipun mungkin tidak sama sekali agar Yuan dilonggarkan begitu?

Ivan A. Hadar

Berdebat tentang Cina mungkin pertanyaannya akan berlanjut kepada pengaruhnya dalam bentuk fisik atau

nonfisik kepada kita? Untuk Indonesia, kira-kira ada pengaruh tidak?

Faisal Basri

Penetrasi Malaysia ke Cina lebih besar tergantungnya pada Cina dibandingkan dengan kita. Tadi, kita sudah lihat bahwa ekspor Indonesia ke Cina naik. Nah, negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara penetrasi ke Cina jauh lebih besar.

Ridaya Loodengkow

Pertanyaan saya tadi nilai kompetitif Cina yang kita takutkan tadi bukankah berasal dari nilai Yuan yang dipatok. Kalau, misalnya, Yuan dibebaskan sedikit saja, maka barangkali nilai kompetitif Cina tidak sebesar yang kita takutkan. Saya baru saja membaca buku Robert Bryler yang mengatakan bahwa krisis itu dipicu oleh *the logic of capital accumulation*. Bagi kita, yang telah menjadi jargon, bahwa kapitalis pasti krisis. Namun, *how crisis come*, dalam pemahaman saya, penjelasan Bryler yang paling baru. Jika tingkat akumulasi kapitalnya berlebihan dibandingkan dengan kapasitas yang ia miliki, maka krisis akan muncul.

Faisal Basri

Persoalannya kita belum tahu berapa persen kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita mainkan dari mata uang. Nah, daya saing Cina itu, dugaan saya, bukan hanya dari mata uangnya yang dia kontrol, bukan dari mata uangnya. Jika ia mematok mata uangnya ke level sekian, maka seharusnya ia mengalami penurunan terus. Oleh karena itu, pasti ada faktor lain yang bisa menjelaskan hal tersebut.

Nur Iman Subono

Saya hanya mau mengingatkan, karena ini pertemuan orang-orang sosdem, tadi kita bicara tentang *market, state and regional*. Sebetulnya, ada elemen lain yang seperti disebutkan

Saya tidak mengatakan bahwa pasar dan negara tidak penting, tapi kita juga membutuhkan penyeimbang.

oleh Mas Faisal, yakni *labour*. Saya sendiri mengusulkan *boarding race*, misalnya, di beberapa Negara Amerika Latin mereka bicara *social movement* untuk mengimbangi fakta dan negara. Saya kira perlu bagi kita agar jangan sampai terjebak dalam gelanggang perdebatan *market and state*. Kita juga perlu melihat apa yang menjadi basis sosial democrat dari agen yang berperan. Tadi, sudah disampaikan bahwa diantara para “raja” yang bertarung sebenarnya *labour* jangan masuk ke dalam medan pertarungan terlebih dahulu untuk meningkatkan *leverage*.

Mungkin, kita harus membuat matrik karena perdebatan yang tadi diungkapkan Martin menarik. Sebenarnya, perdebatan demokrasi dan nondemokrasi dalam kerangka kelembagaan. Jika saya membuat matrik sebelah kiri itu *force of power*, matrik yang atas institusional, itu *political party*, mereka bicara kekuasaan, tapi kalau kita bicara tentang *force of influence* dan dalam kerangka institusional biasanya *interest group*. Apakah HIPMI misalnya? Teman-teman di Amerika Latin sebetulnya mengatakan bahwa mereka tidak anti demokrasi institusional ini. Namun, mereka memasukkan yang noninstitusional *force of influence, social movement*. Ini yang sering disalahartikan dan menjadi ketakutan bagi Amerika dan kelompok pebisnis. *Social movement* yang terbentuk, dalam matrik,

saya sebut sebagai *force of influence* yang seolah-olah mengambil pola gerakan gerilyawan, marxis bersenjata, yang anti. Nah, mereka tidak, mereka tidak anti demokrasi. Mereka hanya mengatakan bahwa demokrasi institusional tidak cukup sehingga perlu *democratization democratic*, sistem demokrasi yang lebih substansial, yang lebih melibatkan mereka. Makanya, *social movement* di Ecuador ataupun Bolivia, yang kemudian sampai titik tertentu bertransformasi menjadi partai dan menang.

Orang seperti Morales dan Rafael Correa, misalnya, sering dikritik karena partainya berbasis etnis dan tidak *compatible* dengan demokrasi. Dalam konteks ini, mereka membuktikan bahwa mereka tidak anti demokrasi, tapi justru sebaliknya memberikan kontribusi. Memang, dalam perkembangannya, kelompok mereka banyak beraliansi dengan kelompok kiri. Kelompok kiri konvensional yang hanya berbasis kelas dan mengandalkan buruh akhirnya sadar akan kekeliruan tersebut. Saya kira, inilah yang menyebabkan, dalam referendum kedua, Morales menang. Meskipun penjelasan Mas Faisal tadi sangat menarik. Chaves mulai ditinggalkan karena dia menjadi otoriter. Kemudian, dia bermimpi referendum untuk mengubah undang-undang. Kelas menengah yang dulu dirugikan karena sistem neolib, yang kemudian bergabung dengan *social movement* mulai mempertanyakan maksud Chaves. Saya lihat di *youtube* sumpah mati tentaranya tidak hanya kepada negara tapi juga pada Chaves. Hormat seperti Soekarno dulu. Itu yang membuat saya khawatir karena sistem pemilu di negara-negara Amerika Latin hanya boleh sekali. Biasanya enam tahun. Godaan untuk orang-orang seperti Chaves, merasa tugas sucinya belum selesai, tidak cukup jika hanya enam tahun. Lula juga berfikir begitu. Akibatnya, *social movement* yang

menjadi basis mereka mengalami krisis dan membuat mereka membangun kekuatan sendiri.

Menurut saya, elemen tersebut yang sebenarnya harus digarap oleh sosdem. Kita jangan terjebak kedalam dua langgam besar ini. Saya tidak mengatakan bahwa pasar dan negara tidak penting, tapi kita juga membutuhkan penyeimbang. Buruh harus hati-hati. Mereka sudah disiksa, tetapi *kok* tiba-tiba menjadi nasionalis dengan membela pengusaha yang menyalahkannya. Seharusnya, kita bisa melihat kasus di negara-negara Skandinavia. Saya tahu bahwa hal tersebut tidak bisa direplikasi, tapi setidaknya dapat dijadikan pelajaran.

Kelompok buruh dan pengusaha, ketika pasar bebas itu begitu luas, terpaksa harus membuat kesepakatan-kesepakatan, bukan berdasarkan *good will*, tapi karena secara structural dua-duanya akan rugi. Jadi, misalnya, buruh menunda kenaikan upahnya dengan perjanjian kalau pengusaha dapat untung dia akan membuka usaha untuk memasukkan buruh lain.

Saya setuju dengan Mas Faisal bahwa kita harus hati-hati jangan sampai terjebak dalam rasisme karena tenaga-tenaga Cina sudah mulai masuk. Buruh di Norwegia dan Swedia memaksa pemerintah untuk memberikan gaji sama kepada buruh-buruh asing sehingga pengusaha akan berfikir untuk mengambil buruh luar. Nah, menurut saya, solidaritas itulah yang menjadi basis sosdem. Isunya sekarang kalau kita ke Tanah Abang maka akan ada isu Tionghoa dalam negeri dan Tionghoa Daratan (Cina Daratan, Tiongkok, red) sudah seperti musuh. Bahkan, ada yang bilang, “Ada beberapa gedung baru tuch, empat lantai untuk teman-teman kita Cina Daratan itu, jadi musuh kita”. Menurut saya, kita jangan terjebak ke dalam konflik rasis semacam itu. Ini karena sebenarnya mereka memiliki

persoalan yang sama. Oleh karena itu, saya ingin mengembalikan ke *concern* kita, terutama yang sosdem mania.

Amir Effendi Siregar

Apa yang dibidang Boni tadi menarik karena negara tidak melakukan peranannya. Itu tidak hanya di industri atau usaha, tetapi juga di “dunia lain”. Di media, dibiarkan saja. Undang-undangnya atau regulasi tidak dijalankan justru malah ada Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-undang sudah bagus, tetapi tidak dijalankan oleh regulatornya. Kita yang seharusnya membangun *diversity in content, ownership*, tetapi tidak dijalankan regulasinya. Nah, kita memerlukan *social movement* sehingga *society* mampu memperkuat dirinya untuk melakukan gerakan-gerakan. Untuk dunia media, sudah banyak muncul gerakan masyarakat sipil dan saya kira di bidang ekonomi gerakan-gerakan semacam itu dapat dilakukan.

Nur Iman Subono

Saya rasa masih jauh untuk menuju ke sana. Saya melihat ada dua hal yang berbeda. Kemarin, misalnya, saya bertemu dengan Budiman Sudjatmiko (Anggota Dewan dari Fraksi PDIP, red), saya bilang waktu itu, “Budiman jangan sampai lupa dengan basis sosdem dan kamu harus sadar

bahwa kamu minoritas di parlemen. Nah, hanya masalah waktu aja kamu akan kompromi”. Mungkin kita akan mengingatkan orang-orang semacam Lary dari Flores, sekarang di DPD, dia harus meyakinkan konstituennya bahwa di DPD dia tidak bisa berbuat banyak. Ini penting karena jika tidak, maka rakyat akan mempertanyakan. Dalam pikiran mereka, sudah di parlemen sehingga mestinya bisa berbuat banyak. Seperti kawan kita yang dari Bengkulu, kalau dia pulang ke Bengkulu, maka kerjanya dimaki-maki dan dia terima aja. Saya bilang, “Kamu harus ngomong, meyakinkan konstituen bahwa sebagai anggota DPD tidak bisa berbuat banyak. Dibanding orang pusat”. Ia juga pernah bilang bahwa tinggal di apartemen saja dipermasalahkan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, *social movement* harus menjadi lahan garapan kita untuk pendidikan politik.

Amir Effendi Siregar

Bukan hanya *social movement* sebenarnya, tapi juga konsolidasi masyarakat sipil.

Ivan A. Hadar

Banyak gerakan dan perdebatan yang perlu diperdalam juga. Banyak aspek yang juga menjadi tema sendiri seperti sistem jaminan sosial. Terima kasih sebesar-besarnya kepada yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi Negara ke depan. Saya berharap akan terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pimpinan Negara ini. Namun, meskipun hal tersebut belum terjadi, tetapi kita bisa lihat nanti DPR dan kelompok-kelompok muda, terutama kelompok ekonom yang hadir. Sekali lagi, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua.■

Kita memerlukan *social movement* sehingga *society* mampu memperkuat dirinya untuk melakukan gerakan-gerakan.



Resume diskusi edisi kedelapan Jurnal Sosial Demokrasi

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA: APA YANG SEHARUSNYA DIKERJAKAN?

Pendahuluan

Indonesia telah masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas Asean-Cina (ACFTA) yang mulai diberlakukan Januari 2010. Namun, terdapat banyak celah yang membuat posisi industri dan tenaga kerja Indonesia rentan jika perjanjian tersebut benar-benar diimplementasikan. Sebelum perjanjian ACFTA diimplementasikan saja, banyak industri dalam negeri gulung tikar dan bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Faisal Basri, telah terjadi deindustrialisasi yang ditandai oleh, salah satunya, pertumbuhan konsumsi listrik industri yang negatif dan industri-industri baru yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industri yang bangkrut atau keluar. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh moderator, Ivan A. Hadar dalam pengantar diskusi, bahwa Indonesia memang suka menandatangani perjanjian-perjanjian tanpa melihat isinya dengan jelas.

Dalam konteks ACFTA, Indonesia memang tidak melakukan persiapan-

persiapan yang seharusnya dilakukan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak berusaha memperkuat struktur ekonomi. Sebaliknya, yang terjadi justru deindustrialisasi sebagaimana disinyalir oleh Faisal Basri.

Pertanyaan yang dikemukakan oleh Ivan A. Hadar selaku moderator adalah apakah Indonesia harus melakukan negosiasi dalam beberapa bidang dengan Cina atau maju terus pantang mundur mengingat Indonesia adalah negara besar, pasar besar, dan mempunyai harga diri sehingga tidak mungkin lari dari kesepakatan yang sudah ditandatangani.

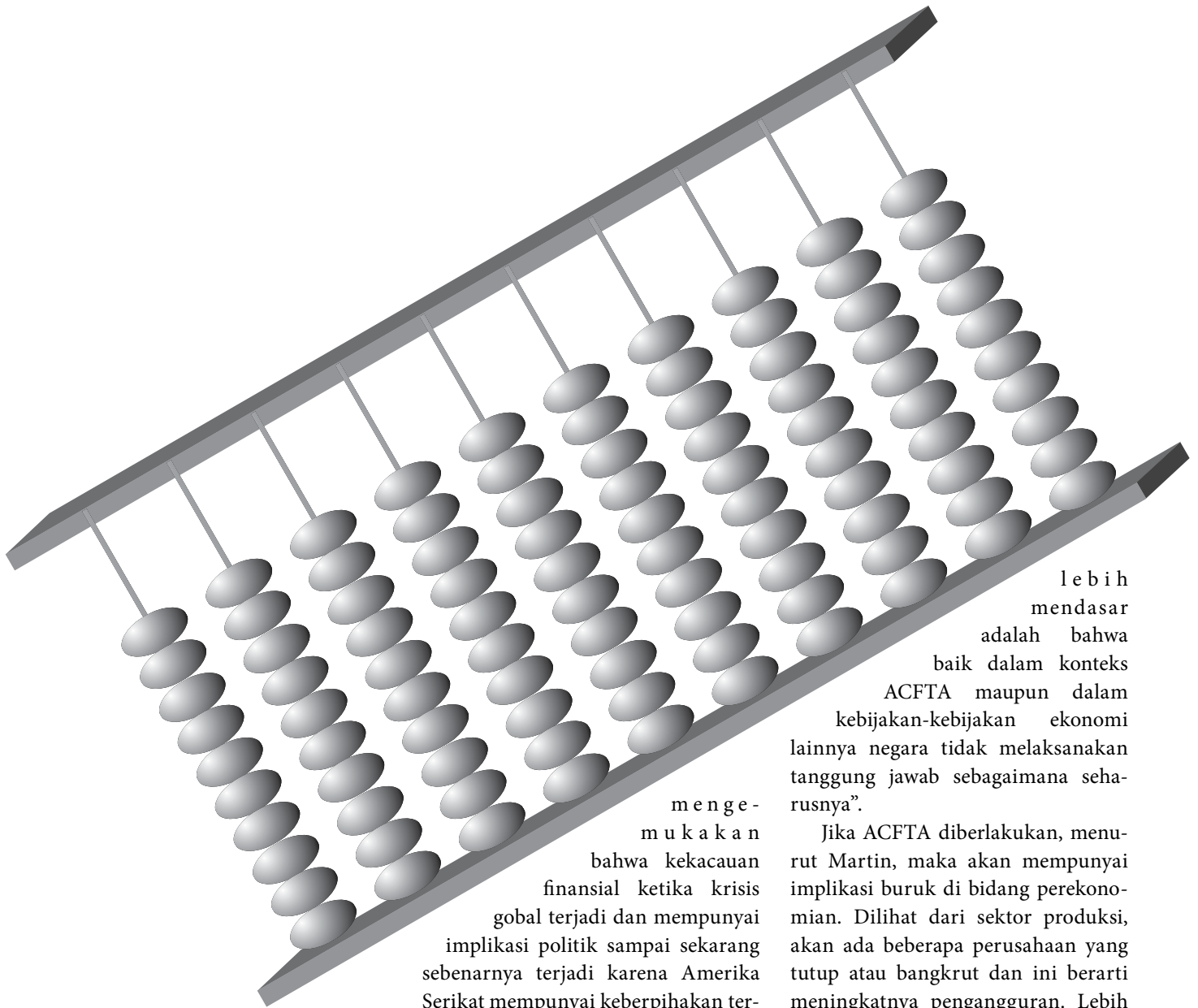
Berbagai Persoalan

Diskusi yang dihadiri oleh akademisi, praktisi, dan politisi tersebut, berhasil mengidentifikasi beberapa persoalan yang kini dihadapi oleh Indonesia, baik industrinya maupun kaum buruh sebagai akibat ACFTA diberlakukan. Selain itu, persoalan-persoalan internal (birokrasi) dan

pemerintahan yang tidak memiliki semacam *blue print* atau strategi yang jelas dalam menghadapi ACFTA.

Persoalan utama yang teridentifikasi selama diskusi dalam menyikapi ACFTA adalah negara atau, dalam hal ini, pemerintah tidak mempunyai keberpihakan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan oleh Martin Manurung, beberapa ekonom yang berasal dari *mahzab* sebelah kanan atau katakanlah neoliberal mempunyai keyakinan bahwa dilihat dari sisi *general equilibrium* maka Indonesia akan mendapatkan barang yang lebih murah dengan jumlah yang lebih banyak-konsumen akan mempunyai lebih banyak pilihan dan dengan kualitas yang bagus. Namun, menurut Martin, dalam sebuah negara, seharusnya, kita tidak hanya melihat dari sisi *welfare effect*-nya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana negara melindungi kelompok-kelompok atau anggota masyarakat yang kalah sebagai akibat diberlakukannya ACFTA.

Merujuk krisis di AS, Martin



m e n g e -
m u k a k a n
bahwa kekacauan
finansial ketika krisis
gobal terjadi dan mempunyai
implikasi politik sampai sekarang
sebenarnya terjadi karena Amerika
Serikat mempunyai keberpihakan ter-
hadap ekonomi domestiknya. Ketika
terjadi krisis likuiditas di dalam negeri
Amerika menarik likuiditas dari luar.
Negara, dalam konteks ini, mempunyai
keberpihakan yang jelas. Oleh karena
itu, menurut Martin, “Apa-kah ACFTA
bisa ditunda atau tidak bukanlah *the
basic question*. Menurut saya, hal yang

l e b i h
mendasar
adalah bahwa
baik dalam konteks
ACFTA maupun dalam
kebijakan-kebijakan ekonomi
lainnya negara tidak melaksanakan
tanggung jawab sebagaimana seha-
rusnya”.

Jika ACFTA diberlakukan, menu-
rut Martin, maka akan mempunyai
implikasi buruk di bidang perekono-
mian. Dilihat dari sektor produksi,
akan ada beberapa perusahaan yang
tutup atau bangkrut dan ini berarti
meningkatnya pengangguran. Lebih
lanjut, Rieke Diah Pitaloka menge-
mukakan, “Jika sebelum ada ACFTA
saja banyak perusahaan yang sudah
tutup, maka kondisinya sangat mung-
kin akan lebih parah ketika ACFTA
dilaksanakan. Itu berarti akan se-
makin banyak pengangguran”. Di
sisi lain, menurut Rieke, kebijakan

pemerintah juga tidak mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Industri sepatu di Bandung, misalnya, sebagaimana dicontohkan oleh Rieke, tidak mampu berkembang dan bersaing dengan produk impor karena karet mentahnya dijual ke luar negeri. Kemudian, industri sepatu dalam negeri harus membeli sol dari luar negeri yang harganya mahal sehingga produk yang dihasilkan mahal dan tidak mampu bersaing dengan produk-produk ekspor.

Persoalan kedua yang berkaitan erat dengan lemahnya keberpihakan negara terhadap kelompok yang kalah adalah ketiadaan jaring pengaman sosial. Seperti dikemukakan oleh Rieke, untuk meyambut diberlakukannya ACFTA, mestinya negara melakukan proteksi terhadap tenaga kerja. Ini merupakan proteksi utama yang mestinya dilakukan. Namun sayangnya, sebagaimana dikemukakan Rieke, undang-undang jaminan sosial nasional yang ditandatangani sebagai amanat pasal 28 bahwa setiap warga berhak mendapatkan jaminan sosial dan pasal 34 bahwa Negara wajib menyelenggarakan jaminan sosial, tetapi tidak diimplementasikan. Bahkan, hampir tidak digubris sama sekali. Pemerintah menargetkan tahun 2014 sehingga lebih dekat dengan kepentingan politis kampanye. Padahal, ACFTA sudah berjalan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Alexander Chandra dari Trade Knowledge Network. Menurutnya, adalah *nonsens* untuk melakukan negosiasi ulang dengan Cina berkenaan dengan ACFTA. Ini karena Cina telah mengeluarkan begitu banyak biaya untuk itu. Oleh karenanya, Alexander mengemukakan bahwa dalam proses implementasi perdagangan sebagaimana terjadi dalam ACFTA pasti akan memunculkan pihak yang kalah dan yang menang. Persoalannya, menurutnya, bagaimana pihak-pihak yang *vulnerable* ini bisa di-cover me-

lalui jaminan sosial. Lebih lanjut, ia mengatakan, “Kita bisa saja memang membahas regulasi sekarang dan mengatakan keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dalam, katakanlah, 10 atau 20 tahun kedepan. Namun, yang tidak pernah dibahas adalah bagaimana industri beroperasi ketika merespon dalam waktu dekat pembentukan pasar yang akan terjadi?”. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan adalah adanya jaminan sosial.

Persoalan ketiga adalah lemahnya infrastruktur dan tingginya biaya transportasi. Faisal Basri mengemukakan bahwa dalam ACFTA Indonesia pasti kalah. Ini terjadi karena ekonomi nasional belum terintegrasi. Sebagaimana dikemukakan Faisal Basri, “Kalau kita mau ikut *free trade area*, maka mestinya ada proses pengintegrasian perekonomian kita dengan regional. Mengintegrasikan perekonomian kita dengan global. Syarat mutlaknya adalah “bilik” kita terintegrasi dulu”. Sayangnya, menurut Faisal Basri, ekonomi kita belum terintegrasi yang dibuktikan oleh adanya disparitas harga yang tinggi.

Disparitas ini muncul sebagai akibat tingginya biaya transportasi di Indonesia. Faisal Basri mencontohkan bagaimana ongkos angkut dari Gorontalo dan Lampung ke Jakarta lebih mahal daripada biaya angkut dari California ke Lampung. Oleh karena itu, menurutnya, kita lebih baik membeli jagung dari California daripada membeli jagung dari Lampung. Mahalnya ongkos transportasi ini membuat harga barang-barang dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang luar negeri. Sebagai contoh, jeruk medan di pasar pagi Brastagi harganya Rp.14.600, sedangkan jeruk Cina harganya Rp. 6.800,-. Jeruk medan mahal karena ongkos angkut dari Belawan ke Priuk mahal sekali sehingga mereka terpaksa melewati jalur darat. Padahal, jika

mereka melewati jalan darat, maka akan melewati 26 pos ibukota dan 14 jembatan. Menurut Faisal Basri, ini tidak hanya mengurangi kualitas jeruk, tetapi juga, yang tidak kalah pentingnya, harga jeruk menjadi lebih mahal.

Selain yang sudah disebutkan di atas, perilaku pengusaha juga menciptakan situasi yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Andito dari FS Maritim Indonesia “Masalah berikutnya adalah pengusaha selalu memainkan faktor eksternal”. Ia mencontohkan bahwa tahun '97 banyak perusahaan yang mem-PHK buruh, krisis tahun 2008 juga melakukan PHK. Di sini, krisis dijadikan alasan untuk melakukan pemecatan. Padahal, dalam banyak kasus, para buruh yang telah di-PHK ditawarkan kontrak baru, *outsourcing*. Tanjung Priok sebagai barometer pelabuhan di Indonesia 70% karyawannya *outsourcing*, yang digaji hanya 30% dari jumlah total buruh yang bekerja di sana.

Perusahaan-perusahaan nasional, dalam pandangan Alexander, mempunyai perilaku yang mengecewakan. Kesepakatan yang sudah ditandatangani delapan tahun lalu tersebut baru mendapatkan respon yang kuat di penghujung tahun atau ketika ACFTA benar-benar dilaksanakan. Hal senada juga dikemukakan oleh Faisal Basri. Menurutnya, “Kita harus hati-hati karena omong kosong jika perusahaan tidak tahu (perjanjian ACFTA, *red*), terlebih perusahaan besar. Perusahaan hanya mencari *justify* untuk melakukan PHK kepada buruh tanpa memberikan uang pesangon”.

Persoalan keempat adalah problem deindustrialisasi. Beberapa persoalan sebagaimana dikemukakan di atas memberikan sumbangan bagi munculnya gejala deindustrialisasi. Gejala ini, menurut Faisal Basri, ditandai oleh pertumbuhan industri baru yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan industri yang bangkrut atau



pindah ke luar negeri. Sebagaimana dikemukakan oleh Faisal Basri, “Yang lebih mengerikan lagi, jika kita dalam lebih jauh, maka industri baru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan industri yang keluar atau bangkrut sehingga jumlah pabrik terus mengalami penurunan setelah krisis meskipun menengahnya lebih besar”. Alokasi kredit sektor perbankan di sektor manufaktur juga merosot tajam. Pada 1985, hampir 40% kredit perbankan disalurkan ke sektor industri pengolahan. Pada 2008, industri manufaktur hanya memperoleh 16% kredit perbankan. Perbankan lebih tertarik pada pembiayaan konsumsi dan pembangunan properti. Ini berarti telah terjadi penurunan volume kredit perbankan berarti kelangkaan pembiayaan investasi dan modal kerja bagi sektor industri. Penurunan volume

kredit perbankan berarti kelangkaan pembiayaan investasi dan modal kerja bagi sektor industri. Dana yang tersedia tidak cukup untuk mendorong industrialisasi.

Konsumsi listrik untuk sektor industri juga mengalami penurunan. Dalam hal konsumsi listrik, seperti dijelaskan oleh Faisal Basri, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai kategori sosial, rumah tangga, bisnis, dan industri umum. Rata-rata konsumsi di semua kategori yang disebutkan mengalami kenaikan kecuali industri. Ini meyakinkan bahwa memang industri kita sedang tergopoh-gopoh. Bayangkan, rata-rata semuanya naik 7-8%, tetapi untuk sektor industri negatif hingga 9%. Kencenderungan ini, sekali lagi, menegaskan gejala deindustrialisasi. Jika hal ini terus berlangsung, maka akan

mengancam basis gerakan sosdem, yakni kaum buruh. Dalam kaitan ini, deindustrialisasi akan membuat jumlah buruh semakin sedikit dan dengan demikian juga jumlah kelas menengah sehingga tidak menguntungkan bagi gerakan sosial demokrasi.

Kemana Gerakan Buruh dan Sosdem Bermuara?

Bisa jadi, ACFTA mempunyai dampak yang buruk bagi buruh dalam negeri. Proses deindustrialisasi yang kini berlangsung dan mungkin akan semakin kencang ketika ACFTA diberlakukan akan membuat posisi buruh semakin rentan. Namun, di sisi lain, ACFTA juga membuka peluang. Buruh bisa saja membuat sejarah baru seandainya mampu membuat perjanjian-perjanjian baru dengan pengusaha. Seperti dikemukakan An-

dito, “Tapi, bahwa nanti pengusaha Indonesia bangkrut, maka, bagi kita, bisa membuat sejarah lain. Buruh bisa membuat kontrak sosial baru dengan *policy* baru”. Lebih jauh, dengan merujuk kasus di Skandinavia, Nur Iman Subono mengemukakan bahwa ketika pasar bebas itu begitu luas kelompok buruh dan pengusaha terpaksa membuat kesepakatan-kesepakatan baru yang bukan didasarkan pada *good will*, tapi karena secara struktural dua-duanya akan rugi. Dalam hal ini, buruh menunda kenaikan upahnya dengan perjanjian kalau pengusaha dapat untung dia akan membuka usaha untuk memasukkan buruh lain. Meskipun hal tersebut mungkin tidak dapat direplikasi di Indonesia, tapi setidaknya memberikan pelajaran yang berharga bagi gerakan buruh.

Kemudian, berkenaan dengan ACFTA dan buruh, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, menjadikan komunitas sebagai basis gerakan buruh. Proses deindustrialisasi akan membuat jumlah buruh semakin sedikit, dan jelas hal ini tidak menguntungkan bagi gerakan buruh. Oleh karena itu, menurut Nur Iman Subono, strategi gerakan buruh tidak bisa lagi memakai strategi konvensional yang berbasis pada buruh itu sendiri karena jumlah buruh sebagai akibat deindustrialisasi terus berkurang sehingga perlu dikembangkan beberapa model, misalnya, gerakan buruh yang berbasis pada komunitas. Lingkungan dimana buruh dan keluarganya tinggal.

Meskipun demikian, Faisal Basri mengingatkan bahwa komunitas baru bisa dijadikan basis gerakan setelah industri matang atau berkembang dengan baik. Oleh karena itu, deindustrialisasi sangat tidak menguntungkan bagi gerakan sosdem karena buruh yang menjadi basis akan terus mengalami pengurangan. Untuk itu, sebagaimana disarankan oleh Faisal Basri, industri tetap tidak bisa kita

tinggalkan karena ia mampu membangun jaminan sosial dimana hal ini tidak bisa dilakukan oleh komunitas.

Kedua, pentingnya *boarding race* dan tanggung jawab sosial regional. Proteksi negara, sebagaimana dikemukakan Willy Aditya, jangan sampai menjebak kita ke dalam pola pikir yang bersifat chauvinistik. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, perlu dibahas sosial demokrasi tidak hanya pada tataran proteksi negara, tetapi juga regionalism sehingga kita tidak hanya berbicara pada tataran *self protection*, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama dalam lingkup regional. Di sisi lain, adalah penting agar buruh mempunyai gerakan yang bersifat *boarding race*. Merujuk Amerika Latin, Nur Iman Subono mengemukakan bahwa gerakan buruh tidak seharusnya terjebak pada *state* dan *market*. Dalam hal ini, penting melihat basis sosial demokrat dari agen yang berperan sehingga *social movement* menjadi penting. Di Amerika Latin, sebagaimana dikemukakan Nur Iman Subono, *social movement* ini merupakan noninstitusional *force of influence* yang berusaha untuk membangun demokrasi yang lebih substansial. Gerakan sosial di Amerika Latin tidak anti demokrasi, tetapi lebih pada usaha membangun demokrasi yang lebih substansial. Demokrasi yang mampu mendorong keterlibatan secara lebih luas. Di sisi lain, gerakan sosial juga penting dalam rangka membangun masyarakat sipil agar mampu melakukan gerakan-gerakan.

Persoalan yang dihadapi ASEAN, seperti dikemukakan Erwin Schweishelm, adalah ketiadaan komunitas politik. Ketidadaan komunitas politik ini akan menjadi masalah pada masa yang akan datang. Masalah juga muncul karena tidak adanya pembicaraan mengenai komunitas sosial. Dalam kaitan ini, Erwin Schweishelm mengemukakan, “Jaminan sosial ASEAN Charta di dalam ASEAN Charta, jika

Anda cek paling terdapat dua atau tiga poin dimana para pemimpin ASEAN menyebutkan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial, tetapi tidak ada yang menyebutkan tentang harmonisasi sosial, dan sepanjang yang saya ketahui, tidak ada perspektif standar di ASEAN”. Oleh karena itu, apakah ASEAN akan terus diperbesar dengan plus tiga ataupun lima maka hal tersebut tetap akan menjadi masalah bagi ASEAN. Ketiadaan kelompok sosdem di ASEAN juga akan menjadi masalah bagi usaha-usaha pengembangan komunitas sosial di kawasan ASEAN.

Penutup

ACFTA telah diberlakukan mulai Januari 2010. Perjanjian ini telah ditandatangani sejak delapan tahun lalu, tetapi sayangnya pemerintah tidak melakukan berbagai persiapan dalam menyambut diberlakukannya perjanjian tersebut. Di sisi lain, ada banyak persoalan dalam negeri yang membuat Indonesia tidak kompetitif jika harus bersaing dengan Cina. Diantara persoalan yang ada adalah ketiadaan keberpihakan negara yang jelas, tidak dimplementasikannya undang-undang jaminan sosial, lemahnya infrastruktur dan tingginya biaya transportasi serta menguatnya gejala deindustrialisasi.

Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi buruh. Meskipun demikian, penting bagi buruh untuk tidak terjebak ke dalam gerakan atau pandangan yang bersifat chauvinistik. Sebaliknya, perlu bagi gerakan buruh untuk memperluas basis gerakan mereka melalui komunitas. Selain itu, penting dikembangkan *social movement* dan mestinya ini menjadi lahan garapan sosdem disamping terus mengembangkan tanggung jawab yang tidak lagi diletakkan dalam kerangka *self protection*, tetapi juga tanggung jawab sosial regional. ■



ACFTA: Memetakan Sektor Berpeluang dan Terancam¹

Oleh: Jati Andrianto², Aditya Perdana Putra³, dan Fadjar Adrianto⁴

Perjalanan globalisasi memang mengalami berbagai perkembangan yang tidak memberikan pola yang pasti. Pengandaian semua negara mendapatkan keuntungan yang setara dari hilangnya batas-batas teritorial negara dalam aktivitas ekonomi tidak berjalan secara sempurna. Berbekal realitas yang demikian ini, maka pelaksanaan globalisasi pun mengalami beberapa perubahan. Globalisasi yang menyatukan aktivitas ekonomi dunia menjadi terpolarisasi menjadi dua pola aktivitas ekonomi global, yakni (i) kelompok perdagangan yang dibentuk atas dasar kedekatan wilayah (integrasi regional); dan (ii) kelompok perdagangan yang dibentuk berdasarkan skala ekonomi tertentu (Andrianto, 2009:77).

Pola pertama itulah yang menjadi pijakan atas pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN

dan Cina (+Taiwan dan Hongkong) mulai 1 Januari 2010. Sungguh pun demikian, dampak langsung dari implementasi ini tidak seketika terjadi pada 1 Januari 2010. Diperkirakan imbas kesepakatan perdagangan bebas regional tersebut mulai riil terjadi pada April 2010. Bagi Indonesia, ancaman serius dari kesepakatan perdagangan ini datang dari Cina. Pondasi ekonomi makro Cina yang disokong oleh kebijakan moneter, terutama penetapan kurs Renimbi, yang sangat kokoh menjadikan Cina lebih superior dalam kesepakatan ini dibandingkan negara-negara lainnya.

Lebih dari segalanya, perdagangan bebas regional yang sampai sekarang ini telah terjadi memang memberikan gambaran bahwa tidak ada keadilan ekonomi setara yang diperoleh setiap negara peserta kesepakatan perdagangan bebas tersebut (Farrel, 2004).

Berpijak pada realitas yang demikian ini, sebenarnya dalam tataran debat akademik kesepakatan perdagangan bebas regional ini memang belum selesai. Walaupun perdebatan akademik belum selesai, namun secara umum telah terdapat konsep pasti akan integrasi regional ini. Polanya, setelah integrasi perdagangan, dilanjutkan dengan integrasi keuangan, integrasi moneter, dan integrasi politik (Eichengreen, 2006).

Neraca Keuntungan

Berdasarkan data *ASEAN Investment Fact Sheet 2009*, selama 2009 perputaran uang akibat aktivitas ekonomi Cina di ASEAN mencapai US\$ 200 miliar. Angka yang demikian ini memang wajar karena selama 2009 Cina merupakan negara terbesar ketiga di dunia dalam melakukan *trading partner*. Mempertimbangkan realitas

1 Sebagian dari artikel ini telah dimuat di Majalah Warta Ekonomi Edisi 03 Tahun XXII, 8 – 21 Februari 2010.

2 Jati Andrianto adalah *Head of Economics Analyst* Warta Ekonomi Intelligence Unit.

3 Aditya Perdana Putra adalah *Analisis Ekonomi* pada Warta Ekonomi Intelligence Unit.

4 Fadjar Adrianto adalah *Redaktur Pelaksana* Majalah Warta Ekonomi

ini dan implementasi kesepakatan perdagangan bebas regional tersebut, maka implementasi ini akan kian meningkatkan nilai perdagangan yang terjadi di kawasan ASEAN + Cina.

Selain itu, berdasarkan data yang ada, selama 2008 Cina telah melakukan investasi langsung (FDI) di ASEAN senilai US\$ 6,1 miliar. Sementara itu, ASEAN sendiri selama 2008 melakukan investasi ke Cina sebesar US\$ 5,6 miliar. Data ini memiliki arti bahwa kontribusi Cina di ASEAN lebih tinggi dibandingkan kontribusi yang diberikan ASEAN terhadap Cina. Lebih dari itu, data ini juga menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina yang paling tinggi di dunia bukan hanya memberikan manfaat sekaligus ditopang oleh perekonomian domestik tetapi juga memberikan kontribusi bagi perekonomian regional.

Sementara itu, dalam konteks perdagangan antara Cina dan Indonesia, pola yang terjadi di wilayah regional tidak sama dengan perdagangan bilateral ini. Dalam konteks neraca perdagangan misalnya, selama Januari - Oktober 2009, neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina mengalami defisit yang mencapai US\$ 2 miliar. Lebih lanjut, berdasarkan data BPS, struktur neraca perdagangan Indonesia ke Cina tersebut dikuasai oleh sektor manufaktur, yakni sebesar 80%. Sisanya diikuti dengan *mining* 16% dan *agriculture* 4%. Namun jika struktur ekspor tersebut dikuliti lebih lanjut, sebenarnya yang paling dominan itu adalah ekspor berbasis *natural resources*, yaitu mencapai sebesar 50,6%. Sedangkan, yang *non-natural resources* sebanyak 49,4%. Data yang demikian ini memang menggambarkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Cina memiliki nilai tambah yang rendah.

Lebih dari segalanya, jika nilai perdagangan akan meningkat secara drastis di wilayah regional, namun secara bilateral terus mengalami defisit, maka bisa dipastikan bahwa volume

perdagangan produk dalam negeri kurang kompetitif tatkala bersaing di Cina. Selain itu, jika struktur makro ekonominya seperti itu, bagaimana dengan struktur mikro ekonominya, spesifik tentang sektor-sektor ekonomi yang ada. Berpijak pada tujuan inilah, maka uraian-uraian selanjutnya akan mengupas secara mendalam sektor-sektor ekonomi mana sajakah di Indonesia yang akan akan berkembang dan terancam akibat implementasi kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina (AC-FTA).

Sektor Berpeluang

Ciri-ciri sektor usaha yang berpotensi meraih kesempatan dengan adanya ACFTA ialah apabila sektor usaha itu mampu menjadi penopang ekonomi domestik, memiliki basis industri yang kokoh dari hulu ke hilir, tidak masuk dalam pos tarif penundaan ACFTA, memiliki *comparative advantage index* yang cukup tinggi, dan tingkat ekspor yang tak terganggu dengan adanya ACFTA, serta memiliki perangkat kebijakan dan undang-undang yang telah siap diimplementasikan. Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan oleh Warta Ekonomi *Intelligence Unit*, terdapat dua sektor industri Indonesia yang memiliki peluang tumbuh dalam implementasi ACFTA.

Pertama, sektor otomotif. Tren pertumbuhan industri otomotif Indonesia memiliki kecenderungan untuk tetap stabil. Hal ini didasarkan pada indeks pertumbuhan produksi otomotif yang mengalami kenaikan selama tiga tahun (2006 - 2008). Walaupun sektor kendaraan bermotor mengalami defisit sebesar 46,46% pada 2006, tetapi pada dua tahun berikutnya meningkat ke angka 29,65% dan 22,41%.

Adapun pada bagian subsektor (alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih), memiliki porsi kenaikan lebih tinggi dan

persentase penurunan yang fluktuatif. Jika dilihat dari angka selama tiga tahun, pertumbuhan produksi per 2006 defisit di angka 36,62% dan dua tahun ke depan mengalami perbaikan dan peningkatan ke angka 8,89% dan 35,45%.

Sektor otomotif sangat sensitif dengan faktor daya beli masyarakat dan sistem kredit perbankan. Hal ini pulalah yang memberikan dampak signifikan terhadap indeks pertumbuhan sektor otomotif di Indonesia. Pada 2006 Indonesia memiliki permasalahan pada faktor inflasi dan rezim suku bunga yang tinggi, sedangkan pada 2008-2009 Indonesia dihadapkan pada krisis global. Beruntung Indonesia mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, sehingga mampu menjaga tingkat inflasi secara seimbang dan memperkuat daya beli masyarakat Indonesia.

Jika pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan positif, maka hal itu akan sangat membantu memperkuat fundamental sektor otomotif terkait penerapan AC-FTA pada 2010. Sebagai tambahan, insentif pemerintah dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) akan sangat membantu industri otomotif, terutama untuk sektor komponen manufaktur dalam negeri dan sebagai peningkatan standar kualitas barang yang dihasilkan.

Kedua, sektor pertambangan. Pertambangan merupakan sektor usaha di Indonesia yang termasuk memiliki *comparative* dan *competitive advantage*. Faktor utama dari potensi sektor ini ialah luasnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Komoditas-komoditas yang dihasilkannya pun sukses menjadi komoditas dunia. Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk salah satu komoditas dalam sektor ini, secara *comparative advantage* berhasil mencapai angka 41,05% pada 2008 dengan *trend*

yang meningkat setiap tahunnya.

Sektor Terancam

Tentu saja, di samping yang berpotensi mendapat peluang, ada pula sektor-sektor usaha yang tergolong terancam terkait hadirnya era ACFTA. Ciri-ciri sektor usaha yang diperkirakan terancam terkait ACFTA ialah memiliki perangkat undang-undang dan kebijakan yang masih lemah, memiliki basis industri yang masih lemah dari hulu ke hilir, masuk dalam pos tarif penundaan ACFTA, *comparative advantage index* yang cukup rendah, dan ekspor terganggu dengan adanya ACFTA. Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan oleh Warta Ekonomi *Intelligence Unit*, ada delapan sektor industri di Indonesia yang terancam akibat implementasi ACFTA.

Pertama, sektor alas kaki. Walaupun ekspor alas kaki diprediksi akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, tetapi implementasi ACFTA diyakini akan membuat industri alas kaki di dalam negeri ikut tergerus. Pasalnya, proporsi kenaikan ekspor itu ditaksir belum mampu menutupi kerugian dalam negeri akibat penerapan ACFTA.

Melihat indeks pertumbuhan produksi industri alas kaki, maka selama 2006, rata-rata produksinya mengalami pertumbuhan defisit sebesar 3,45% dan pada 2007 defisit itu mulai berkurang menjadi 0,47%. Sedangkan pada 2008, walaupun mengalami kenaikan, tetapi porsi kenaikan tersebut terbilang kecil, yakni menjadi positif 14,07%. Sebagai salah satu sektor padat karya di Indonesia, sudah barang tentu industri alas kaki harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dengan penerapan ACFTA, otomatis kualitas dan harga-harga produk murah dari Cina akan menjadi konsumsi utama konsumen dalam negeri. Hal ini tentu memprihatinkan. Jika pemerintah tidak segera

merelokasi tarif masuk dan jangka waktu penerapannya, dikhawatirkan hal ini akan membuat industri alas kaki gulung tikar.

Selain itu, yang patut digarisbawahi, tujuan ekspor alas kaki Indonesia selama ini ialah negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan kawasan Uni Eropa, bukanlah Cina. Dengan kondisi ekonomi yang belum pulih dan melihat keuntungan yang akan diambil dari ekspor akan tetap lebih rendah, maka sungguh beralasan untuk cemas atas kemungkinan membanjirnya produk Cina di Indonesia saat ini.

Kedua, sektor tekstil dan produk tekstil. *Comparative advantage* (CA) yang rendah untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) selama delapan tahun terakhir memberikan opsi ancaman bagi industri TPT di Indonesia dalam menghadapi ACFTA. Berdasarkan kalkulasi *Institute for Development of Economics and Finance Indonesia* (Indef) misalnya, pada 2008 CA TPT hanya sebesar 1,81%. Pada 2007 dan 2006 pun tidak jauh berbeda, hanya 1,9% dan 2,03%.

Sektor TPT juga menjadi penyumbang eksportir terbesar jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tercatat terdapat 187 eksportir yang melakukan ekspor ke luar negeri. Berdasarkan data BPS, indeks pertumbuhan produksi TPT juga mencatat pertumbuhan fluktuatif selama tiga tahun terakhir (2006-2008), yang secara berurutan sebesar 6,04%, 11,17%, dan 3,38%. Atas dasar ini, tampaknya pemerintah perlu meratifikasi kebijakan terkait penentuan standar tarif dan bea dumping yang diterapkan bagi produk-produk TPT.

Ketiga, sektor kimia. Kapasitas produksi bahan kimia pada 2008 mencapai 38,24 juta ton, sedangkan untuk ekspor pada periode yang sama mencapai 5,63 juta ton. Sementara itu, kebutuhan bahan kimia yang diimpor pada 2007 mencapai 3,7 juta ton dan

pada 2008 mengalami peningkatan menjadi 3,8 juta ton. Industri kimia terbilang salah satu industri yang terancam akibat penerapan ACFTA. Hal ini disebabkan masih terjadinya kesenjangan antara pasokan dan permintaan produk kimia nasional, khususnya polypropylene.

Dengan kesenjangan kualitas mutu standar yang tinggi antarjenis barang kimia, hal ini menjadi celah negatif yang dapat mengakibatkan rendahnya daya saing barang kimia di pasar domestik. Sementara itu, tingkat *comparative advantage* industri kimia hanya 0,47% pada 2008. Tampaknya, kesiapan dan kesungguhan dari para pelaku industri kimia dan pemerintah dalam memproteksi industri kimia pada era ACFTA ini sangat besar manfaatnya. Apalagi jika melihat indeks pertumbuhan produksi kimia rata-rata selama 2008 menurun menjadi -6,84% dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 35,84%.

Keempat, sektor besi dan baja. Dari usulan total 228 pos tarif yang disepakati untuk ditunda dalam proses negosiasi ACFTA, sebanyak 114 pos tarif berasal dari sektor industri besi dan baja, dengan jumlah kompensasi sebanyak 53 pos. Hal ini makin meyakinkan bahwa industri besi dan baja dalam negeri akan mengalami kesulitan menghadapi serbuan produk-produk Cina. Seperti diketahui, industri besi dan baja di Tanah Air belum memiliki perangkat *counter measures* seperti *antidumping duty* (AD), *countervailing duty* (CVD), dan *safeguard*. Faktor-faktor tersebut cukup untuk memperlihatkan kurang seriusnya pemerintah dalam menghadapi persaingan global tingkat ACFTA. Menimbang kondisi di atas, maka seharusnya baja dimasukkan ke dalam kategori *Highly Sensitive List* (HSL). Hal ini untuk meyakinkan setidaknya industri besi dan baja tidak kalah telak dalam persaingan dalam negeri dengan produk-produk

dari Cina.

Kelima, sektor furnitur. Dalam usulan rekapitulasi perubahan pos tarif pemberlakuan ACFTA, terdapat 5 pos (terkait sektor furnitur) dari total 228 pos tarif yang diusulkan untuk ditunda. Dalam hal indeks pertumbuhan produksi, sektor furnitur mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan yang drastis. Pada 2006, rata-rata pertumbuhan produksi furnitur sebesar -1,87%, lalu pada 2007 sebesar -14,12%, dan pada 2008 menjadi positif di level 33,56%. Data ini menandakan bahwa sektor tersebut belum stabil dalam laju pertumbuhan produksinya.

Sektor ini pun mengalami keadaan sensitif terkait krisis global di wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Dengan kondisi perekonomian di kawasan tersebut yang belum pulih, maka permintaan belum tersedia secara normal. Padahal, dari sisi jumlah, ekspor ke negara-negara tersebut cukup tinggi, sehingga jika ACFTA diberlakukan, substitusi target tujuan ekspor belum tersedia. Hal ini dikhawatirkan akan membuat produsen mebel dalam negeri gulung tikar karena permintaan yang menurun dan membanjirnya produk Cina di pasar domestik dengan harga murah dan kualitas yang lebih baik.

Keenam, sektor elektronik. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Warta Ekonomi *Intelligence Unit*, implementasi ACFTA diprediksi mampu menggerus lima produk elektronik dalam negeri. Di antaranya, radio kaset jinjing, televisi jenis cembung, kipas angin, setrika berkapasitas 350 watt, serta pompa air 125 watt. Kelima produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah dan jumlah populasi segmen masyarakat tersebut sebanyak 20 juta kepala keluarga di Indonesia. Maka, Cina yang memang menyasar segmen *middle-low level* di bisnis elektronik punya banyak alasan untuk menjadi-

kan ACFTA sebagai waktu yang tepat untuk mengeruk keuntungan di pasar elektronik di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan data yang dirilis oleh *Electronic Marketer Club* (EMC), hingga 2009, terdapat 18 produsen elektronik yang masih memproduksi peralatan elektronik rumah tangga skala menengah. Untuk sektor elektronik ini sendiri, produk Cina lebih murah 20%-30% dibanding produk Indonesia ditambah dengan kualitas yang hampir sama.

Ketujuh, sektor permesinan. Ber-

dasarkan hasil rilis yang dilakukan oleh Indef, *Comparative advantage* (CA) sektor ini selalu konsisten di bawah 0,5% selama delapan tahun terakhir. Terakhir pada 2008, CAnya sebesar 0,28%. Dalam rekapitulasi usulan perubahan pos tarif seiring pemberlakuan ACFTA, jumlah penundaan di sektor ini sebanyak 10 pos. Persentase impor mesin dari luar negeri sangat besar. Jika melihat data BPS, pada 2005 sektor permesinan melakukan impor sebesar 72,3%. Bisa dibayangkan, defisit neraca pem-



bayaran yang terjadi dengan fakta ini.

Kedelapan, sektor makanan dan minuman. Menurut laporan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), terdapat empat produk olahan khusus yang perlu diproteksi, yaitu yang berbahan baku jagung, kedelai, gula, dan beras. Produk-produk tersebut diyakini belum dapat bersaing dengan Cina. Sektor ini pun telah mendapat perhatian Kementerian Perdagangan, di mana dengan dikeluarkannya Permendag No. 56/2008. Peraturan ini

mengatur ketentuan impor produk tertentu yang mengizinkan impor lima produk, yakni alas kaki, garmen, produk elektronik, mainan, serta makanan dan minuman, hanya melalui lima pelabuhan utama.

Pertumbuhan indeks produksi sektor makanan dan minuman Indonesia, seperti yang dilansir oleh BPS (lihat Tabel Pertumbuhan Indeks Produksi), mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan per tahun sektor ini selama kurun waktu 2006-2008,

yaitu 11,98%, -5,19%, dan -2,65%. Hal ini seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah mengingat sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang padat karya. Hal-hal yang perlu diperbaiki sebaiknya mengarah pada faktor peningkatan *competitive advantage*, yaitu berjalannya *fair trade* seperti yang telah digariskan serta penguatan hambatan-hambatan teknis (*technical barrier*) seperti izin edar dan kewajiban label Indonesia. Secara garis besar, sektor makanan dan minuman cukup dikhawatirkan terimbas masuknya produk Cina ke Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Jati. 2009. Ekonomi Politik Globalisasi. Dalam Ahmad Erani Yustika. Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- ASEAN Economics Community. 2009. ASEAN Economics Community Chartbook 2009. Tidak dipublikasikan
- BPS. 2010. Data Perdagangan Internasional. Dalam www.bps.go.id
- Eichengreen, Barry. 2006. On the Sequencing of Regional Integration: General Considerations and an Application to Asia. *North American Journal of Economics and Finance*. 17: 329-334
- Farrel, Mary. 2004. Regional Integration and Cohesion – Lessons from Spain and Ireland in the UE. *Journal of Asian Economics*. 14:927-946
- INDEF. 2010. Global Economics Prospect and Indonesia Economy Outlook: Can Free Trade be a Factor? Seminar INDEF. Tidak dipublikasikan





CINA, ACFTA DAN KITA



IVAN A HADAR*)

Sejak pecahnya Uni Soviet pada tahun 1990, diskusi tentang tatanan dunia didominasi oleh enam skenario berikut. Francis Fukuyama, misalnya, meramalkan menguatnya kecenderungan demokratisasi, berbeda dengan John Mearsheimer yang lebih melihat terjadinya renaissance perang antarnegara bertetangga. Sementara itu, Samuel Huntington (1996) memprediksi terjadinya konflik antarperadaban, khususnya antara Barat dan Islam. Sedangkan Paul Kennedy (2002) mewacanakan pencarian bentuk baru global *governance* sebagai dampak globalisasi. Selain itu, beberapa penulis seperti Robert Kagan, usai Perang Irak 2003, menggambarkan terjadinya era panjang unilateralisme AS yang menjadi satu-satunya negara adidaya saat ini.

Anehnya, dalam semua skenario di atas, tak satupun yang mempertimbangkan kebangkitan Cina. Ternyata, kini, bobot ekonomi negara berpenduduk terbesar di dunia ini berpengaruh signifikan pada konstelasi kekuatan politik global. Dalam bukunya, Kaplinsky melihat Cina bukan sekedar “*Emerging Economies*” melainkan “*Asian Drivers of Global Change*” (2006).

Kebangkitan China

Dalam waktu kurang dari satu dasawarsa, Cina telah berubah dari sebuah ekonomi pinggiran menjadi pemain utama dalam pasar global. Porsi ekspornya ke AS pada kurun waktu 1985-2004, melejit dari *virtually nothing* menjadi sekitar 15%. Sementara kontribusinya pada permintaan dunia atas bahan dasar metal, meningkat dari lima (1990) menjadi 25% pada tahun lalu. Akhir 2005, dalam hal cadangan devisa (819 miliar dollar AS) dan volume ekspor (770 miliar dollar AS), Cina masing-masing menduduki peringkat dua dan tiga dunia. Bersama AS dan Uni Eropa, Cina masuk dalam kelompok besar penghasil CO₂, sehingga kebijakan energinya sangat memengaruhi perubahan cuaca global.

Pada 2025, Washington dan Beijing diramal bakal menjadi pusat kekuasaan politik global. Pertanyaannya, apakah raksasa lama dan baru berhasil mewujudkan sistem multilateralisme yang efektif, ataukah akan ada persaingan kekuasaan yang dipenuhi konflik dan instabilitas yang akan melemahkan kekuatan dan kemauan untuk menyelesaikan sisi gelap globalisasi seperti kemiskinan, kerusakan

*) IVAN A HADAR, Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi.

lingkungan hidup atau negara gagal.

Kebangkitan Cina, memaksa kawasan dunia lainnya untuk menyesuaikan diri. Industri Cina saat ini, mempekerjakan 83 juta orang, hampir sama dengan jumlah pekerja industri di 14 negara OECD terbesar. Sementara itu, sekitar 100 juta pekerja Cina lainnya, memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk pasar dunia dan siap memasuki lapangan pekerja industri. Karena itu, bisa dipastikan bahwa dalam waktu dekat, kemungkinan besar tidak ada kenaikan pesat tingkat gaji di Cina. Dinamika pasar kerja di Cina ini dipastikan mempunyai dampak global, terlihat dari melejitnya ekspor Cina yang semakin “menekan” perusahaan AS dan Eropa.

Bagi negara-negara berkembang, kebangkitan raksasa Asia ini bisa berpotensi positif maupun negatif. Sektor industri Amerika Selatan, misalnya, selain mengalami persaingan yang semakin ketat, sekaligus *booming* dalam ekspor produk pertanian dan bahan bakunya ke Asia. Beberapa negara Afrika juga mendulang keuntungan terkait meningkatnya permintaan BBM, serta produk agraria dan pertambangan. Pada saat yang sama, ekspor produk tekstil Cina membahayakan satu-satunya bidang industri yang relatif berhasil dikembangkan di Afrika. Bagaimana dengan kita?

Cina, ACFTA dan Kita

Bagi kita, Cina berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan. Meski, sekaligus berpotensi sebaliknya ketika menjadi pesaing utama bagi produk industri, seperti yang dirasakan oleh sektor industri kecil-menengah. Pada saat yang sama, dengan penawaran harga sangat bersaing, perusahaan Cina mendominasi (calon) pemenang tender pembangunan tenaga listrik di negeri ini.

Berkat cadangan devisa yang melimpah, Cina juga mampu memberi-

kan pinjaman berbunga rendah (*soft loan*), tanpa memandang Indonesia yang oleh para kreditor lainnya, dianggap telah menjadi *middle income country*.

Selain itu, kredit dari Cina juga tanpa keharusan keterlibatan ekspat bergaji tinggi serta persyaratan memberatkan terkait keharusan membeli produk dari negeri Tirai Bambu ini. Hal ini, bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Ada yang menyebut, “(Post-) *Washington Consensus*” kini disaingi oleh “*Beijing Consensus*” (Ramo, 2005).

Bagi Cina, Indonesia sebagai negara berpenduduk besar dengan sumberdaya alam yang (masih) cukup banyak serta berada dalam proses pembangunan kembali, sangatlah menarik. Kesempatan bagi kita, yang saat ini masih memiliki utang luar negeri cukup besar untuk melakukan negosiasi dengan Cina – sekaligus dengan kreditor lama, dalam mengupayakan sumber pembiayaan pembangunan yang menguntungkan. Meski yang terbaik, menurut penulis, pembiayaan pembangunan seharusnya lebih mengedepankan pembiayaan swadaya.

Pada sisi lainnya, dimulainya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA) sejak 1 Januari 2010, ditandai oleh ketidaksiapan kita. Baik pengusaha maupun buruh, menolak kesepakatan ini. Padahal, jalan panjang menuju kesepakatan dan pelaksanaan ACFTA sebenarnya telah dimulai sejak akhir tahun 90an.

Melalui perundingan di berbagai tingkat jabatan di Pemerintahan, dimulai dari *working group meeting*, pertemuan tingkat menteri hingga antar Kepala Negara, akhirnya dokumen resmi ACFTA ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, 14 November 2002. Dokumen tersebut, kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 48/2004.

Tak heran banyak yang bertanya, kemana saja selama ini pemerintah, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian teknis lainnya? Kemana pula para pelaku usaha dan DPR-RI?

Baru ketika masa berlakunya dimulai, muncul desakan dari kebanyakan pihak di Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang. Presiden SBY pun sepakat ketika mengatakan “Kita bisa minta moratorium, minta untuk menghentikan ini, itu, dan dalam WTO sebagai salah satu *safe-guard*, ada solusi dan jalan keluar.” (*VivaNews*, 12/2/2010)

Selain itu, para produsen negeri ini meminta pemerintah memaksa Cina meningkatkan impornya dari RI hingga 17% sebagai kompensasi depresiasi mata uang yuan terhadap rupiah. Depresiasi yuan 17-18% menyebabkan harga barang ekspor dari Indonesia ke Cina lebih tinggi 17-18%, sementara barang Cina yang masuk harganya lebih rendah. Hal seperti itu, misalnya, dilakukan India.

Namun, pertanyaannya, walaupun pemerintah mampu melakukan negosiasi ulang dan hal tersebut disetujui komite ACFTA, apa para pelaku usaha kita akan mampu bersaing dengan produk sejenis dari ASEAN maupun Cina? Jangan-jangan, ada atau tidak ada ACFTA daya saing kita tetap tidak kompetitif di pasar karena masalah kelangkaan listrik, tersendatnya suplai energi primer untuk proses produksi, parahnya infrastruktur untuk distribusi serta lemahnya pelaksanaan hukum, dan sebagainya. Belum lagi Pemerintah, dalam hal ini aparat Bea & Cukai, tidak sanggup mengatasi penyelundupan secara tuntas. (Pambagio, *DetikNews*, 9/1/2010)

Bagi Cina, dan juga ASEAN, Indonesia adalah pasar sekaligus produsen bahan baku energi yang relatif besar. Hal ini, bisa menjadi berkah ataupun kutukan. Apa yang (bakal) terjadi, seharusnya tergantung arahan kita. ■



ACFTA: MENENGGOK JA



Oleh L A U N A
Staf redaksi
Jurnal Sosial Demokrasi

SECARA resmi perjanjian kerjasama *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sudah berlaku efektif per Januari 2010 lalu. Tahap awal, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang memberlakukannya. Sementara pada Tahun 2015, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga akan bergabung dalam perdagangan bebas kawasan ini. Menurut catatan Koran Tempo (4/2/2010), selama tahun 2010 ini, terdapat 1.017 pos tarif perdagangan Cina-Indonesia akan dihapus. Sementara sepanjang tahun 2004-2009 sebanyak 828 pos tarif telah diturunkan, dan 200 pos tarif lainnya menyusul untuk dihapuskan. Terhitung

mulai Januari 2010, bea masuk produk manufaktur China ke seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian nol persen.

Mewakili suara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk segera memutuskan penundaan penerapan ACFTA. Dikhawatirkan, kesepakatan pembebasan bea masuk impor, tak cuma berimplikasi pada ancaman deindustrialisasi dan pelemahan posisi sektor UMKM kita—yang selama ini bisa dikatakan berperan—sebagai tulang punggung ekonomi nasional, namun dari sisi pendapatan negara



ALAN CINA

atas bea impor, ACFTA juga berpotensi mereduksi penerimaan negara dari sektor ini secara signifikan.

Kekhawatiran dampak deindustrialisasi akibat pemberlakuan ACFTA sebenarnya telah jauh-jauh hari disuarakan banyak pihak, terutama para pelaku usaha, yang menganggap pemerintah kurang peduli terhadap kebutuhan dan aspirasi dunia usaha; serta alianya pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan cetak biru strategi industri nasional yang berkualitas dan berdaya saing sehingga siap bertarung dalam ring perdagangan bebas di tingkat kawasan. Sikap permisif pemerintah terkait ACFTA telah menyulut berbagai

diskusi, konferensi pers hingga *long march* dan pengerahan massa yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sipil (serikat buruh, mahasiswa, LSM, dan berbagai elemen masyarakat sipil) di berbagai wilayah tanah air.

Reaksi dari para pelaku usaha dan asosiasi industri setidaknya mencatat 10 sektor industri dalam negeri potensial bakal terimbas dampak buruk pemberlakuan ACFTA. Sektor tersebut meliputi pakaian, tekstil, tas, sepatu, mainan anak, sandal, sepatu, jamu, makanan, minuman, pertanian dan holtikultura serta perikanan/peternakan. Kategori sektor industri lainnya yang diprediksi akan terpuruk meliputi industri manufaktur (seperti

besi dan baja, petrokimia, elektronik, kabel, dan serat sintesis) serta industri padat karya (seperti mebel, benang dan kain, alas kaki, dan mainan).

Di sektor industri mainan, dampak serbuan produk mainan Cina sudah terasa jauh-jauh hari. Menurut keterangan Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI), banyak pengusaha mainan yang awalnya berposisi sebagai produsen kini berubah peran menjadi "pedagang" barang-barang murah asal Cina. 40 persen dari sekitar 60 produsen mainan anak yang bergabung dalam APMETI kini telah beralih profesi menjadi pengimpor mainan dari Cina. Tak heran jika produk mainan



Cina kini menguasai 80 persen pasar. Meskipun sebagian sektor itu kemudian berhasil diyakinkan pemerintah tentang keharusan mengikuti ACFTA, sektor-sektor seperti tekstil, baja, dan petrokimia tetap bersikeras meminta penundaan.

Upaya pemerintah untuk membesarkan hati pelaku usaha dalam negeri tampak gagal. Bahkan, ironisnya, sejumlah petinggi negara malah menunjukkan kegundahan terkait dampak buruk implementasi ACFTA. Berbeda dengan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, yang begitu yakin ACFTA akan memberi dampak positif bagi Indonesia. Menko Kesra Agung Laksono justru dengan tegas mengungkapkan kekhawatirannya. Ia berharap, pemerintah dapat menunda penerapan ACFTA.

Sementara Menakertrans, Muhaimin Iskandar, juga menunjukkan kegundahannya. Dalam konteks ketenagakerjaan, ia memperkirakan akan terjadi tambahan angka pengangguran antara 3 juta sampai 7,5 juta, tergantung dari tingkat keintensifan penerapan ACFTA dan efektivitas mitigasi risiko. Padahal, pengangguran sekarang mencapai 20-an juta orang yang bertali-temali dengan kenyataan nasib 35 juta penduduk kita yang masih hidup dalam balutan kemiskinan.

Bagi Hendri Saparini (*Media Indonesia*, 21/12/2009), absennya strategi industri di Indonesia akan memporak-porandakan arah kebijakan ekonomi dan menekan daya saing industri nasional. Rendahnya daya tarik industri manufaktur, menurut ekonom Econit ini, antara lain akibat kegagalan PLN dalam menjaga pasokan listrik dan tingkat harga untuk sektor industri. Ironisnya, tingginya biaya produksi terjadi karena PLN tidak mendapat dukungan pasokan energi murah (baik batubara maupun gas) dari pemerintah. Padahal Indonesia memiliki kekayaan energi alam

yang tidak kalah dibanding Cina. Tetapi pemerintah Indonesia memilih menjadikan batubara dan gas sebagai komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun dan memperkuat struktur industri dalam negeri.

Mengutip Faisal Basri (*Kompas*, 21/12/2009), barang Cina kini mengalir deras bak air bah ke pasar domestik kita. Kini Cina sudah menjadi sumber utama impor Indonesia, yakni 17,2 persen dari total impor nonmigas. Sebaliknya, Cina hanya menyerap 8,7 persen dari keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia. Ini berarti, penetrasi barang-barang Cina ke pasar kita jauh lebih gencar ketimbang sebaliknya. Sementara itu, struktur barang yang diperdagangkan cenderung tidak simetris. Komoditas primer mendominasi ekspor Indonesia ke Cina, sedangkan ekspor Cina ke Indonesia didominasi oleh produk-produk manufaktur yang sangat beragam. Tak pelak, ancaman paling besar dari implementasi ACFTA akan dihadapi industri manufaktur kita.

Ekonom UGM, Sri Adiningsing juga melihat ancaman nyata serbuan produk Cina jangan dianggap sepele (*Jawa Pos*, 18/1/2010). Tak hanya negara sedang berkembang yang kian mengalami kesulitan melawan serbuan produk Cina, statistik perdagangan internasional negara-negara maju, seperti AS, Jerman, dan Jepang dalam beberapa waktu terakhir juga mengalami defisit. Nasib yang sama juga dihadapi negara-negara di kawasan Asia yang mengalami defisit perdagangan dengan Cina, seperti Malaysia, Thailand, dan India. Itu semua menunjukkan bahwa Cina adalah “lawan” tangguh atau “tak terkalahkan” dalam persaingan global. Perdagangan Indonesia dengan Cina sendiri yang masih surplus pada 2002, dalam 2 tahun terakhir telah mengalami defisit. Itu pun mayoritas ekspor kita ke Cina adalah produk sumber daya alam.

Lalu, bagaimana dengan kemampuan daya saing sektor pertanian kita terkait implementasi ACFTA? Menurut Boni Setiawan (*Globalisasi Pertanian: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*, 2003), keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan antarsektor pertanian (*agreement of agriculture/AOA*) dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) faktual telah memberi akses bagi perluasan dan pendalaman proses liberalisasi radikal dalam sektor pertanian Indonesia. Dengan memberikan komitmen terhadap kesepakatan seperti itu, pemerintah Indonesia sesungguhnya—secara perlahan namun pasti—telah memberi “suntikan mati” bagi kehidupan mayoritas masyarakat (yang 60 persen lebih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian) dan sistem pertanian nasional kita yang memang sangat rentan terhadap penetrasi pasar.

Sementara studi Hermanto (2005) yang menggunakan analisis teori keseimbangan umum (*general equilibrium theory*) untuk melihat dampak makroekonomi, kinerja sektoral, dan pendapatan rumah tangga Indonesia menunjukkan, mayoritas produk-produk pertanian Indonesia semakin kehilangan daya saingnya sejak negeri ini mengintegrasikan dirinya dalam kesepakatan WTO sejak 1995 lalu. Hasil studi ini juga menunjukkan, antara tahun 1996-1998, kontribusi ekspor sektor pertanian Indonesia menunjukkan kinerja menurun dan mencapai tingkat terendah pada periode 2000-2001. Sebaliknya, kinerja impor produk-produk pertanian yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara di kawasan Asia, termasuk dari AS dan Australia, justru mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama pada periode 2002-2003.

Seperti dikemukakan Hidayat (*Indonesian Agricultural Sector during the Economic Crisis*, 2002), kebanyakan data dan hasil kajian mengenai kesi-

apan sektor pertanian Indonesia untuk menghadapi liberalisasi perdagangan selalu terlihat optimis di atas kertas; seperti ditunjukkan para pendukung gagasan ekonomi liberal, yang meyakini bahwa hanya melalui jalan liberalisasi perdagangan Indonesia akan mampu memetik keuntungan. Para pengusung gagasan ekonomi liberal ini juga kerap berargumen, Indonesia akan menderita kekalahan dalam daya saing ekspornya dan dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosialnya apabila negara ini tidak mengadopsi kerangka deregulasi perdagangan dan langkah-langkah liberalisasi ekonomi seperti yang telah dilakukan mitra dagangnya.

Padahal, hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS, 2006) menunjukkan, menurunnya daya saing dan kinerja sektor pertanian sejak tahun 2005 hingga kini sebagian besar diakibatkan oleh jatuhnya hasil produksi selama masa pasca panen. Pelemahan daya saing sektor pertanian sebagai akibat dari membajirnya produk impor pertanian, telah memberi dampak signifikan bagi penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia, dari 41,9 persen pada tahun 1969, menjadi 17,2 persen pada tahun 2005. Kendati sektor pertanian terus digembar-gemborkan pemerintah sebagai sektor terpenting dari strategi dan prioritas pembangunan Indonesia, namun upaya konkret pemerintah untuk melindungi sektor unggulan nasional ini dari gempuran penetrasi pasar global selalu bersifat tambal sulam. Yang pasti, hingga hari ini kita terus disuguhkan berbagai kebijakan sektor pertanian nasional yang kental bernuansa liberal, yang salah satunya berujud dalam program *food estate*.

Tampaknya kita memang lemah di hampir segala lini. Kuat dugaan, gejala dini deindustrialisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir diperparah oleh kian membanjirnya produk manufaktur (termasuk produk

pertanian) Cina yang terus merangsek masuk ke pasar domestik kita. Sulit kita sangkal, bahwa sejumlah produk manufaktur kita jauh sebelum ACFTA diimplementasikan (per 1 Januari 2010 lalu) sudah tunggang langgang menghadapi barang-barang Cina. Dengan ACFTA, bisa dipastikan industri manufaktur kita akan makin terpuruk dan merana.

Menengok Jalan Cina

Tiga puluh tahun yang lalu, Cina bisa dikatakan tak punya jejak kaki, bahkan catatan kaki, dalam hiruk-pikuk modernisasi yang mengawali jejak persaingan global antar negara yang kini kerap disebut banyak pihak sebagai era *free market*, "*free fight liberalism*" atau yang lebih tegas "kapitalisme neoliberal". Namun kini, Cina merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa: pusat industri manufaktur di dunia, penyedia dana paling terkemuka, investor utama di seantero dunia (dari Afrika, Asia sampai Amerika Latin), serta sumber riset dan pengembangan utama yang semakin luas.

Kemajuan ekonomi Cina yang kian dahsyat, yang terus kita saksikan hari-hari ini, tentu tak bisa lepas dari akar sejarah peradaban bangsa Cina yang telah berlangsung ribuan tahun. Peradaban Cina tumbuh dan berkembang sejak zaman Dinasti Sang (1766-1122 SM), Dinasti Zou (1122-256 SM), Dinasti Qin (221-206 SM), Dinasti Han (206 SM-221 M), Dinasti Sui (581-618 M), Dinasti Tang (618-906 M), Dinasti Song (960-1268), Dinasti Yuan (1279-1368 M), Dinasti Ming (1368-1644 M), Dinasti Qing (1644-1912 M) hingga ke zaman globalisasi-neoliberal saat ini.

Selama kurun waktu tersebut, Cina telah membangun peradabannya secara eksis, meski mengalami kondisi pasang surut. Menurut Zainurrofik, penulis buku *Cina Negara Raksasa Asia: Rahasia Sukses Cina Menguasai Dunia* (2009), bangsa Cina mampu

membangun dan menjaga kontinuitas peradaban yang tak hanya kuat, namun juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Kemampuan itu menjadi salah satu faktor penting (di samping faktor kunci lain) yang mendasari kemajuan bangsa Cina di hampir setiap dimensi kehidupan: ekonomi, sosial, budaya, peradaban, olah raga hingga ke ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aspek penting lain, peradaban Cina banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfusian yang diajarkan oleh guru bangsa Cina, Kong Fuzi (551-472 SM). Kong Fuzi adalah seorang ahli filsafat yang mengajarkan tentang prinsip kehidupan berdasarkan moral kebajikan (*Ren*). Ajaran kebajikan ini mendasari lahirnya filsafat Konfusius yang menjadi landasan dalam ber-adat istiadat/tatakrama (*Li*) dan gaya hidup (*Dao*) masyarakat Cina dalam berkarya tanpa pamrih, rela berkorban untuk orang lain, dan siap berjuang untuk kemaslahatan bersama.

Namun, dalam satu catatan sejarah perjalanan politik Cina, ajaran Konfusian pernah mendapat tantangan dari pemimpin Cina. Memasuki masa penyatuan Republik Rakyat Cina (RRC) pada Oktober 1949, di bawah kepemimpinan Mao Ze Dong, ajaran sang guru pernah ditentang habis-habisan. Bagi seorang revolusioner seperti Mao, Konfusianisme adalah ajaran kolot warisan feodal yang potensial menghambat kemajuan berpikir bangsa Cina. Visi revolusioner Cina, menurut Mao, sulit terwujud jika ajaran Konfusianisme yang pragmatis dan syarat dengan nilai kapital menjadi pegangan hidup bangsa Cina.

Atas dasar argumen itu, Mao melakukan revolusi dengan melibatkan kaum buruh tani sebagai sokoguru kekuatan revolusioner untuk membangun sistem komunisme Cina. Revolusi berlangsung pada tahun 1965—yang diperkirakan telah

menelan korban setengah juta jiwa—ini dikenal sebagai “revolusi kebudayaan”. Di masa revolusi ini, berbagai proyek industri dibangun, seperti pabrik peleburan baja di Wuhan dan Baodou di Mongolia, Pabrik Baja di Anshan, Pabrik mobil di Zhangzhun, pabrik traktor di Louyang dan Harbin serta pabrik pengilangan minyak di Lanzhou.

Ketika Mo wafat pada tahun 1976, kepemimpinan Cina dilanjutkan oleh Deng Xiaoping. Deng melakukan kebijakan reformasi melalui apa yang kemudian dikenal sebagai “sistem tanggung jawab” (*Zerenzhi*). Dalam sistem ini setiap pekerja tani tidak lagi bekerja bersama dalam sebuah komune, melainkan melakukan perjanjian dengan pemerintah administratif setempat untuk mengerjakan sebidang tanah dan mendapatkan keuntungan langsung. Perlahan, tapi pasti, perekonomian Cina mengalami pertumbuhan yang sustain dan akseleratif. Tahun 1982 saja, pendapatan petani mengalami kenaikan sebesar 6,6 persen setahun. Kebijakan reformasi Deng mendorong pesatnya pertumbuhan perekonomian Cina dari tahun ke tahun. Antara tahun 1978-1995, GDP Cina mampu tumbuh antara 7,5 hingga 8 persen. Keberhasilan reformasi ekonomi Cina di bawah kepemimpinan Deng ini barang tentu tidak bisa lepas dari ajaran konfusius yang menjadi prinsip gerakan Deng dalam setiap pengambilan kebijakan reformasi Cina.

Ketika Deng—yang dikenal sebagai peletak fondasi modernisasi Cina—memimpin langsung proyek modernisasi Cina, Cina mengalami sejumlah perubahan besar dan mendasar melalui skenario empat langkah modernisasi ala Deng. Langkah pertama adalah persiapan kerangka kekuasaan agar dapat menjalankan “empat langkah modernisasi”, yaitu modernisasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan pertahanan-

keamanan (Soebagio, 1990). Antara tahun 1976 dan 1980, berbagai kebijakan dijalankan untuk memperkuat landasan politis bagi Deng supaya mendapat dukungan atas program reformasi yang telah direncanakan. Langkah-langkah berani yang sudah dimulai sejak 1976 tersebut diresmikan dalam Sidang Komite Pusat Partai Komunis Cina (PKC) ke-11 pada Desember 1978. Sidang tersebut dianggap sebagai *turning point* yang mengawali suatu proses demistifikasi pemikiran Mao. Saat itu, perjuangan kelas berskala besar dinyatakan selesai dan perjuangan baru PKC yang harus ditempuh adalah untuk mencapai “empat langkah modernisasi” Cina (“Cina Setelah Enam Dekade”, *Kompas*, 16/11/2009).

Mengutip Didik Rachbini (2006), pola industrialisasi yang berlangsung di Cina berbeda dengan pola industrialisasi di negara lain. Cina masuk ke dalam fase sebagai negara industri dengan cara melompat, tidak melalui tahap awal proses industrialisasi yang umumnya diawali dengan penggunaan teknologi rendah dan padat karya. Industrialisasi Cina langsung masuk ke semua level teknologi, dari teknologi rendah sampai yang tinggi. Dengan demikian ekonomi Cina bersaing dengan semua negara dengan level industri yang berbeda. Persaingan barang-barang Cina di pasar internasional telah menyeret semua pemain untuk masuk ke arah persaingan harga yang sangat murah. Semua negara industri di dunia cemas terhadap peranan baru Cina dalam ekonomi global. Bahkan, tidak sedikit dari negara industri itu yang merasa khawatir dan takut. Karena pengaruhnya yang besar, ekonomi Cina bukan lagi faktor yang di pengaruhi globalisasi, tetapi sudah mempengaruhi globalisasi secara signifikan. Kawasan Asia Timur secara total sudah berubah secara struktur dalam bidang industri dan perdagangan. Kawasan ini sudah

masuk ke dalam era globalisasi penuh dan persaingan yang sangat intensif (*full scale globalization*).

Kompetisi yang terjadi semakin intensif dan menjadi persaingan dengan skala besar (*mega-competition*), yang mematikan. Pemerintah masing-masing negara seperti tidak sanggup membendung fakta bahwa dinamika globalisasi yang paling intensif terjadi di kawasan Asia pasifik. Itu semua terjadi karena faktor ekonomi Cina yang spektakuler tersebut. Peranan Cina sangat jelas, yakni menggantikan posisi dan dominasi Jepang di kawasan Asia Timur. Dinamika kawasan berubah karena ekonomi Jepang bergerak lambat. Suka atau tidak suka, Indonesia sudah harus menyadari menghadapi fenomena mega competition dan gempuran berbagai produk asal Cina.

Di bidang ilmu pengetahuan, sejak tahun 2000, ratusan pusat-pusat penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*) milik pemerintah dan swasta Cina berhasil menarik dan melakukan kerjasama dengan setidaknya 700 pusat penelitian dan pengembangan yang berafiliasi dengan berbagai perusahaan transnasional. Selain didukung oleh pusat-pusat R&D skala global, salah satu ciri penting dari pertumbuhan ekonomi dan industry Cina yang impresif adalah dukungan tenaga ahli berpendidikan dan tenaga kerja dengan spesialisasi dan tingkat keterampilan yang luar biasa.

Pada tahun 2004 saja, Cina menghasilkan 127.331 sarjana-magister dan 23.446 orang dengan gelar doktor (31,4 persen diantaranya adalah wanita). Sedangkan mereka yang menyelesaikan pendidikan pascasarjana di luar negeri pada tahun 2001-2004 tercatat sebanyak 410.518 orang, dan dari jumlah ini yang kembali ke China tahun lalu tercatat sebanyak 24.726, dengan gelar MA dan PhD. Sejak awal tahun 2000 lalu, Cina juga sudah dilanda “Crazy

English”, dimana mayoritas masyarakat Cina dari usia anak-anak sampai orang dewasa ingin mencapai skor 600 dalam TOEFL. Mode pakaian paling mutakhir dan arsitektur Barat mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat Cina.

Dukungan di tingkat pendidikan ini juga disertai dengan suplai tenaga buruh yang terampil. Berdasarkan data statistik tahunan Cina (*China Statistical Yearbook*) tahun 2005, jumlah pekerja di wilayah perkotaan meningkat dari 109.696.966 orang pada tahun 2003 menjadi 110.988.867 orang pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, mereka yang bekerja di bidang manufaktur tercatat paling besar, sejumlah 30.508.231 orang pada tahun 2004. Keseluruhan pekerja ini pada tahun 2004 antara lain menghasilkan 2.314.000 unit kendaraan dan 15.815.500 unit motor.

Angka-angka statistik ini memang merupakan cerminan total produksi manufaktur yang mampu dihasilkan Cina selama dua dekade menjalankan modernisasi di berbagai sektor industrinya. Angka ini juga tercermin, misalnya, pada perusahaan manufaktur monitor TPV Technology Ltd di Fuqing, Provinsi Fuzhou yang berpusat di pesisir tenggara daratan Cina. Kemampuan ini antara lain karena tingkat produktivitas dan keterampilan para pekerja yang tinggi, yang mampu bekerja secara cekatan dan efisien. Para pekerja industri elektronik Cina ini mampu menghasilkan sekitar 8.000 monitor teve LCD per jamnya.¹

Dari aspek industrialisasi yang berlangsung di Cina, situasi dan lingkungan pertumbuhan ekonomi Cina juga telah menghasilkan berbagai *local genius* seperti tercermin pada Huawei Telecommunications Co Ltd, perusahaan pertama di Cina yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh para karyawan perusahaan telekomunikasi raksasa itu. Bahkan, Taman Industri Zhongguancun di Beijing, dari 14.000 perusahaan teknologi tinggi yang digerakkan oleh perusahaan transnasional, sebanyak 2.500 perusahaan didirikan oleh para sarjana Cina berusia muda yang rata-rata menyelesaikan sekolahnya di luar negeri.

Salah satu kehebatan Cina adalah kepandaianya dalam meniru, atau dalam bahasa kerennya *reverse engineering* (rekayasa balik); di samping faktor memiliki sumber daya manusia yang melimpah serta campur tangan pemerintah dalam hampir keseluruhan proses bisnis dan pengembangan perekonomian negara. Seperti kita ketahui, biaya terbesar pada pembuatan produk adalah pada tahap R&D. Selain memakan biaya besar, R&D juga memakan waktu yang lama. Para pengusaha China *me-minimize* dengan metode “*reverse engineering*”, yakni membuat kembali produk yang sudah ada dengan menggunakan sparepart, material, serta cara pembuatan yang sama seperti produk aslinya. Rekayasa balik ini terdiri dari dua jenis: meniru material dan bentuk sesuai aslinya dengan beberapa modifikasi. Dengan metode ini, produsen Cina bisa menghemat *cost production* dan dapat

melempar produk ke pasaran dengan variasi yang sangat beragam dan dalam waktu relatif singkat (*Koran Tempo*, 4/2/2010).

Alasan mendasar lain kenapa produk Cina sangat kompetitif adalah peran dan campur tangan pemerintah dalam mengembangkan dan melindungi perekonomian domestiknya. Pemerintah Cina tak akan membuat kebijakan gegabah yang akan berdampak pada kepentingan industrinya dan merugikan perekonomian rakyatnya. Menurut Bambang Widjojanto (dalam acara *Today's Dialogue* di Metro TV), pemerintah Cina tidak akan mentolelir siapa pun (termasuk para birokrat dan petinggi PKC) untuk “bermain-main” dalam urusan bisnis dan ekonomi negara. Dalam kebijakan investasi asing misalnya, Cina akan memastikan terlebih dahulu bahwa industri domestiknya telah sungguh kuat dan berada di puncak, baru mengundang masuk investasi. Pemerintah Cina bersikap protektif dan hanya mau bersaing setelah perusahaan-perusahaan Cina dipastikan telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Misalnya, di sektor industri migas, ketika perusahaan negara telah benar-benar kuat dan menjadi pemain dominan di sektor energi Cina (seperti CNOOC, Sinopec, dan PetroChina), bukan perusahaan minyak asing, baru pemerintah Cina mengizinkan perusahaan minyak mancanegara berinvestasi di negeri Tirai Bambu itu.

Faktor berikut dari keunggulan Cina adalah peran penting jaringan Cina perantaraan (*hoakiao*) yang

1 Ada persepsi yang muncul bahwa murahnya produk-produk buatan Cina karena tenaga buruhnya yang murah. Kalau kita perhatikan angka statistik resmi pemerintah China, rata-rata gaji yang diterima buruh di China dalam satu tahun (2004) mencapai 14.569 renminbi (sekitar Rp 17,9 juta), naik sekitar 9,8 persen dari tahun 2003. Dengan gaji rata-rata sekitar Rp 1,5 juta per bulan (atau sekitar 800-1.000 renminbi), para buruh China bekerja secara efisien sehingga mampu menghasilkan produk yang tidak hanya masif, tetapi juga berkualitas dan mendapat respon positif dari konsumen mancanegara. Jika kita

bandingkan dengan rata-rata upah buruh di negara-negara kawasan Asia Tenggara, upah buruh di China saat ini sudah di atas upah buruh di Indonesia (rata-rata 0,35 dollar per jamnya), sementara Indonesia masih berkisar 0,33 dollar per jamnya. Upah buruh tertinggi di kawasan ASEAN diduduki oleh Malaysia (1,30 dollar per jam), disusul Thailand (1,10 dollar per jam), dan Filipina (0,80 dollar per jam). Lihat Launa, “Buruh dan Kemiskinan”, *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol. 7, No. 2, September-Desember 2009, hal. 38.

tersebar di seluruh penjuru dunia. Untuk urusan ini, futurolog dunia, John Nasibitt, berani memprediksi bahwa pada akhir abad ke-21, Cina akan menggeser dominasi Jepang sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik sekaligus kekuatan ekonomi ke dua terbesar di dunia (*Kompas*, 28/7/2009). Prosesnya, menurut Naisbitt, penguasaan ekonomi Cina di kawasan Asia Pasifik akan dilakukan, baik secara langsung (melalui penetrasi perdagangan dan pasar secara besar-besaran) maupun tidak langsung (melalui peran *hoakiao* yang tersebar di seluruh pelosok dunia). Indikator lain, dalam dua tahun terakhir Cina melampaui Jerman sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga dunia. Tahun 2007, *gross domestic product* (GDP) China mencapai 3,5 triliun dollar AS dan Jerman 3,3 triliun dollar AS. Tahun 2008, GDP Cina melonjak menjadi 4,42 triliun dollar AS, mendekati GDP Jepang yang 4,68 triliun dollar AS. Dengan kemampuannya, ekonomi Cina mampu tumbuh antara 7,5-10 persen, sementara pertumbuhan Jepang minus 6,0 persen (data Juli 2009), menurut Nasibitt, Cina dipastikan akan meninggalkan Jepang dalam total angka GDP terbesar di dunia (John Naisbitt, *Megatrend Asia*, 1995).

Pilihan pragmatis Cina dalam konteks pembangunan ekonomi terus menunjukkan hasil yang mengesankan. Dalam banyak kajian dan proyeksi akademis jangka panjang, banyak ahli yang memprediksi tak cuma Jepang yang akan dilampaui Cina, namun tak sedikit wacana yang menyatakan Cina akan menyalip AS menjadi kekuatan ekonomi nomor satu di dunia. Fakta ini setidaknya terkonfirmasi dari analisis para ahli terkait ketergantungan AS yang besar pada Cina, terutama pascakrisis finansial global 2008 lalu. Defisit anggaran AS tahun ini diperkirakan melampaui 1,8 triliun dollar AS dengan utang kumulatif mendekati

angka 12 triliun dollar AS. Diperkirakan Cina mewakili 83 persen dari seluruh defisit perdagangan AS dalam produk nonminyak. Cina kini mengakumulasi pembelian surat berharga negeri Paman Sam itu senilai 763,5 miliar dollar AS.

Cina juga berhasil menunjukkan daya tahan ekonomi negaranya ketika seluruh negara di dunia mengalami guncangan ekonomi yang hebat sebagai dampak krisis keuangan global tahun 2008. Cina mampu menjaga tingkat pertumbuhan ekonominya. Selama sembilan bulan pertama tahun 2009, perekonomian Cina tumbuh sebesar 7,7 persen. Cina juga sukses menjalankan program stimulus ekonomi. Bahkan, Robert Zoelick, Presiden Bank Dunia, mengungkapkan bahwa krisis global yang dampaknya masih terasa hingga kini hanya dapat diselesaikan oleh G-2, yaitu AS dan Cina (*Kompas*, 16/11/2009).

Faktor penting lain di balik berkahannya ekonomi Cina dalam menghadapi krisis finansial global beberapa waktu lalu adalah stimulus ekonomi sebesar 586 miliar dollar AS yang digelontorkan pemerintah Cina. Melalui kebijakan stimulus ekonomi yang terarah, kebijakan itu bekerja amat baik di tengah penurunan ekspor—sebagai dampak dari lesunya pasar global. Ini berbeda dengan kebijakan stimulus Pemerintah AS (yang diperkirakan mencapai angka 787 miliar dollar AS), yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi AS hingga akhir tahun 2009 lalu masih negatif (minus 2,6 persen); sementara angka pengangguran di negeri yang menjadi jantung kapitalisme global itu diperkirakan masih cukup besar, sekitar 10,2 persen.

Bahkan saat krisis, langkah Cina membantu negara lain baik lewat *special credit facility*, yang memberikan kemudahan pembayaran bagi para importir, dilakukan untuk menjaga

permintaan produk Cina. Sedangkan *bilateral currency-swap agreement* yang ditawarkan, juga dikaitkan dengan strategi industrinya. Peningkatan perdagangan dan investasi lewat program ini akan ditujukan untuk menjamin kebutuhan energi dan bahan baku bagi industrinya.

Sukses ekonomi Cina juga merupakan bagian dari strategi *market economy* yang menjadi orientasi Cina pasca-Jiang Zemin. Melalui reformasi Partai Komunis China (PKC) dalam kongresnya November 2001, rezim komunis Cina berhasil menyetujui masuknya kelas kapitalis (*shehui qita fangmian de youxiu fenzi*) ke dalam unsur PKC. Reformasi ini tak hanya bertujuan merombak total hubungan majikan-pekerja dalam tradisi komunis Cina yang binen, tetapi juga memperkuat basis dukungan dari para industriawan dan kapitalis Cina untuk melakukan ekspansi pasar besar-besaran produk Cina ke seluruh penjuru dunia guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negeri Tirai Bambu ini.

Untuk mewujudkan Cina sebagai pusat industri dunia, pemerintah Cina memilih untuk memprioritaskan penyediaan listrik murah. Listrik diyakini ini akan menjadi faktor penting untuk mencipatakan daya saing dan menarik investasi. Karenanya Cina memilih untuk memanfaatkan batubara yang melimpah sebagai modal untuk mewujudkan listrik murah. Strategi industri Cina tidak memilih untuk memanfaatkan batubara dari penerimaan ekspor. Demikian juga pilihan untuk mengolah timah dan tidak menjadikan timah mentah sebagai komoditas ekspor, didasarkan pada visi dan strategi Cina untuk membangun struktur industri elektronik yang *deep* dan kompetitif.

Faktor berikut dari keberhasilan pembangunan ekonomi Cina adalah pada pilihan cerdas masyarakat Cina sebagai masyarakat pembelajar. Me-

ngutip Komarudin Hidayat (2009), masyarakat Cina sungguh serius belajar dari kegagalan Uni Soviet dalam mempraktikkan ajaran Marxisme-Leninisme dan keberhasilan Barat dalam mewujudkan ideologi kapitalisme, lalu semua itu diadaptasikan kepada sejarah dan tradisi Cina. Meminjam istilah Naisbitt, dari delapan pilar mewujudkan masyarakat Cina baru dan modern, pilar pertama yang dilakukan Deng Xiaoping adalah emansipasi cara berpikir.

Jika kita mengikuti alur berpikir Deng di atas, maka Cina sesungguhnya adalah bangsa yang terbuka, adaptif, dan “pembelajar”. Sebaliknya, bangsa Barat yang telah berada sepuluh langkah di depan sejak revolusi industri selalu memposisikan dirinya bangsa “pengajar”. Tak ada demokrasi tanpa kebebasan, tak ada kebebasan tanpa individualisme. Seperti dikemukakan Nasibitt (1995), dalam sejarah kemanusiaan, peradaban Barat, terutama AS, selalu memandang dirinya sebagai negara yang ideal; penopang ajaran demokrasi dan pengemban prinsip humanisme universal. Dengan identitas ini, AS lalu bertindak sebagai hegemon, menjadi polisi sekaligus guru dunia dengan mengeksport dan mempromosikan demokrasi, HAM, humanisme serta seluruh atribut liberalisme kepada negara-negara lain. Konsekuensinya, politik luar negeri AS menjadi sangat agresif dan impresif; cenderung memaksakan kehendak pada bangsa-bangsa lain di dunia.

Di tilik dari aspek pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah Asia-Pasifik, Cina diprediksi juga bakal menggeser posisi dan peran Amerika Serikat (AS). Pergeseran ini, menurut Juwono Sudarsono (2009) tak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi Cina. PDB AS yang pada 2000 sebesar 22 persen PDB dunia, pada 2040 diperkirakan hanya akan menjadi 14 persen saja dari PDB dunia. Sementara PDB RRC yang pada 2000

hanya mencakup 11 persen PDB dunia, pada 2040 diprediksi akan meraih 40 persen PDB dunia. Perbandingan tentang kekuatan ekonomi Cina dan AS telah melahirkan ramalan bahwa pergeseran kekuatan militer pun akan bergeser dari dominasi AS ke tangan RRC, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Menurut Juwono, pada tahun 2030 dipastikan akan terjadi pergeseran “kekuatan cerdas” (ekonomi) Cina yang mendorong “kekuatan keras” (militer) yang memperkuat “kekuatan lunak” (diplomasi). Dengan PDB hampir 5 triliun dollar AS, anggaran pertahanan Cina tahun 2010 diperkirakan akan mencapai 90–100 miliar dollar AS.

Meminjam tesis Robert Kagan (2003), sejak era perang dingin, AS punya kalkulasi sendiri dalam menentukan prioritas dan kepentingan nasionalnya, terutama dalam melihat potensi ancaman, yang sangat mempengaruhi pilihan kebijakan pertahanan dan politik luar negerinya. Realitas ini sejalan dengan tesis *the clash of civilization*-nya Huntington (1996). Tesis ini mendefinisikan setiap konflik selalu berada dalam kerangka perang peradaban. Kecenderungan politik luar negeri AS yang agresif dan imperialistik, agaknya bisa dieja dalam paradigma “*Huntingtonian complex*” ini; dimana pluralisme peradaban (terutama yang datang dari peradaban Islam dan Konfusian) kerap dilihat sebagai sebuah ancaman yang harus “diatasi”.

Dalam bahasa Kagan, AS hidup dalam jagad kuasa Hobbesian. Paradigma ini merujuk pada pandangan Thomas Hobbes, filsuf Inggris abad ke-17, yang melihat keadaan alamiah manusia sebagai anarki, yang kotor, brutal, dan tak bisa ditolelir. Untuk mengatasi situasi itu, tentu dibutuhkan sebuah “Leviathan”, sosok kekuasaan dengan kedaulatan mutlak dan memiliki kekuatan memaksa untuk menghindari anarki dan memastikan

kehidupan manusia tak berporos ke dalam—apa yang diistilahkan oleh mantan Presiden AS, Walker Bush—sebagai siklus “*axis of evil*”.

Beijing Consensus

Yang juga menarik dari keberhasilan pembangunan ekonomi Cina adalah apa yang oleh Ignatius Wibowo dalam artikelnya di *Harian Kompas* (09/10/2006) disebut sebagai “*Beijing Consensus*”, yang oleh para pengamat kerap ditempatkan sebagai lawan dari “*Washington Consensus*”. Menurut ahli studi Cina ini, Cina tidak pernah tergiur dengan *Washington Consensus* yang berinti pada matra liberalisasi pasar modal, privatisasi, dan deregulasi. Cina mencoba mencari jalan sendiri, atau meminjam istilah Deng “meraba-raba batu, menyeberangi sungai” (*mozhe shitou, guo he*). Dengan kebijakan *Beijing Consensus* 2004 (pengendalian devisa, pembatasan impor, menjaga nilai tukar mata uang untuk memacu ekspor) pimpinan RRC menabrak *Washington Consensus* 1994.

Secara konseptual, istilah *Beijing Consensus* bukanlah istilah yang lahir dari para pemimpin atau pemikir Cina. Istilah ini dipopulerkan oleh Joshua Coper Ramo, seorang intelektual dari *The Foreign Policy Centre*, Inggris, yang mengagumi apa yang terjadi di Cina. Sebagai hasil ramuan John Williamson, *Washington Consensus* bertitik tolak dari kepentingan para bankir (agar negara pengutang di Amerika Latin membayar utangnya tepat waktu kepada IMF dan Bank Dunia, yang sejak awal telah berperan sebagai agen-agen utama kapitalisme global). *Washington Consensus* menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat, di samping disiplin fiskal, reformasi pajak, dan pengetatan belanja publik. Seperti kita tahu, IMF dan Bank

Dunia hingga kini tetap bersemangat memasarkan *Washington Consensus* ke seluruh dunia, seakan obat mujarab. Yang lebih mengherankan adalah bahwa konsep yang tidak dirancang untuk pembangunan dipakai oleh IMF dan Bank Dunia di mana-mana di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai resep pembangunan.

Sementara *Beijing Consensus* berangkat dari keprihatinan akan warga negara. Pemimpin Cina berusaha untuk memajukan warga negaranya yang masih ketinggalan dalam hal pembangunan. Hu Jintao melontarkan rumus: “tiga dekat” (*san ge tiejin*), dekat dengan realitas, dekat dengan rakyat, dan dekat dengan kehidupan. Memang akan terjadi kegoncangan dalam proses mengejar ketinggalan ini, mungkin juga terjadi instabilitas. Tugas pemerintah adalah menahan goncangan ini dan tetap menjaga stabilitas, termasuk di sini adalah stabilitas kekuasaan Partai Komunis Cina.

Ini tidak berarti bahwa tidak dibuka kemungkinan inisiatif dan kreativitas “dari bawah”. Pemimpin Cina telah mempelajari bagaimana dominasi partai tunggal gagal dalam format sistem politik otoriter satu demi satu (seperti yang terjadi pada KMT di Taiwan atau PRI di Meksiko). Pemerintah Cina tiba pada satu kesimpulan bahwa harus ada keseimbangan antara pembatasan dan inisiatif individu. Maka, sistem pasar tidak dinafikan, tetapi kecenderungan sistem pasar yang mengarah kepada *chaos* harus dikendalikan secara cermat. Walaupun di Cina di banyak aspek tampak seperti negara kapitalis, masih ditemukan “jejak-jejak” peran negara.

Hal ini berlaku juga bagaimana Cina menyambut globalisasi. Sudah sejak awal reformasinya Cina mengumumkan “keterbukaan” (*kaifang*), sebuah rumus yang mencerminkan keberanian Cina untuk memasuki globalisasi. Maka, masuklah aktor-

aktor global ke Cina, mulai dari IMF dan Bank Dunia, WTO sampai MNC raksasa. Meski demikian, Cina tidak kehilangan kebudayaan dan peradabannya. *Washington Consensus* yang bertujuan menyeragamkan seluruh dunia dalam satu rumus ditepis oleh Cina. Jangan terkejut kalau Cina menghasilkan rumus: sosialisme dengan ciri khas Cina (*you zhongguo tese de shehuizhuyi*); atau yang lebih spektakuler: ekonomi pasar sosialis (*shehuizhuyi shichang jingji*).

Artinya, kita dapatkan beberapa kombinasi ala Cina yang belum pernah ada: pasar bebas memang, tapi masih ada intervensi negara; perdagangan bebas juga, tetapi masih ada negara; privatisasi perusahaan negara juga dilakukan, namun dengan tetap mempertahankan industri strategis negara dan tak mengganggu kepentingan nasional; investor asing diundang, tapi jangan masuk terlalu dalam; globalisasi silahkan masuk, tapi tidak total dan terseleksi. Di bidang politik, Partai Komunis Cina masih berdiri di atas semua, tapi ia tetap memberi ruang gerak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam “meraburaba batu”, Cina menemukan jalannya ke seberang dengan hasil yang spektakuler.

Seperti kita tahu, Barat selalu mengajarkan, bahwa pembangunan ekonomi harus disertai pembangunan politik, karena kesejahteraan haruslah merupakan sebuah cermin nyata dari pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara. Inilah tujuan proyek modernisasi Barat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan mempertahankan sistem demokrasi. Namun, kita kerap menyaksikan resep ini di tingkat empirik tidak selalu berjalan mulus dan menjawab harapan rakyat di kebanyakan negara, terutama di negeri miskin dan berkembang. Meminjam “jalan Cina”, salah satu, tampaknya, harus mendahului yang

lain. Cina menempuh jalan berbeda: mendahulukan kemakmuran ekonomi sambil perlahan membangun sistem demokratis. Singkatnya, Cina mengesampingkan demokrasi dan lebih memilih melakukan kebijakan reformasi ekonomi.

Deng Xiaoping telah berhasil membumikan paradigma Mao yang berwatak ideologis-utopis menjadi program modernisasi Cina yang berorientasi empiris-pragmatik. Deng terkenal dengan pameonya, “tak penting kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus”. Sikap pragmatik ini juga sangat dirasakan dalam kebijakan dan komunikasi politik yang berusaha mengombinasikan kebijakan modernisasi ekonomi Cina melalui pendekatan kombinatorik: *top-down* dan *bottom-up*.

Pembebasan dan perubahan cara berpikir Mao yang eksklusif-konservatif menjadi inklusif-partisipatif menjadi babak baru dalam penumbuhan kreativitas individu bangsa Cina. Jadi kaya itu tidak dosa, kata Deng. Sekarang pameo Deng itu sudah lebih berkembang lagi, “menjadi kaya ternyata enak dan disegani dunia”. Ketika Hongkong dikembalikan Inggris ke tangan Cina (1997), dunia khawatir iklim demokrasi, wirausaha, dan penegakan hukum yang telah begitu kuat akan hanyut dan tertelan sistem komunisme. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, yakni berlangsung proses yang amat cepat “Hongkongisasi” Cina daratan. Hongkong jadi model masa depan bagi seluruh bangsa Cina yang dibesarkan dalam inkubator kapitalisme, kebebasan berusaha, penegakan hukum serta kedaulatan individu sebagaimana berlangsung dalam tradisi Inggris.

Yang pasti, proses demokratisasi di Cina rupanya mengambil jalannya sendiri, tidak dilakukan secara gegabah meniru Barat. Negara tetap memegang kendali secara solid, tetapi ruang gerak masyarakat untuk

berusaha justru didorong dengan kebijakan desentralisasi daerah. Individu dan masyarakat didorong untuk mengembangkan "ekonomi inovatif". Mesin produktivitas Cina saat ini adalah buruh yang murah, inovasi, dan menggeliatnya kapitalisme dengan pangsa pasar yang sangat besar. Tidak mengherankan bahwa Cina juga dikenal sebagai tukang bajak kekayaan intelektual terbesar di dunia.

Cina menyadari sepenuhnya bahwa modernisasi tidak selalu menyediakan jalan untuk meraih kedua tujuan pokok yang menjadi mimpi setiap bangsa: kemakmuran ekonomi dan demokratisasi secara bersamaan. salah satu harus mendahului yang lain. Seperti modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang pada umumnya, Cina mendahulukan kemakmuran ekonomi, sambil perlahan-lahan membangun sistem politik demokratis. Cina menempuh jalan ini dengan mengembangkan *East Asian model of state-led economic development*. Model ini menempatkan negara sebagai pemegang kendali kebijakan reformasi ekonomi; sambil perlahan membuka keran demokratisasi. Cina adalah fenomena kontras yang sedang memacu proyek modernisasi untuk menjadi raksasa ekonomi dunia yang tampil elegan di pertengahan abad ke-21 ini.

Jika aktor utama demokrasi adalah rakyat dan tujuan akhir adalah melayani rakyat, maka para elite politik Cina dapat bisa berbangga bahwa modernisasi Cina yang dimulai sejak tahun 1978 secara sangat menakjubkan telah terbukti mampu memakmurkan ratusan juta rakyatnya. Dalam jargon ilmu sosial, prototipe unik sistem politik dan ekonomi Cina saat ini sering disebut sebagai "ekonomi pasar sosialis", "kapitalisme ala Cina" atau "sosialisme dengan karakter Cina".

Namun, yang menganggu dari Cina, gerak menuju puncak kekuatan ekonomi dunia justru di

dimulai dari kendali rezim otoriter yang opresif dan anakronistik. Fenomena Cina jelas di luar kelaziman, amat berbeda dengan pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika, dimana kemajuan ekonomi di negara-negara industri maju ini hanya tumbuh dan berkembang di bawah sistem politik demokrasi. Pola di luar kelaziman ini juga kerap disebut banyak pihak sebagai "kapitalisme dengan didukung penuh negara" atau "pasar kapitalisme tanpa demokrasi" (*China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest*, 2008).

Cina sangat menyadari bahwa demokrasi tanpa kontrol kuat negara hanya akan menghasilkan chaos dan anarki sosial; seperti modernisasi dan reformasi yang dilakukan di banyak negara komunis/sosialis yang buyar bagai gundukan pasir diterpa gelombang. Menjawab kritik media Barat bahwa rezim komunis Cina antide-mokrasi, Jiang Zemin dengan gaya diplomatis (mengutip pendapat Lincoln) menyatakan bahwa inti demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jiang melanjutkan "pemerintah Cina sangat peduli dalam soal kesejahteraan rakyatnya", demikian pernyataan pemimpin utama Cina itu dalam sebuah wawancara khusus dengan harian ternama AS, *New York Times* (2001).

Catatan Reflektif

Suatu tatanan dunia yang berpusat di Cina bakal mencerminkan nilai-nilai Cina, bukan nilai-nilai Barat, demikian menurut Jacques (2007). Kondisi ini sudah membuat posisi Cina makin tegas, dimana tak akan lama lagi Beijing akan mampu mengalahkan New York, renminbi bakal menggantikan dollar, bahasa Mandarin bakal menggeser hegemoni bahasa Inggris, dan sejarah Laksamana Cheng Ho (yang menjelajah dunia menyusur pesisir Timur Afrika) bakal meng-

ganti kurikulum sekolah dunia, tak lagi berkiblat pada pelayaran Vasco de Gama atau Christopher Columbus, penemu benua Amerika.

Nafsu menyebarkan ideologi pasar bebas, demokrasi, HAM, dan humanisme universal yang selama ini menjadi menu makan pagi para pemimpin dunia Timur, bakal menyusut, karena Cina, sang raksasa ekonomi dunia baru, tak memiliki jejak rekan buruk sebagai negeri yang senang mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain. Tapi, sebagai imbalan, seperti diajarkan dalam teori kekuasaan, konsep politik luar negeri, atau strategi diplomasi, Cina akan menuntut—tentu dengan pendekatan *soft power*—agar negara-negara yang lebih kecil dan lemah (baik dalam arti politik, ekonomi, sosial-budaya maupun militer) mengakui secara eksplisit dominasi Cina sebagai "penguasa baru dunia".

Namun, sebelum mencapai semua ini, Cina tentu harus terus memacu pertumbuhan ekonominya dan konsisten mempertahankan kohesi sosial dan kesatuan politik dalam negerinya. Di balik dinamika ekonomi Cina yang bergerak gegap gempita itu, terdapat ketegangan yang mendalam, ketidaksetaraan, dan perbedaan yang bisa menggagalkan jalan Cina menuju hegemoni global. Sepanjang sejarahnya, kekuatan-kekuatan yang melanting dari pusat sudah sering mendorong negeri itu ke jurang konflik, perpecahan, dan disintegrasi.

Stabilitas Cina bertumpu pada kemampuannya menghasilkan manfaat ekonomi yang terus-menerus kepada sebagian besar rakyatnya. Cina satu-satunya negara di dunia yang jika pertumbuhannya kurang dari 8 persen dari tahun ke tahun dianggap berbahaya, karena ia bakal memicu keresahan sosial. Sebagian besar negara-negara lainnya di dunia cuma bisa bermimpi mengalami pertumbuhan sebesar itu. Namun tak sedikit pengamat

yang menyangsikan sustainabilitas pembangunan ekonomi Cina. Sifat rezim politik yang terlalu sentralistik dan otoriter diprediksi akan menjadi titik kerapuhan sistem yang berlaku di Cina. Cina kata mereka yang kontra, cuma mengandalkan penindasan dalam membangun ekonomi negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Masalahnya adalah, semakin sulit bagi Cina mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya yang bergerak terlalu cepat dan terus membesar. Pertumbuhan ekonomi Cina yang demikian dahsyat saat ini bersandar pada mata uang yang *undervalued* dan surplus perdagangan yang besar. Menurut para ahli, semua situasi ini sulit untuk secara sustain dipertahankan Cina. Kenapa? Karena cepat atau lambat, kondisi ini akan memicu konfrontasi yang serius dengan AS (dan Uni Eropa). Jalan keluar dari dilema ini, Cina harus rela menerima laju pertumbuhan ekonominya secara lebih lambat.

Namun, jika Cina berhasil menepis skeptisisme itu serta sanggup mengatasi berbagai rintangan dan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang dominan, globalisasi bakal benar-benar mengambil sifat-sifat Cina. Jargon demokrasi dan HAM bakal kehilangan pamornya sebagai norma global. Itulah berita buruknya. Berita baiknya adalah bahwa suatu tatanan global model Cina bakal menunjukkan respek yang lebih besar akan kedaulatan nasional suatu negara dan toleransi yang lebih besar pada keragaman berbangsa. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dinikmati Cina saat ini bakal memberi inspirasi bagi negara-negara Dunia Ketiga untuk melakukan eksperimentasi berbagai model pembangunan ekonomi.

Tampilnya ekonomi Cina yang kian digdaya, tentu, memang mengguncangkan banyak pihak. Kampiun-kampiun kapitalisme global yang selama ini menikmati pengakuan sebagai

“guru terbaik”, tak lagi bisa dengan mudah menjual dan memaksa negara-negara lain untuk menyerap ide-ide liberalisme ekonomi yang menyandarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar sebagai “barang dagangan”. Sebab, jalan kemajuan Cina yang tampil menguat ternyata tak harus melalui jalan yang di-*nubuwat*-kan sistem kapitalisme; namun ia ternyata bisa melewati jalan “zig zag” ala Cina, *dus* ikhtiar dan kerja keras sebagai fundamen penting dalam membangun ekonomi negara.

Sebagai bangsa multietnis dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar, sulit bagi siapa pun untuk mewujudkan reformasi dan demokratisasi tanpa gejolak jika tidak ada *strong leadership* dan kepemimpinan berkarakter. Cina tak ingin reformasi politik dan modernisasi ekonomi yang dilakukannya berjalan tanpa kontrol yang kuat dari negara. Fenomena Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur telah cukup menjadi pelajaran berharga bagi Cina untuk menepis jalan demokratisasi model *copy paste* ala demokrasi liberal yang menjadi ciri khas masyarakat politik kapitalis Barat.

Mengutip Pete Engardio dalam *Chindia, How China and India Are Revolutionizing Global* (2007), kunci keberhasilan reformasi ekonomi Cina ini terletak pada stabilitas politik domestik yang terus terjaga. Bagi Cina, stabilitas politik adalah harga mati untuk kelanjutan reformasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemimpin Cina percaya bahwa mereka harus memelihara keseimbangan antara reformasi, pembangunan, dan stabilitas. Meski tidak secara eksplisit dinyatakan, Engardio meyakini bahwa kemakmuran Cina di masa mendatang tidak akan direcoki oleh kondisi politik internal mereka. Politik, bagi rezim komunis Cina adalah sebuah konstanta. Para pemimpin Cina meyakini sepenuhnya, jika mereka mampu menjaga

stabilitas politik secara konstan, maka dalam beberapa tahun mendatang Cina akan meneguhkan diri sebagai negara “kapitalis-komunis”; sebuah kombinasi rumit yang hampir mustahil bisa dipadukan oleh negara lain di luar Cina.

Yang pasti, dinamika ekonomi Cina kini tengah mengalami pergeseran signifikan dari sistem ekonomi terpusat-terencana ke sistem ekonomi pasar yang berporos pada kedaulatan dan kreativitas individual; yang sesungguhnya menjadi ciri dari moda ekonomi masyarakat kapitalis. Dengan pergeseran ini, ruang partisipasi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kian diperluas; di samping memanfaatkan etos Konfusianisme bangsa Cina—yang ratusan tahun telah dikenal sebagai bangsa pedagang ulet. Seperti di kemukakan sosiolog Max Weber dan Robert Bellah, tradisi Konfusianisme (Cina) dan Tokugawaisme (Jepang) memiliki etos yang lebih kurang mirip dengan tradisi kapitalisme, yang menimba sumber inspirasi-religiusitasnya dari nilai-nilai Protestanisme.

Bagaimana dengan Indonesia? Mungkinkah kita membangun fondasi ekonomi nasional yang kokoh dengan menengok jalan Cina? Atau kita punya jalan (skenario) lain? Yang pasti, secara historis, sebagai bangsa yang pernah hidup terjajah dalam sistem kapitalisme kolonial, kita pernah punya gagasan ekonomi sosialis model Indonesia, dengan prinsip “ekonomi berdikari” yang pernah ditawarkan Bung Karno. Sementara Bung Hatta juga pernah menawarkan ide koperasi yang dianggapnya lebih sesuai dengan ciri khas ekonomi masyarakat Indonesia. Secara konseptual, kedua ide *the founding fathers* itu lebih mengarah ke prinsip populisme ketimbang sosialisme atau nasionalisme ekonomi.

Yang pasti, terdapat sejumlah alternatif mekanisme ekonomi di luar sistem kapitalisme-neoliberal yang

kini telah dianggap gagal oleh banyak pihak. Pertama, adalah sistem sosialisme. Ide dasar sistem ini menempatkan proses produksi dan pemasaran hasil produksi di bawah kontrol kelas pekerja. Dengan demikian, kelas pekerja tidak hanya menjual tenaganya, tapi juga menguasai dan mengontrol hasil kerjanya. Saat ini, sistem ekonomi sosialis masih beroperasi secara terorganisir di Kuba. Tetapi secara umum, pascaruntuhnya Uni Soviet, sistem ekonomi sosialis telah dianggap sebagai moda ekonomi masa lalu.

Kedua, sistem ekonomi nasionalistik. Kendati tidak secara tegas menolak kapitalisme, secara ideologis sistem ini berwatak anti modal asing. Sekelompok akademisi menyebut sistem ini sebagai "etatisme", istilah lain dari kapitalisme negara. *Blue print* sistem ini adalah pembangunan ekonomi nasional wajib dibimbing, dikawal, dan difasilitasi negara agar tidak terjungkir ke dalam persaingan pasar bebas. Kendati tidak seluruhnya, model ini sepertinya juga menginspirasi gaya pembangunan ekonomi Cina saat ini.

Namun, dimata para pembela sistem pasar (neoliberal), model ini dipandang sebagai *handicap* kemajuan ekonomi karena campur tangan negara yang luas dan *deep* dalam kehidupan ekonomi. Rigiditas ekonomi—yang menjadi konsekuensi model nasionalisme ekonomi—dianggap sebagai biang keladi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara pada medio 1990-an lalu. Campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi menjadi penyebab dari suburnya korupsi, pungli, perilaku disinsentif, dan berbagai bentuk *moral-hazard* lainnya. Korea Selatan masa kediktatoran militer, Taiwan masa Chiang Khai Shek, dan Iran di bawah rejim Mullah adalah prototipe sistem ekonomi bercorak nasionalistik. Dalam batasan yang lebih ketat, model ekonomi Soviet dan

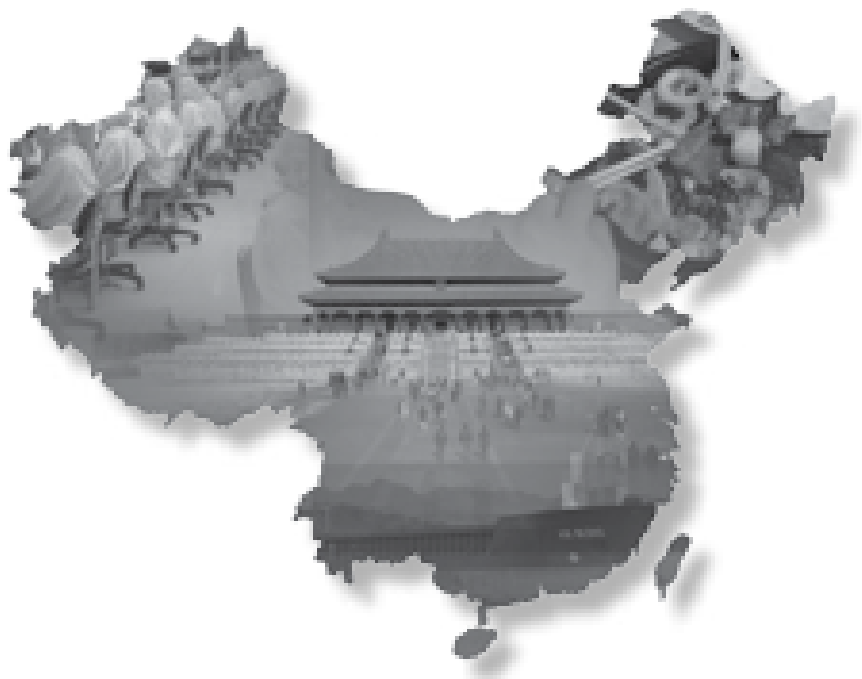
Cina saat ini bisa dimasukkan dalam kategori ini.

Ketiga, sistem ekonomi berwatak populis. Dalam sistem ini, pemerintah yang berkuasa memberi prioritas pada sektor usaha kecil dan menengah dalam negeri. Tetapi, berbeda dengan sistem nasionalistik, sistem ekonomi populistik juga memberi ruang yang relatif luas bagi serikat pekerja dan serikat tani untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi negara. Argentina di masa Peronisme adalah prototipe sistem ini. Saat ini, sistem ekonomi Kuba di bawah Castro, Venezuela di bawah Chavez atau Bolivia di bawah Morales—dengan spirit ekonomi sosialis-Bolivariannya (ALBA) yang menjadi alternatif sistem kerjasama regional negara-negara di kawasan Latin Amerika untuk menentang sistem perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA)—ditengarai banyak pengamat tengah berjalan menuju ke arah sistem ekonomi ini.

Keempat, sistem ekonomi negara kesejahteraan (*welfare state*). Asumsi yang mendasari model ini adalah, pasar kapitalis—dengan logika maksimasi profit-nya—tak mungkin bisa menjawab kebutuhan yang berbau so-

sial, seperti pendidikan dan kesehatan gratis atau jaminan sosial bagi rakyat miskin. Sementara negara dianggap sebagai institusi yang wajib menyejahterakan dan melayani publik. Negeri-negeri di kawasan Skandinavia (seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia) adalah prototipe negara yang hingga kini masih konsisten menerapkan model *welfare state*.

Dalam konteks ACFTA, mungkin kita perlu mengutip argumen Karl Polanyi (1994). Filosof ini mengatakan, "membiarkan mekanisme pasar menjadi satu-satunya penguasa nasib manusia dan lingkungan alam, akan berakhir pada penderitaan dan kehancuran masyarakat itu." Pendapat tersebut agaknya bisa menjadi peringatan dini bagi kita, bahwa persaingan bebas yang sepenuhnya mengandalkan pada kekuatan pasar tanpa regulasi yang jelas, tanpa jaring pengaman sosial bagi warga negara, hanya akan berujung pada penderitaan si lemah dan menguntungkan si kaya. Jangan sampai kepentingan ekonomi dan kedaulatan politik nasional negeri ini dikorbankan hanya demi menjaga gengsi pemerintah di mata dunia internasional. ■





Dilema Politik dalam Menghadapi ACFTA

Apa Pilihan untuk Indonesia?

Ivan Lim¹ dan
Philipp² Kauppert,
FES Jakarta,
Maret 2010



■ Dengan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, ASEAN berharap dapat meningkatkan posisi tawarnya di perdagangan internasional. Sebagai salah satu negara kunci di ASEAN, Indonesia secara aktif telah memainkan peran utamanya dalam mempromosikan ACFTA.

■ Bagi yang mendukung, ACFTA menciptakan peluang bisnis lokal untuk mengeksport lebih banyak barang ke pasar-pasar penting di Cina dan meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral di seluruh wilayah. Bagi yang menolak, ACFTA berpotensi menghancurkan industri domestik dan akan menyebabkan PHK masal.

■ Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dari ACFTA. Upaya-upaya seperti negosiasi ulang beberapa pos tarif, memberikan insentif fiskal untuk industri yang terkena dampak, perbaikan infrastruktur nasional serta reformasi Sistem Jaminan Sosial yang kurang baik.

Sejak 1 Januari 2010, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Cina/ASEAN - *China Free Trade Agreement* (ACFTA), telah sepenuhnya efektif memperkenalkan bebas tarif terhadap 6682 pos tarif mencakup 17 sektor usaha, termasuk 12 di sektor manufaktur dan 5 di pertanian, tambang dan maritim. Hal itu telah memunculkan banyak perdebatan publik yang serius di Indonesia; beberapa pendapat menegaskan sebagai peluang, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai ancaman bagi perekonomian Indonesia. Kelihatannya kecemasan itu beralasan: dari data statistik Kementerian Perdagangan menunjukkan walaupun total jumlah perdagangan antara Indonesia dan Cina meningkat tiga kali lipat dari 8.7 Triliun Dollar Amerika di tahun 2004 menjadi 26.8 Triliun Dollar Amerika di tahun 2008 dengan mencatatkannya sebagai surplus, tetapi terindikasi nyatanya bahwa Indonesia mengalami defisit 3.6 Triliun Dolar Amerika di tahun 2008.

Situasi politik sepertinya tidak mengizinkan untuk menegosiasi ulang ACFTA. Jadi tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, dalam rangka bagaimana menghadapi perjanjian perdagangan bebas ke depan: Apakah dimungkinkan adanya *win-win solution* untuk Indonesia? Pertanyaan awal yang sangat penting dalam pendekatan penulisan artikel ini, juga adalah tentang motivasi serta perspektif Cina dan ASEAN ketika memperkenalkan ACFTA. Kemudian dilanjutkan dengan perspektif Indonesia, tentang fokus pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat-serikat pekerja.

Kesimpulan, menjelaskan beberapa solusi yang ditawarkan para ahli dari berbagai bidang dan juga pemerintah, tentang ketakutan akan dampak negatif dari pelaksanaan ACFTA.

ACFTA, adalah perdagangan bebas terbesar terbesar ketiga setelah Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas di antara kesepuluh negara anggota ASEAN dan Cina. Diperkirakan dengan terbentuknya ACFTA akan menciptakan sebuah kawasan ekonomi dengan 1,7 miliar konsumen, Produk Domestik Bruto (PDB) regional sekitar US\$2 triliun dan perkiraan total nilai perdagangan mencapai US\$1,23 triliun. Penghapusan hambatan perdagangan antara ASEAN dan Cina diharapkan akan dapat memperkecil biaya produksi melalui skala ekonomi, peningkatan perdagangan intra regional dan meningkatnya efisiensi perekonomian. Simulasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat ASEAN menggunakan Proyek Analisis Perdagangan Global (GTAP) menyarankan bahwa ACFTA akan meningkatkan ekspor ASEAN ke Cina sebanyak 48% dan ekspor Cina ke ASEAN sebanyak 55.1% serta berpotensi untuk menaikkan PDB ASEAN 0.9% atau US\$ 5.4 miliar sementara PDB riil Cina meningkat sebesar 0.3% atau US\$ 2.2 miliar. Pemerintah-pemerintah yang mendukung inisiatif ini berharap bahwa dengan pembentukan ACFTA, perusahaan-perusahaan di ASEAN dan Cina akan menjadi lebih efisien dan akan berlanjut pada spesialisasi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan belahan dunia lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkat-

kan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi serta menarik lebih banyak investasi ke dalam wilayah ini.

Gagasan Awal Terbentuknya ACFTA

Gagasan tentang kawasan perdagangan bebas ini pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Cina Zhu Rongji pada November 2000 KTT Cina-ASEAN. Pada Oktober 2001, grup ahli kerja sama Cina-ASEAN mengeluarkan laporan resmi yang merekomendasikan "WTO-konsisten ASEAN-Cina dalam waktu sepuluh tahun". Sebulan kemudian pada November 2001 KTT Cina-ASEAN, para pemimpin relevan mendukung ide grup ahli tersebut dan proses negosiasi pun dimulai secara resmi. Kemudian di KTT Cina-ASEAN kedelapan pada November 2002, para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Cina Zhu Rongji menandatangani "Perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi Komprehensif". Seperti dipaparkan dalam Perjanjian Kerangka ACFTA, kawasan perdagangan bebas yang meliputi perdagangan barang antara Cina dan keenam negara awal anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Singapura and Thailand) akan selesai pada tahun 2010 dan empat negara ASEAN lainnya diharapkan dapat bergabung sepenuhnya di tahun 2015.

1. Perspektif Cina

Strategi diplomatik Cina yang baru berusaha memanfaatkan globalisasi untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kekuasaan Cina. Di Asia Tenggara, "kebangkitan perdamaian" dipromosikan melalui agenda perjanjian perdagangan bebas yang mencerminkan tujuan geoekonomi dan geopolitik - menumbuhkan niat baik di antara negara tetangga, menjaga

1) Ivan Lim adalah mahasiswa Bisnis Internasional, Universitas German-Swiss Jakarta, Magang di FES.
2) Philipp Kauppert, Wakil Direktur FES Kantor Perwakilan Indonesia

kestabilan wilayah dan mengamankan pasar kunci dan bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi Cina. Cina melihat ACFTA sebagai alat untuk merespon tantangan yang timbul akibat dari kompetisi regionalisme dalam perekonomian dunia, merekatkan ekonominya yang sedang bertumbuh dengan Asia Tenggara, mengamankan bahan baku, dan menjamin sebuah lingkungan yang aman untuk mendukung pengaruh Cina yang sedang bertumbuh dan menjaga keseimbangan kekuasaan dengan Amerika dan Jepang.

2. Persepektif ASEAN

Dengan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, ASEAN berharap dapat meningkatkan posisi tawarnya di arena perdagangan internasional. Peningkatan perdagangan kedua belah pihak sejak normalisasi hubungan bilateral ASEAN-Cina di awal 1990an telah melahirkan kepercayaan pembuat kebijakan ASEAN, yang saat ini merasa bahwa ACFTA dapat meningkatkan ekonomi yang dibutuhkan Asia Tenggara yang pernah hancur akibat krisis ekonomi tahun 1997. Hambatan kurangnya sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Cina, menjadi suatu tawaran penting untuk ekspor ASEAN di masa datang. Keuntungan selanjutnya dari ACFTA, ASEAN akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya jumlah turis Cina dikarenakan bertambahnya jumlah kelas menengah di Cina. ACFTA dapat juga dilihat dari pandangan ASEAN sebagai benteng potensial terhadap perilaku permusuhan Cina terhadap wilayah Asia Tenggara. Meskipun kedekatan hubungan antara kedua pihak, Cina tetap menjadi sebuah perhatian untuk negara-negara ASEAN. Pengeluaran biaya pertahanan Cina meningkat dari US\$ 6.06 miliar di 1990 menjadi US\$ 14.6 miliar di 2002. Peningkatan

itu saja sudah menjadi alasan utama yang rasional bagi negara-negara Asia Tenggara untuk melibatkan dirinya secara lebih serius dengan pertumbuhan kekuasaan Cina.

3. Perspektif Indonesia

Sebagai negara terbesar dan terkaya dalam masalah sumber daya, posisi Indonesia sangat penting dan strategis untuk perkembangan seluruh wilayah di Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara kunci di ASEAN, Indonesia juga memegang peran penting dalam mempromosikan ACFTA yang telah dilaksanakan sejak 1 January 2004, melalui program *Early Harvest*, pengurangan tarif untuk produk-produk pertanian.

3.1. Pemerintah, Pendukung ACFTA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatakan pandangannya tentang perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina tidak akan mengancam industri Indonesia, tetapi akan menciptakan banyak kesempatan untuk bisnis-bisnis lokal dapat mengekspor lebih banyak barang-barangnya.

Menteri Perdagangan menekankan bahwa pelaksanaan ACFTA diharapkan meningkatkan perdagangan bilateral ACFTA dan investasi seluruh wilayah. Ini adalah salah satu elemen penting dalam konteks Indonesia sebagai partner strategis Cina. Menteri BUMN menjelaskan bahwa ACFTA menciptakan ekspor di tiga sektor industri, yaitu sektor maritim, makanan dan minuman, kehutanan dan pertanian. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari ACFTA, BUMN telah berencana untuk melibatkan industri baja nasional, yaitu untuk melaksanakan aturan yang lebih ketat terhadap barang-barang import dari Cina.

Di dalam lembaga pemerintahan, terdapat juga suara-suara ketakutan akan dampak negatif dari ACFTA ini.

Berdasarkan survai lapangan di Pasar Tanah Abang dan Cibaduyut, Menteri Koperasi dan UKM memberitahukan bahwa pada dasarnya industri garmen dan sepatu lokal siap bersaing dengan produk luar negeri di ACFTA. Namun, ia juga menyatakan bahwa ACFTA mungkin juga menyebabkan kerugian pada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), berperan sangat penting hampir meliputi seluruh sektor usaha di Indonesia.

Konsekwensi untuk situasi keuangan publik juga kelihatannya meragukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa ACFTA dapat menyebabkan kehilangan negara sebesar Rp. 1,6 triliun dari pendapatan pajak import barang, tetapi kehilangan ini dapat dikompensasi dengan pajak pertambahan nilai barang impor, yang diperkirakan naik 50% dari Rp. 66,3 triliun ke Rp. 102,2 triliun.

3.2. Organisasi Bisnis : Isu kontroversial

Penelitian KADIN menegaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas akan menguntungkan beberapa sektor usaha tertentu seperti produk karet, mineral, mesin dan perlengkapan, tetapi ada beberapa sektor lain yang akan mengalami tekanan seperti sandang dan kulit, dan produk tambang dan logam. Meskipun demikian, pilihan untuk menunda ACFTA bukanlah pilihan bijak karena:

- Daya saing produk Indonesia akan terkikis dari produk negara-negara ASEAN lain, yang lebih murah untuk Cina.
- Produk negara-negara ASEAN pada umumnya menjadi lebih kompetitif karena mereka mendapat bahan baku atau produk setengah jadi dari Cina.
- Bisa saja terjadi bahwa negara-negara ASEAN lain mendapat produknya dari Cina dan kemu-

dian mengeksponnya ke Indonesia. Meskipun itu sebenarnya dilarang, tetapi prakteknya sulit dicegah.

- Umumnya, perjanjian multilateral di bawah payung ASEAN bisa saja memberikan kerangka peraturan yang lebih baik daripada perjanjian bilateral terpisah di antara negara yang terikat perjanjian.

Pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Besi dan Baja (USIA) mengeluh bahwa mereka sudah mempunyai masalah dengan tarif 5% dan pengurangan yang lebih jauh ke tanpa tarif (0%) mungkin saja akan menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Ketua Umum USIA, Fazwar Bujang berjanji untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional jika ACFTA dapat ditunda dua tahun lagi. Selain itu, dinyatakannya bahwa pemerintah akan mengurangi harga dan menjamin ketersediaan energi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofyan Wanandi mengatakan efek buruknya dapat dilihat dalam kurun waktu tiga sampai enam bulan setelah pelaksanaan ACFTA. Ia menambahkan bahwa Indonesia bersama India dan Cina, adalah negara yang telah mampu menghadapi krisis global. Sebenarnya, saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam.

Pandangan optimis dirasakan anggota dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Tetapi, sekretaris eksekutif Asosiasi Textil Indonesia (API) juga berharap agar pemerintah memberikan proteksi terhadap pengusaha lokal yang bisa saja menjadi lemah bila tidak ada pengawasan yang serius dari publik.

3.3. Pandangan Serikat Pekerja dan Kelompok Penentang Lainnya

Menurut Front Perjuangan Petani Indonesia, sekitar dua puluh organi-

sasi serikat pekerja, menyelenggarakan sebuah konferensi pers di Jakarta, yang diorganisir Komando Buruh Revolusioner (KOBAR) menyatakan penolakan mereka terhadap pelaksanaan ACFTA yang dapat menyebabkan PHK masal. Pada acara tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menganggap bahwa penandatanganan perjanjian ACFTA akan melahirkan peningkatan pengangguran dan deindustrialisasi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mathias Tambing menegaskan bahwa dengan masuknya produk-produk Cina berdampak besar terhadap pasar domestik. Tidak hanya murah, tetapi kualitas barangnya juga lebih bagus. Selanjutnya, dia mengasumsikan bahwa dengan pengimplementasian ACFTA akan lebih sesuai bila produktivitas domestik dapat diperbaiki agar dapat mencapai persaingan yang setara.

Direktur Operasional dan Jasa JAMSOSTEK mencemaskan hasil dari ACFTA akan kurang menguntungkan. Dia perkirakan bahwa sekitar 2,5 juta pekerja intensif di sektor sandang dan kulit, industri pertanian berpotensi akan kehilangan pekerjaannya. Hal terburuk, perusahaan telah menyiapkan budget lebih dari RP. 1 trilliun untuk membayar klaim pemutusan hubungan kerja.

Selain menimbulkan dampak sosial dan ekonomi untuk Indonesia, ACFTA juga akan berdampak negatif lebih buruk terhadap lingkungan di masa depan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Berry Nahdian Furqon menerangkan bahwa penerapan perjanjian seperti model ACFTA dapat menimbulkan eksplotasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia. Dia memperjelas bahwa ACFTA akan melegalkan pengerukan batu bara, penebangan liar dan mengakibatkan terjadinya banjir karena bera-

lih fungsinya hutan menjadi kawasan tambang batu bara.

Situasi Dilema Politik

Presiden RI telah menegaskan bahwa dia tidak akan membatalkan perjanjian yang telah dirancang dan disepakati bersama oleh semua anggota negara ASEAN dan Cina beberapa tahun lalu. Tentu saja, sangat penting untuk melindungi kepentingan umum dan mempersiapkan elemen terkait dengan bekerjasama berbagai kementerian.

Dalam rangka memproteksi industri lokal, Komisi 6 DPR-RI, yang membidangi industri dan perdagangan telah meminta pemerintah untuk menegosiasikan kembali 228 pos tarif yang meliputi sektor garmen, perlengkapan rumah tangga dan sepatu. Menteri perindustrian, MS Hidayat mengasumsikan bahwa penerapan ACFTA dapat merugikan perusahaan lokal, dan menyatakan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat mengenai hal ini dan prosesnya tentu akan membutuhkan waktu.

Menteri Koordinasi Perekonomian, Hatta Rajasa telah mengkonfirmasi penegosiasian ulang tersebut dan menyebutkan bahwa pemerintah bersedia membantu untuk memperbaiki infrastruktur dan memberikan insentif fiskal terhadap mereka yang terkena dampak langsung dari persetujuan ACFTA, dalam rangka menunjang daya saing yang lebih baik.

"Kami mendukung penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) sebagai antisipasi menghambat masuknya barang dibawah standard ke negara ini, kata Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam mencari solusi berkaitan dengan persaingan global dan antisipasi PHK besar-besaran akibat penerapan ACFTA, diumumkankannya bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memonitor dan mendeteksi PHK yang tidak memenuhi

prosedur dan hukum yang berlaku.

Perspektif lain dalam menganalisis dampak negatif ACFTA ini, juga telah diungkapkan, Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi 9 DPR RI, pada satu pertemuan diskusi tentang ACFTA yang diorganisir Jaringan Sosial Demokrat Asia. Dia mengusulkan bahwa solusi terbaik adalah melaksanakannya dengan benar dan mereformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang Undang-Undanganya telah dikeluarkan sejak 2004. Sistem jaminan sosial yang efektif dapat menjadi ukuran publik yang positif untuk melindungi masyarakat dan pekerja dari potensi bahaya PHK masal sebagai konsekuensi dari perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Menanggapi kecemasan diantara pekerja akan potensi PHK akibat ACFTA ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), bersama dengan beberapa Organisasi Buruh bersepakat membentuk Forum Bipartit Nasional (FBN). "Semua menyadari bahwa kelangsungan usaha harus dirawat dalam rangka menjamin kepastian kerja bagi semua pekerja dari perusahaan", kata Sofyan Wanandi. FBN sudah seharusnya membangun saling percaya dengan tujuan membangun usaha yang lebih sehat dan kondisi kerja yang lebih baik yang secara umum berkontribusi untuk jaminan sosial.

Kesimpulan

Pertanyaan arahan yang dikemukakan di awal artikel ini, yaitu apakah dimungkinkan adanya *win-win solution* untuk Indonesia melihat kenyataan bahwa Indonesia menghadapi dilema politik dalam penerapan ACFTA. Menjawab pertanyaan tersebut, pandangan berbeda yang dipaparkan di dalam artikel ini dapat dibagi menjadi tiga kategori:

Pemerintah mendukung penerapan ACFTA, walaupun kenyataannya Menteri Perindustrian menunjukkan

kecemasannya tentang bahaya menyakitkan bagi perusahaan-persuahan domestik.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terbagi menjadi pihak pemenang dan yang kalah akibat ACFTA. Pada akhirnya, tergantung pada bidang usaha mana yang mampu bersaing dan akhirnya akan meraup keuntungan dan usaha mana yang mungkin mendapatkan dampak buruk.

Serikat Buruh dan aktor lain yang menolak ACFTA, khususnya mereka yang bergerak di industri intensif yang memiliki kesempatan minim untuk bertahan dalam persaingan dengan produk Cina yang murah harganya.

Situasi politik saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh terhadap perjanjian dan tidak bermaksud membatalkannya. Sementara, baik kelompok pendukung dan yang tidak setuju berusaha merancang beberapa tindakan pencegahan untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari ACFTA. Dari sisi pemerintah telah berusaha mengajukan negosiasi ulang dengan pemerintah Cina terhadap beberapa pos tarif. Fokus lainnya terkait dengan peningkatan perbaikan infrastruktur nasional dan memberikan insentif fiskal terhadap perusahaan yang terkena dampak. Dari sisi pengusaha dan serikat buruh, sebagian dari mereka memutuskan untuk memperkuat kolaborasi dengan pembentukan Forum Bipartit Nasional. Harapan terbentuknya FBN adalah untuk menemukan solusi dalam memperbaiki hubungan industrial di Indonesia.

Masalah utama di industri Indonesia adalah infrastruktur yang tidak mencukupi, seperti krisis listrik di tahun 2008 yang mengakibatkan penderitaan di kalangan komunitas ekonomi dan usaha. Hal itu bisa saja menjadi salah satu penyebab

mengapa nilai import Indonesia ke Cina meningkat sedangkan eksport turun. Berdasar pada presentasi dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Cina 2006-2009, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap import perlengkapan listrik dari 400 ke 800 juta dollar AS, generator pemanas dari 45 ke 300 juta dollar AS dan beberapa barang kapital yang turut berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan dengan Cina. Pada sebuah diskusi publik di Universitas Indonesia, 9 Februari 2010, Beliau berpendapat bahwa investasi terhadap barang modal akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Indonesia di masa depan. Untuk itu, defisit neraca perdagangan dapat dianggap sebagai perhatian minor yang mendapatkan dampak ekonomi yang positif di dalam jangka panjang.

Nana Jiwayana, Kepala Litbang Departemen Ekonomi dan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), berkesimpulan bahwa ancaman ACFTA seharusnya tidak menjadi sesuatu momok yang menakutkan; alangkah lebih baik bila hal itu dianggap sebagai sebuah cambuk dalam upaya perbaikan. Mengingat potensi kesempatan yang yang dipaparkan di dalam artikel ini, mungkin ACFTA dan membangkitkan efek-efek positif untuk pengembangan perekonomian Indonesia. Tantangan terbesar terdapat pada potensi dampak negatif seperti deindustrialisasi dan pengangguran. Pabila dampak negatif tersebut dapat diatasi dengan ukuran publik seperti adanya sistem jaminan sosial yang efektif dan investasi besar-besaran untuk memperbaiki infrastruktur nasional serta pendidikan, maka Indonesia bisa saja menciptakan *win-win solution* dan mampu mendapatkan keuntungan dari dampak positif ACFTA dalam jangka panjang. ■



“Kekuatan pro-demokrasi yang paling konsisten (*the most consistently pro-democratic forces*) adalah kelas buruh, yang mendorong ke depan (*pushed forward*) dan berjuang untuk (*fought for*) demokrasi menentang perlawanan dari aktor-aktor kelas lainnya.”

(Rueschemeyer, Stephens, dan Stephens, 1992)

Kekuatan Buruh dalam Proses dan Pola Demokrasi di Amerika Latin

Nur Iman Subono



Perdebatan yang selalu muncul, baik dalam tataran teoritis maupun realitas empiris, jika kita bicara proses demokrasi adalah, siapa yang sebetulnya menjadi agen demokrasi dalam proses transisi yang mendorong perubahan politik tersebut? Banyak agen memang yang terlibat di dalamnya, dan ini artinya agen tersebut tidak bersifat tunggal. Tapi sejauh ini tidak terlalu banyak pihak yang menyebut kelas buruh sebagai salah satu agen dalam proses demokratisasi tersebut, khususnya jika kita merujuk pada kasus negara-negara Amerika Latin. Sebetulnya mempertanyakan peran kelas buruh dalam demokrasi dan demokratisasi adalah masalah klasik dan penuh perdebatan. Awalnya

pertanyaan dan perdebatan tersebut beredar sekitar pengalaman historis pada abad 19 dan awal abad 20 dengan merujuk pada mandala negara-negara Eropa Barat. Tapi kemudian pembicaraan ini kembali mengemuka ketika muncul negara-negara yang mempromosikan "demokrasi" (*new democracy countries*) pada tahun 1970an dan 1980an, khususnya di wilayah Amerika Latin.

Pertanyaan yang muncul di sini adalah, mengapa kelas buruh?¹ Apa benar memang kelas buruh memiliki peranan dalam proses demokratisasi? Untuk kasus negara-negara Amerika Latin, kebanyakan studi dalam ilmu politik yang ada selama ini umumnya masih melihat transisi ke arah demokrasi yang terjadi di wilayah tersebut merupakan produk dari peranan elite dan kepemimpinannya. Kemudian ini juga berkaitan dengan pentingnya pelembagaan politik, dan sebagai akibat pilihan strategis untuk pembaharuan demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi di sini, dalam berbagai variasi kajian yang ada, semata-mata hanya dilihat sebagai hasil rekayasa (*crafted product*) dari elite-elite yang tercerahkan (*enlightened elites*), jalan yang bergantung pada lembaga-lembaga politik yang ada, dan hasilnya pun sudah bisa diprediksi. Ini yang kemudian kita kenal sebagai "pendekatan interaksi strategis" (*strategic interaction approach*), pendekatan yang sangat menaruh perhatian pada negosiasi (*negotiating*) atau tawar-menawar (*bargaining*) dari para pemimpin atau elit.²

Tulisan ini mencoba memaparkan peran dan posisi buruh dalam proses dan pola demokrasi di Amerika Latin, dengan merujuk pada studi kasus beberapa negara besar di Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina, Peru, Chili, dan Uruguay. Adapun tujuan tulisan ini untuk memberikan pemahaman atau penjelasan yang lain (alternatif) terhadap proses-proses perubahan

sosial-politik di negara-negara tersebut, dengan tidak hanya semata-mata mengandalkan pada peran dan posisi elit sebagai agen demokrasi, tapi juga memberikan tempat pada kelas, serikat dan gerakan buruh sebagai agen demokrasi yang lain.

Politisasi, Aliansi dan Organisasi Korporatis Buruh

Kelas dan serikat buruh di negara-negara Amerika Latin boleh dibilang sangat terpolitisasi sejak awal kelahirannya. Meskipun ada perbedaan di masing-masing negara, tapi secara umum kelompok-kelompok serikat buruh memiliki asosiasi yang lekat dengan partai politik, pemimpin yang kuat, dan pemerintah. Memang dalam beberapa kasus, kelahiran mereka pada awalnya memang menampilkan watak mandiri atau otonom. Tapi dalam perkembangannya, mereka biasanya mengalami kooptasi atau bahkan represif. Yang belakangan ini sangat menonjol pada era pemerintahan militer atau birokratik-otoritarian di Amerika Selatan di mana kekuatan buruh, dan kekuatan "Kiri" pada umumnya disingkirkan dari arena politik.³

Dengan demikian, mengutip Howard Wiarda, Ketua Departemen Hubungan Internasional di University of Georgia, kekuatan buruh di Amerika Latin, yang mewujud dalam serikat buruh, menampilkan wataknya yang partisan (*partisan unionism*), dan memiliki 3 ciri dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi.⁴ *Pertama*, serikat buruh di Amerika Latin tampil lebih awal dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, dan ini bahkan dalam banyak kasus, kehadirannya jauh lebih awal dibandingkan serikat buruh di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Menurut Gary W. Wynia, profesor politik Amerika Latin di Carleton College, kalangan buruh pada dasarnya adalah korban dari keterbelakangan pembangunan di

wilayah Amerika Latin. Mereka baru memperlihatkan sedikit kekuatannya dan mulai mendapatkan pengakuan dari sistem politik yang ada ketika industri dan sektor swasta mulai berkembang di negara-negara besar di wilayah tersebut.⁵ *Kedua*, kehadiran populasi buruh di wilayah ini ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah buruh yang mendapat upah yang relatif baik di industri. Ini artinya, kelas pengusaha (pemilik modal) atau industriawan dalam situasi ini relatif mudah untuk mendapatkan atau menggantikan buruh-buruh yang melakukan protes, mogok atau unjuk rasa kecuali buruh-buruh tersebut, melalui serikat buruh, mendapatkan proteksi dari partai politik atau pemerintah. *Ketiga*, serikat-serikat buruh di wilayah ini umumnya sangat dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang datang dan berkembang di Eropa Barat. Awalnya mereka mulai muncul pada tahun 1890an di wilayah ini, dan ini dimotori oleh kalangan buruh migran dan kalangan intelektualnya, yang dari mereka kemudian ideologi-ideologi seperti marxisme, sosialisme, anarkhisme, dan sindikalisme, menjadi bagian dari perjuangan aksi kolektif mereka. Meskipun demikian, kembali mengutip Gary, keberadaan serikat buruh yang semakin berkembang di mana-mana mendapatkan penolakan dan tantangan yang keras dari kelas penguasa yang melihat buruh ini sebagai "pengacau" (*intruder*) yang memaksakan kehendak mereka sendiri.⁶

Nampaknya dalam perkembangan berikutnya, kalangan serikat buruh, khususnya para pemimpinnya, menyadari bahwa mereka sukar untuk bisa menembus ke lingkaran elit kekuasaan. Ini kemudian yang menjadi perdebatan dalam gerakan buruh pada tahun 1930an dan 1940an, dan akhirnya mengerucut pada pemahaman politik bahwa bukan ideologi buruh yang penting tapi generasi baru

politisi yang berasal dari "luar" diri mereka, yang tidak memiliki basis politik konstituen yang kuat, berpaling pada kelas buruh untuk dijadikan basis politik, dan sebagai imbalannya buruh mendapatkan proteksi dalam jaringan paternalistik kekuasaan politisi. Pilihan politik seperti ini yang kemudian melahirkan para pemimpin politik atau politisi seperti Getulio Vargas di Brazil dan Juan Perón di Argentina, yang membangun koalisi populis di mana kekuatan buruh diberikan tempat yang baru dalam politik nasional. Dengan kata lain, mengutip Gavin O'Toole, profesor di University of London, buruh di Amerika Latin merupakan komponen utama dari organisasi korporatis karena keterkaitan yang kuat antara buruh dengan negara melalui kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya kebijakan industrialisasi. Hubungan keduanya berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan populis di mana di satu sisi, negara memberikan keuntungan kesejahteraan kepada buruh melalui mekanisme klientelistik, dan di sisi yang lain, sebagai balasan, buruh memberikan dukungan politik kepada kalangan elit politik.⁶ Kepemimpinan dalam serikat buruh biasanya sangat ditentukan oleh negara, atau jika melalui pemilihan oleh kelas buruh biasanya kandidatnya sudah melalui proses penyeleksian secara politik oleh negara (*political reliability*).⁸

Kemudian, dalam tahun-tahun belakangan ini, ada krisis ekonomi di mana inflasi adalah masalah utama yang selalu mendera wilayah Amerika Latin. Karena itu menjadi sangat krusial bagi serikat-serikat buruh mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok politik di luar dirinya, untuk melakukan negoisasi dengan pemilik modal atau kelas pengusaha yang berkaitan dengan upah, jam kerja dan berbagai hak-hak normatif buruh lainnya, dan ini seringkali di

"back-up" oleh pemerintah.

Serikat Buruh, Kekuatan Politik?

Memang berbeda dengan serikat buruh Amerika Serikat misalnya, yang tetap berkorporasi sebagai kekuatan yang relatif independen dalam politik, maka di Amerika Latin, kekuatan buruhnya menyerahkan sebagian besar otonominya pada saat mereka menerima paternalisme politisi populis. Hukum atau aturan-aturan populis dan praktek politik yang ada dan berlangsung menjadikan serikat buruh sebagai bagian dari negara yang sentralistik dan korporatis. Memang hukum atau aturan-aturan legal yang berkembang di Amerika Latin umumnya mengharuskan serikat-serikat buruh yang ada harus terdaftar secara resmi di pemerintah sebelum mereka bisa melakukan "tawar-menawar" secara kolektif dengan pihak industriawan atau pemilik modal. Kementerian tenaga kerja mengawasi dan mengontrol secara ketat aksi kolektif serikat buruh.

Meskipun demikian, kita tidak bisa mengatakan sepenuhnya bahwa serikat buruh kemudian sebagai kekuatan politik yang mandul. Posisi dan peran mereka relatif bergaung secara politik, khususnya dalam proses transisi demokrasi. Tanpa mengabaikan berbagai variasi transisi yang ada di Amerika Latin, kita bisa mencatat beberapa faktor atau alasan di balik pentingnya serikat buruh (*trade unions*) dalam proses demokratisasi.⁹ *Pertama-tama*, kita melihat bahwa buruh menduduki tempat yang khusus diantara kekuatan-kekuatan sosial lainnya di dalam masyarakat sipil (*civil society*), dan ini sangat berkaitan sekali dengan kemampuannya yang besar dalam mendorong, memperluas dan mengefektifkan mobilisasi massa pada kejadian-kejadian yang kritis dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Secara umum

mereka memiliki jaringan yang terorganisir melalui serikat buruh (*trade unions*) yang relatif permanen, dan menyediakan sebuah wadah untuk melakukan demonstrasi atau protes terhadap otoritas atau kekuasaan. Biasanya basis massa mereka memiliki kepentingan khusus yang relatif sama, dan secara politik mereka terikat dalam identitas kolektif yang sudah berakar kuat dalam sejarah mereka. Selanjutnya, yang *kedua*, berbeda dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya seperti gerakan mahasiswa, kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan gereja, atau kelompok forum warga, maka gerakan buruh dapat mengacaukan pembangunan atau stabilitas ekonomi secara langsung melalui pemogokan atau aksi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Karenanya, serikat buruh sebagai organisasi yang memiliki kekuatan, langsung maupun tidak, hampir selalu menjadi sasaran menarik bagi kekuatan oposisi politik. Posisi buruh dalam ekonomi baik di tingkat perusahaan atau tempat kerja maupun nasional, menyebabkan pemerintahan otoritarian pun harus sangat hirau terhadap kekuatan buruh ini, dan lebih-lebih lagi dalam proses transisi demokrasi yang terjadi. Serikat buruh biasanya memang berfungsi sebagai organisasi kepentingan kolektif yang posisinya dalam masyarakat sipil dan ekonomi menyebabkan mereka memiliki keterkaitan atau hubungan dengan negara, apa pun karakter dari hubungan tersebut.

Umumnya banyak rejim otoritarian yang akan dengan mudah memilih untuk menghancurkan atau menghapuskan keberadaan dari peran dan posisi buruh dalam aktivitas politik mereka. Tapi, dan ini merupakan faktor yang *ketiga*, kinerja manajemen, teknologi, dan pemasaran pada Abad 20, menyediakan wadah bagi buruh dengan berbagai kesempatannya, mengacaukan proses produksi, dan

karenanya upaya untuk menekan dan merepresif mereka hanya melahirkan akibat yang kounter-produktif. Atas dasar itu juga, dibarengi dengan berbagai tekanan dan kesepakatan internasional, rejim otoritarian biasanya memberikan ruang bagi keberadaan beberapa organisasi buruh dan membangun beberapa mekanisme saluran untuk menampung aspirasi buruh. Meskipun demikian, rejim otoritarian umumnya membebani organisasi dan mekanisme yang ada dengan berbagai pengawasan dan pembatasan, dan ini disebabkan tidak hanya semata-mata serikat buruh dapat menjadi basis koordinasi aksi buruh yang akan mengganggu proses produksi, tapi juga mereka dapat menjadi wadah bagi "platform for the action" dari oposisi politik terhadap rejim otoritarian.

Terakhir, dan ini kelihatannya sangat menarik untuk dipertimbangkan, adalah hak-hak buruh dan kebebasan untuk berorganisasi dan berasosiasi biasanya merupakan fokus perhatian dari agenda mereka. Meskipun serikat buruh pada umumnya menghadapi keterbatasan dalam soal struktur internal, kepemimpinan, dan juga jangkauannya yang lebih efektif, tapi biar bagaimana pun serikat buruh merupakan sebuah institusi yang dapat mewakili kepentingan strata sosial yang lebih luas. Usaha-usaha yang mereka lakukan selama ini pada kenyataannya tidak hanya memiliki arti bagi para anggotanya, tapi juga memberikan keuntungan bagi segmen lain dalam masyarakat yang tidak memiliki organisasi sendiri. Beranjak dari sana, kita bisa melihat pentingnya kelas buruh dan serikat buruh sebagai bagian dari proses demokratisasi, atau persisnya dalam transisi dari rejim otoritarian ke arah pemerintahan yang lebih demokratis.

Pola Demokratisasi dan Kekuatan Buruh

Ada 3 premis utama di balik transi-

si demokrasi, dan peranan kelas buruh di dalamnya, jika kita merujuk pada apa yang dikatakan Eva Rana Bellin, Associate Professor di Departemen Pemerintahan di Harvard University.¹⁰ Menurutnya, 3 premis tersebut adalah sebagai berikut; (1) demokrasi pada dasarnya bukanlah sebuah kebutuhan yang evolusioner maupun sebuah hasil yang konjungtur, tapi merupakan produk dari perjuangan (*struggle*) di mana kekuatan-kekuatan sosial memainkan peran utama; (2) kepentingan (*interest*), dan bukan pencerahan, yang mendorong perubahan rejim; dan (3) diantara berbagai kepentingan yang menjiwai masyarakat secara politis, kepentingan material (*material*) adalah yang utama. Artinya, kelas-kelas sosial, termasuk kelas buruh di dalamnya, menjadi pendorong atau agen demokrasi jika kepentingan ekonomi mereka benar-benar di atas kekuasaan otoritarian.

Merujuk pada kasus di negara-negara Amerika Latin, mobilisasi kekuatan buruh umumnya termanifestasikan dalam serikat buruh dan afiliasinya dengan partai politik. Dalam proses transisi demokrasi di Amerika Latin, secara mudahnya kita bisa melihat posisi dan peran serikat buruh bergerak dalam dua tahapan yakni,¹¹ (a) sumbangannya dalam delegitimasi dan destabilisasi rejim otoriter dan karenanya peranan serikat buruh dalam memprovokasi proses transisi; dan (b) peran oposisi buruh selama proses transisi itu sendiri. Pada tahapan yang pertama, aksi kolektif buruh, sebagai bagian dari masyarakat sipil, merupakan faktor krusial dalam mempertanyakan legitimasi pemerintahan otoriter. Bahkan, dalam banyak kasus, kekuatan buruh yang mencegah konsolidasi pemerintahan otoriter. Sementara itu, dalam tahapan berikutnya, peran dan posisinya bervariasi di tiap negara. Kadang mereka memainkan peran dominan, secara politik, tapi lain

waktu hanya sebagai kekuatan pinggir dalam proses-proses politik yang terjadi.

Atas dasar itu, mengutip Ruth Berins Collier, profesor perbandingan politik di University of California, Barkeley, mengajukan 3 pola demokratisasi di Amerika Latin di mana aksi kolektif buruh memiliki posisi dan peran di dalamnya.¹² Pola pertama, kita menyebutnya sebagai pola *destabilization/extrication*. Dalam pola demokrasi ini, kekuatan buruh relatif berhasil melakukan destabilisasi dan delegitimasi pemerintahan otoriter, dan membuka jalan untuk tegaknya sistem demokrasi. Sebaliknya, pemerintahan yang ada tidak memiliki kemampuan untuk mengformulasikan respon yang memadai untuk menanggapi tekanan-tekanan politik dari bawah (*no incumbent project*). Jika kita mengutip James Mahoney dan Ruth B. Collier, dengan menunjuk kasus negara Argentina dan Peru, kelas buruh adalah aktor anti-otoritarian utama dan awal yang penting.¹³ Mereka mengemuka dan memimpin berbagai bentuk protes dan pemogokan terhadap pemerintah. Sebaliknya, rejim penguasa tidak cukup tangguh untuk melakukan berbagai manuver politik untuk menjawab tantangan dan tekanan tersebut. Di sini, alih-alih aksi kolektif buruh tampil dalam ruang publik yang dibuka dari atas, tapi justru kekuatan buruh sendiri yang mampu menciptakan ruangnya sendiri, dan memprovokasi terjadinya "keretakan" dalam elite penguasa. Ini artinya, alih-alih terjadi negosiasi elit, proses transisi demokrasi diwarnai dengan mundur atau ambruknya kekuasaan yang ada.

Pola kedua disebut sebagai pola *transition game*. Berbeda dengan pola sebelumnya, rejim penguasa di sini mengadopsi projek legitimasi dengan mempromosikan politik atau arena elektoral yang terkontrol dan terbatas, dan mendapatkan konsensi dari

kalangan partai oposisi. Ini artinya sebagian proses politik yang terjadi merupakan "elite strategic game" antara kelas penguasa dan kalangan oposisi. Meskipun demikian, tekanan politik dari massa, yang terwujudkan dalam protes dan oposisi elektoral menjadi faktor signifikan dalam memaksa rejim penguasa untuk mendorong proses demokrasi. Pada titik ini, mobilisasi massa yang dimotori gerakan buruh menjadi faktor kunci dalam mendorong proses demokrasi dan memastikan proses tersebut tetap berada jalurnya (*keep it on track*), dan juga memastikan legalisasi partai-partai yang berbasis buruh. Brazil dan Uruguay adalah dua negara yang memperlihatkan bagaimana dalam proses transisi demokrasi berjalan dengan pola ini. Pola ketiga disebut sebagai pola *parallel track*. Apabila pada pola yang pertama, kita melihat bagaimana pemerintah yang berkuasa tidak memiliki proyek transisi perubahan politik (*national project*), dan pada pola yang kedua, pemerintah justru sudah menjalankan proyek transisi tersebut, maka pada pola yang terakhir ini, kita bisa mengatakan bahwa pemerintah memiliki proyek transisi tersebut, dan berupaya untuk mengawalinya. Tapi sementara itu pada saat bersamaan, gerakan dan serikat buruh merupakan salah satu aktor oposisi yang kuat meski mereka tidak mampu sepenuhnya untuk mempercepat, membatalkan atau mengubah agenda proyek transisi pemerintah yang dihela dari atas (*from above*). Singkatnya, ada jalan dan tahapan yang non-interseksi (*nonintersecting*) antara proyek transisi pemerintahan otoritarian dengan gerakan dan serikat buruh. Kita bisa menyebut Chili sebagai negara yang dalam proses politiknya memperlihatkan berada dalam pola ini.

Argentina dan Peru

Pembangunan ekonomi dan ur-

banisasi di Argentina, dalam catatan sejarah, menurut Gavin O' Toole, telah melahirkan kondisi yang lebih kondusif dalam pembentukan gerakan dan serikat buruh yang sangat kuat dan dominan jika kita bandingkan dengan gerakan dan serikat buruh di negara-negara Amerika Latin lainnya.¹⁴ Meskipun demikian, kembalinya Argentina ke jalan pemerintahan demokrasi pada 1983, setelah lebih dari 10 tahun di bawah pemerintahan militer, banyak dianalisa oleh kalangan akademisi sebagai akibat semata-mata karena kekalahan perang rejim militer dalam Perang Malvinas (Falkland) dari Inggris. Padahal, jika kita merujuk pada Ruth B Collier, ada dua faktor yang merujuk pada peran dan posisi serikat buruh yang krusial dalam proses transisi demokrasi tersebut. *Pertama*, berbagai aksi kolektif buruh, dalam bentuk demonstrasi, protes maupun manuver-manuver politik lainnya, memiliki dampak terhadap perpecahan dalam tubuh internal militer sendiri, terutamanya antara kelompok-kelompok militer "garis keras" (*hard-liner*) versus "garis lunak" (*soft-liner*). Bahkan berkaitan dengan itu, faktor yang kedua, gerakan dan serikat buruh juga yang memiliki saham politik mendorong faksi-faksi dalam kalangan militer mengambil keputusan untuk terlibat dalam Perang Malvinas (Falkland), yang kita tahu kemudian, menjadi bumerang politik bagi rejim penguasa sendiri.

Namun tumbuh dan berkembangnya gerakan dan serikat buruh Argentina yang kuat sebetulnya bisa dilacak ke belakang sekitar tahun 1940an pada saat Juan Peron merebut kekuasaan menjadi presiden di bawah dukungan kelas buruh. Karenanya kalangan buruh ini lebih dikenal sebagai kalangan Peronis. Ada aliansi yang kuat antara buruh dan *Partido Justicialista*, dan ini yang disebut sebagai hubungan korporatis. Mereka

menjadi pemain utama dalam politik Argentina sampai 1976 pada saat kudeta militer terjadi terhadap pemerintahan Juan Peron. Edward C. Epstein, profesor politik di University of Utah, pernah mengatakan bahwa hadir dan berkuasanya kekuatan militer pada dasarnya merupakan respon terhadap aktivisme buruh. Lebih persisnya ia mengatakan sebagai berikut¹⁵:

"Citra sebuah pemerintahan yang lemah atas belas kasihan serikat buruh meyakinkan kalangan militer akan kebutuhan untuk melakukan tindakan politik untuk mengakhiri apa yang menurut mereka sebagai situasi yang tidak bisa diterima."

Apa yang dikatakan ini sebetulnya menyiratkan dua hal sekaligus. *Pertama*, memang benar ada hubungan korporatis yang kuat antara Peron dan serikat buruh. Ini diperlihatkan pada saat Peron dalam kekuasaan, gerakan dan serikat buruh mampu memobilisir dukungan dan memberikan suaranya. Sebaliknya, apabila kekuasaan bukan datang dari kalangan Peronis, maka gerakan dan serikat buruh mampu mengorgansir berbagai aksi kolektif extra-parlementer untuk melakukan tekanan-tekanan politik ke otoritas kekuasaan, dan menciptakan berbagai instabilitas di dalam negeri. Alasan instabilitas nasional ini yang menjadi dasar yang kuat bagi kudeta militer 1976 untuk duduk dalam kekuasaan secara permanen. Kita tahu bahwa masa-masa pemerintahan junta militer Argentina adalah masa-masa gelap bagi gerakan-gerakan sosial-politik, termasuk buruh di dalamnya. Banyak dari mereka yang dibunuh, ditahan, hilang (*disappear*) dan lari ke luar negeri (*political exile*). Faktor yang *kedua*, kembali mengutip Gavin O'Toole, sebetulnya hubungan korporatis antara Peron dan Peronis tidak mampu sepenuhnya berhasil dalam arti negara tidak mampu sepenuhnya mensubordinasikan kekuatan buruh di bawah kendali.¹⁶ Kita mencatat, khususnya

1973-1976, ada berbagai protes dan demonstrasi buruh yang sifatnya masif menentang otoritas kekuasaan, dan ini memberikan gambaran bahwa ada jurang politik yang semakin jauh, dan bahkan tidak terdamaikan antara Peron sendiri dan kalangan buruh Peronis.

Di bawah pemerintahan junta militer, sama seperti yang dialami negara-negara Amerika Selatan lainnya, gerakan dan serikat buruh menjadi sasaran tembak. Pada dasarnya watak rejim militer biasanya sangat anti terhadap politik buruh. Tapi sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, pemerintahan junta militer tidak homogen (faksionalisasi) dalam peran, posisi dan kebijakannya, terhadap pembangunan ekonomi dan tertib politik. Faksionalisasi dalam tubuh militer, antara kalangan militer "garis keras" (*hard-liner*) versus "garis lunak" (*soft-liner*), sebetulnya berkaitan dengan persoalan bagaimana menangani masalah perburuhan di Argentina, dan ini sangat berkaitan dengan model pembangunan ekonomi. Jenderal Videla sebagai pimpinan junta militer, mewakili "garis keras", mempromosikan pembangunan nasional dengan basis liberalisasi ekonomi dan pasar bebas. Sudah bisa diduga bahwa model seperti ini sangat tidak ramah pada kekuatan buruh. Sebaliknya, pada periode presiden Jenderal Viola, yang merepresentasikan militer "garis lunak", mengusung model hubungan korporatis negara dan buruh. Di sini kita mesti menyebut nama Jenderal Liendo, sebagai menteri perburuhan, yang mencanangkan strategi korporatis dalam kebijakan perburuhannya. Kita tahu, berdasarkan catatan sejarah, kekuasaan junta militer Argentina kembali ke "garis keras" di bawah presiden Galtieri, dan salah satu agendanya adalah mengkohekan kembali kekuatan militer. Tapi kehancuran junta militer terlihat jelas ketika diputuskan terlibat perang melawan

Inggris dengan mengambil alih kepulauan Malvinas yang diklaim sebagai milik Argentina. Kekalahan telak dalam perang tersebut kemudian menyeret ambuknya junta militer, dan ini merupakan awal kembalinya lagi pemerintahan sipil. Ada dua pendapat dalam kaitannya dengan keterlibatan militer dalam Perang Malvinas.¹⁷ Yang *pertama*, perbedaan pandangan dalam menjawab bagaimana menangani atau mengatur tertib politik dalam masyarakat telah melahirkan perpecahan dalam tubuh militer. Sementara itu, gerakan dan serikat buruh, yang merupakan bagian utama dari gerakan pro-demokrasi, mampu mencegah militer melakukan konsolidasi kekuasaan, dan akhirnya ini justru menciptakan destabilisasi dengan semakin mendorong dan mengintensifikan perpecahan dalam tubuh militer. Ini artinya, keputusan untuk terlibat dalam Perang Malvinas merupakan hasil resultanse politik dari perpecahan dan dinamika dalam tubuh militer. *Kedua*, gerakan protes dan demonstrasi buruh pada dasarnya secara langsung memang diarahkan pada mempromosikan kebijakan para jenderal untuk melakukan invansi militer ke kepulauan Malvinas. Peran dan posisi protes dan demonstrasi yang dimotori buruh pada gilirannya telah membuat destabilisasi rejim militer dengan tidak hanya menunjukkan tidak adanya dukungan sosial ke pemerintah, tapi juga memperlihatkan ketidakmampuan rejim militer untuk membangun tertib sosial dan politik dalam masyarakat.

Bagaimana dengan gerakan dan serikat buruh di Peru? Hampir serupa ceritanya dengan pengalaman Argentina. Mereka menjadi pemain utama, disamping kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya, dalam memaksa mundurnya kekuasaan otoritarian dan mempromosikan proses transisi demokrasi. Mereka juga melakukan mobilisasi massa, mendorong per-

pecahan di kalangan militer, dan memaksa otoritas kekuasaan membuka koridor-koridor politik (reformasi) yang lebih luas bagi masyarakat.

Tapi berbeda dengan Argentina, kekuasaan militer di Peru pada awalnya justru tidak dalam peran dan posisi melakukan represif pada kekuatan buruh. Otoritarian-militer "tahap pertama" (*first phase*) di bawah Jendral Velasco (1968-1975), memiliki karakter populis dan mendorong pengorganisasian serikat buruh. Sebaliknya, kekuasaan militer menargetkan sasarannya pada musuh bebuyutan mereka yakni partai APRA (*Alianza Popular Revolucionaria Americana*). APRA sebagai partai populis memiliki kaitan yang kuat dengan organisasi-organisasi buruh di Peru. Karenanya, sebagai strategi anti-Aprista (pendukung APRA), militer kemudian mensponsori pembentukan serikat buruh tandingan dengan membangun SINAMOS (*Servicio Nacional de Apoyo a la Mobilización Social*) di bawah kendali Jendral Leónidas Rodríguez, yang kemudian diikuti dengan pembentukan serikat buruh tandingan CTRP (*Central de Trabajadores de la Revolución Peruana*), dan bahkan juga memberikan angin pada organisasi buruh dari sayap partai komunis, CGTP (*Confederación General de Trabajadores del Perú*). Tujuannya untuk mengimbangi kekuatan buruh CTP (*Confederación de Trabajadores del Perú*) yang memiliki afiliasi dengan partai APRA. Sebetulnya modus operandi politiknya sama saja yakni dengan membangun organisasi korporatis, kekuasaan militer berupaya untuk menetralsir elemen-elemen radikal dari sektor buruh, dan melemahkan kekuatan partai politik dalam serikat buruh.¹⁸

Tapi upaya-upaya politik seperti ini dalam jangka panjang ternyata justru menjadi bomerang politik bagi kekuasaan pemerintahan militer. Upaya pengalihan konsentrasi kekuatan serikat buruh CTP menjadi CTRP ti-

dak berjalan mulus. Banyak kalangan buruh, karena persoalan ekonomi dan politik, ditambah lagi dengan sakitnya Jendral Velasco, pada akhirnya justru mereka mengalihkan dukungannya menjadi bagian dari kekuatan oposisi. Jendral Velasco kemudian mundur dari kekuasaan (1975) dan digantikan dengan pemerintahan otoritarian-militer "tahap kedua" (*second phase*) di bawah Jendral Morales Bermúdez. Berbeda dengan rejim sebelumnya, meski dengan masalah-masalah sosial-politik dan ekonomi yang relatif sama, menjalankan kebijakan ekonomi yang ortodox dan sangat anti-buruh. Tapi sudah bisa diduga, pemerintahan ini sebetulnya lemah, tidak solid, dan terisolasi, dan karenanya sekitar Maret 1976, rejim ini berupaya menjalin kekuatan dengan kalangan sipil yang berasal dari kalangan bisnis. Pada saat bersamaan, rejim mulai membuka dialog dengan kalangan partai politik "tradisional" untuk ikut mendorong proses transisi demokrasi di Peru.

Tapi karena ekonomi semakin memburuk sekitar Juni 1976, dan ini akhirnya memaksa rejim militer untuk mengumumkan bahwa Peru dalam "state of emergency". Akibat turunannya, mobilisasi buruh semakin intensif, dan puncaknya adalah pemogokan total buruh pada 19 Juli 1977 (yang pertama di Peru sejak 1919 dan terbesar yang pernah ada di Peru). Pemogokan ini menyatukan seluruh serikat buruh yang ada, dan bersamasama mendorong proses demokrasi di Peru. Bahkan sampai sebelum pemilu anggota parlemen pada Juni 1978, pemogokan dan mobilisasi massa masih tetap berjalan, khususnya yang terbesar pada Februari, April dan Mei 1978.¹⁹ Puncaknya, dengan terpilihnya anggota parlemen melalui pemilu, militer dipaksa kembali ke barak, dan pada titik itu juga kemudian gerakan dan mobilisasi massa mengalami penurunan karena salah satu tujuan utama gerakan massa adalah meng-

mebalikan militer kembali ke barak. Meskipun demikian, gerakan buruh dan afiliasinya dengan partai politik terus berjalan, dan terutama APRA yang secara historis memiliki kedekatan dengan CTP. APRA sendiri memenangkan 35% suara pemilih untuk anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.

Brazil dan Uruguay

Proses transisi demokrasi di Brazil, sejalan dengan yang dilalui Spanyol, jika kita mengutip J. Samuel Valenzuela dari University of Notre Dame, mengambil bentuk *reforma*. Bentuk ini merupakan proses evolusi menuju demokratisasi institusi-institusi politik dari rejim otoritarian sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan dan kejadian-kejadian internal.²⁰ Sementara itu, kekuatan buruh sendiri memiliki peran dan posisi yang "biasa-biasa saja" (*less important*) dalam pengertian dampaknya terhadap proses transisi itu sendiri. Mereka adalah bagian dari kekuatan oposisi yang lebih besar, dan membantu juga dalam mempromosikan proyek pemerintah, serta memberikan sumbangan dalam perluasan kontestasi politik. Yang belakangan ini terlihat semakin menonjol pada situasi politik di mana parta-partai utama yang ada secara historis tidak memiliki program (*non-programmatic*) dan partai-partai yang beraliran marxisme dilarang atau diberangus. Pada titik ini sebetulnya organisasi-organisasi serikat buruh bisa memainkan perannya, meski tidak terlalu signifikan secara politik.

Di Brazil, mengutip Ruth B. Collier, langkah pertama untuk melakukan keterbukaan politik diinisiasikan secara otonomi oleh rejim junta militer sendiri yang mendapatkan kekuasaan pemerintah melalui kudeta militer 1964. Pada mulanya militer berkuasa, mereka berupaya untuk melegitimasi posisi dan peranannya yakni dengan melakukan pemilihan

presiden tidak langsung, kemudian 1965, melakukan pelembagaan sistem kepartaian yang terbatas dengan basis dua partai politik yang diakui dan disetujui secara resmi, dan dua tahun kemudian melahirkan konstitusi baru.²¹ Sebagaimana sering terjadi dalam pemerintahan militer di Amerika Selatan, ada rivalitas dinamika di tingkat elit antara kalangan militer. Tahun 1968, kalangan militer "garis keras" (*hard-liner*) menguasai arena kekuasaan, dan sudah bisa diduga apabila seluruh strategi dan kebijakan politik mengarah pada tindakan represif, kontrol dan pembatasan politik. Sebagai sasarannya adalah kalangan oposisi seperti kalangan politisi, mobilisasi populer, dan termasuk radikalisme buruh dan perlawanan gerilya bersenjata. Sebaliknya, tahun 1974, kalangan militer "garis lunak" (*soft-liner*) memegang kendali kekuasaan, dan di bawah presiden Jendral Geisel, mereka menjalankan liberalisasi politik yang dikenal dengan sebutan "decompression". Ini dicirikan dengan kebijakan yang mendorong keterbukaan politik (*political opening*) di mana cara-cara represif mulai dikurangi, dan ada ruang buat kritik politik yang lebih besar, serta dimungkinkannya aktivitas politik yang lebih luas.

Pada titik ini, gerakan buruh mulai membangun dirinya kembali, dan masuk arena politik dengan memperbarui militansi dan aktivitas pemogokan. Bisa dibilang pada awal 1970an gerakan dan serikat buruh mengembangkan "bentuk baru perlawanan" (*new form of resistance*). Bahkan kemudian, mengutip Margaret E. Keck, profesor politik di Yale University, ini merupakan awal dari kelahiran dari "new unionism" yang merujuk pada gerakan buruh yang tidak hanya sekedar mendorong pemogokan buruh, tapi juga melibatkan berbagai sektor dari gerakan buruh dalam gerakan yang secara organisasional bersifat heterogen, dan juga memi-

liki tujuan-tujuan dari komponen-komponen serikat buruh yang tidak selalu sama.²² Mereka tampil dengan ciri-ciri yang berbeda dengan serikat buruh sebelumnya sebagai berikut; (a) para pemimpin serikat buruh mempromosikan kontak yang intensif diantara mereka sendiri; (b) banyak dari mereka menuntut revisi undang-undang perburuhan secara substansial dengan tujuan membangun serikat buruh yang otonom dari keterlibatan negara, dan ini juga melibatkan hak untuk mogok secara legal, dan hak untuk negosiasi dengan kalangan pemilik modal, industriawan atau kelas pengusaha tanpa intervensi negara; dan (c) untuk pertama kali, mereka mengambil resiko untuk terlibat dalam tindakan yang militan seperti dalam pemogokan, meski berhadapan dengan pemerintahan yang sangat represif.²³

Memang gerakan dan serikat buruh bukan satu-satunya, dan juga bukan yang utama, dari gerakan oposisi di Brazil yang semakin dominan pada akhir 1970an. Meskipun demikian, sebagaimana dicatat Noronha, beberapa pemogokan buruh pada akhir 1970an, merupakan tantangan langsung kepada pemerintahan militer, dan bisa dilihat sebagai upaya-upaya politik untuk memperluas jangkauan transisi, baik memperluas perjuangan pro-demokrasi melampaui arena elektoral maupun menantang mekanisme kontrol korporatis pemerintah.²⁴ Buat gerakan buruh sendiri pada awalnya mereka berbasis di pabrik atau perusahaan, tapi kemudian gerakan protes mereka yang dimotori buruh ini kemudian bergerak ke dalam dua arah sekaligus.²⁵ *Pertama*, gerakannya kemudian meluas melampaui serikat buruh itu sendiri karena sudah melibatkan buruh-buruh yang berbasis di komunitas (*communities*) dan lingkungan warga (*neighborhoods*). Dari 1978-1979, berbagai pemogokan yang dimotori "new unions" telah meng-

galvanisasikan gerakan oposisi yang semakin luas di mana gereja dan komunitas semakin terlibat di dalamnya. *Kedua*, gerakannya pun sudah melampaui isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak normatif buruh seperti upah, jam kerja dan kondisi kerja. Pada titik ini, gerakan buruh kemudian memanfaatkan ruang politik yang ada untuk membangun dan mengorganisir PT (Portuguese: *Partido dos Trabalhadores*) yang merupakan partai politik sosialis, dan yang dikemudian hari PT telah menjadi gerakan sayap "Kiri" yang terbesar dan juga terpenting di Brazil, dan bahkan di Amerika Latin. Berbagai pemogokan yang dilakukan gerakan dan serikat buruh, khususnya di 1980, yang dimotori oleh buruh metal, telah menjadikan gerakan pro-demokrasi yang sangat dominan, dan ini pada akhirnya yang "mempinggirkan" kalangan militer "garis keras" keluar dari arena politik, dan pada akhirnya memuluskan proses transisi demokrasi di Brazil.

Sementara itu pemerintah Uruguay, sama seperti negara-negara Amerika Selatan yang pernah dikuasai oleh junta militer, ternyata memiliki tradisi yang sedikit berbeda dalam soal kudeta militer. Ruth B. Collier lebih merasa pas menyebutnya untuk kasus Uruguay sebagai "two-sided process of the erosion of democracy" dan "the gradual take over by a military gaining increasing autonomy as it conducted an 'internal war' against urban guerrillas."²⁶ Sama seperti di Brazil, di Uruguay pemerintah junta militer sendiri yang memiliki komitmen untuk mempromosikan proyek transisi melalui penjadwalan pemilu dan pembentukan rejim baru. Dalam upayanya tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan partai-partai politik "tradisional" sebagai protagonisnya, dan meminggirkan kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya dari arena politik. Tahun 1973, satu hari setelah militer akhirnya memastikan

sudah peran dan posisi kekuasaannya setelah membekukan parlemen. Dalam perkembangannya, menjelang saat-saat berdirinya pemerintahan sipil yang lebih demokratis pada 1985, memang terlihat jelas bahwa Uruguay sebagaimana beberapa negara di Amerika Selatan, melalui transisi di mana "kesepakatan formal" (*formal agreement*) merupakan hasil negosiasi antara junta militer dengan para pemimpin kalangan oposisi pro-demokrasi.

Tapi saat bersamaan, kita pun tidak bisa menutup mata, ada "cerita dari bawah" (*the story from below*) di mana gerakan buruh memainkan peranan politiknya. Organisasi atau serikat buruh saat itu bisa dilihat sebagai aktor pro-demokrasi yang pertama kali melakukan perlawanan pada saat kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya sedang dalam keadaan "tiarap politik." Untuk waktu selama 2 minggu, ratusan buruh menguasai pabrik-pabrik, melakukan sabotase dan melambatkan ekonomi nasional sampai kemudian militer melakukan tindakan represif, penangkapan dan bahkan penghilangan terhadap aktivis pro-demokrasi, khususnya aktivis buruh. Sejak saat itu aktor-aktor sosial-politik yang ada di masyarakat sipil sunyi senyap untuk waktu selama kurang lebih 7 tahun. Tapi kemudian kebangkitan kembali gerakan pro-demokrasi, dan terutamanya gerakan dan serikat buruh berkaitan dengan 3 kejadian politik yang terjadi di Uruguay.²⁷

Pertama, proyek transisi junta militer melalui plebisit 1980 dengan melahirkannya undang-undang yang tetap memberikan tempat pada kekuasaan militer. Proyek dari atas ini ditolak masyarakat bukan adanya perlawanan dari gerakan oposisi yang hampir mustahil bisa muncul pada saat itu karena suasana represif kekuasaan, tapi karena masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara

itu, gerakan buruh mengambil jalan "clandestine" untuk memobilisasi masyarakat untuk plebisit tersebut yang dirancang secara curang, berkolaborasi dengan partai-partai tradisional, dan dalam suasana represif.

Kedua, pada pemilihan pendahulu untuk memilih calon dari masing-masing partai politik pada 1982, kembali lagi masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk tidak mendukung faksi-faksi parpol yang berkolaborasi dengan junta militer. Lagi-lagi gerakan buruh memiliki saham politik dalam ikut menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang ketiga, liberalisasi politik yang terbatas yang dicanangkan junta militer, dan didukung partai-partai politik "tradisional", biar bagaimana pun pada akhirnya tetap memberikan ruang-ruang publik pada bangkitnya kembali gerakan sosial (*civil society in action*) sebagai gerakan oposisi. Berawal April 1982, *cooperativists* menjadi elemen kunci dalam gerakan sosial. Awalnya bergerak dengan berbagai isu spesifik, dan kemudian pada akhir tahun semua elemen sudah menyatu dengan bendera "anti-otoriterisme." Saat bersamaan gerakan buruh juga mengikuti arus besar oposisi tersebut dengan pertama-tama bergerak di tingkat pabrik atau perusahaan, dan kemudian bergerak terus sampai tingkat nasional pada saat PIT-CNT (*El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores*) sebagai satu-satunya *central sindical* untuk gerakan buruh di Uruguay terbentuk. Sebetulnya, CNT sudah pernah dibentuk tapi sejak junta militer berkuasa di 1973 status dan posisinya menjadi ilegal. Tahun 1982, gerakan buruh mengorganisasi diri kembali dengan membentuk *Plenario Intersindical de Trabajadores* (PIT). Memiliki kaitan dengan pergerakan "akar rumput", PIT memiliki kapasitas untuk memobilisir buruh, dan

terlihat nyata pada peringatan "May Day" 1983 dengan melakukan demonstrasi besar dengan peserta sekitar 100 hingga 200 ribu buruh. Sehingga kita bisa katakan bahwa demonstrasi buruh merepresentasikan kualitas perubahan dalam proses transisi demokrasi di Uruguay.

Chili

Alan Angel, Direktur Pusat Amerika Latin, University of Oxford, melihat gerakan dan serikat buruh di Chili mengalami masa kejayaannya sebagai aktor ekonomi dan politik sudah sejak 1960an hingga terjadinya kudeta militer 1973 di bawah Jendral Pinochet terhadap pemerintahan sosialis di bawah Allende. Sebelum 1973, serikat buruh di Chili menikmati tingkat yang relatif tinggi dari demokrasi internal dan partisipasi.²⁸ Meskipun serikat-serikat buruh yang ada di Chili, seperti tipikal gerakan dan serikat buruh umumnya di Amerika Latin, memiliki ketergantungan yang relatif tinggi pada partai-partai politik, tapi dampak negatifnya relatif berkurang karena adanya pluralisme "kesetiaan politik" (*political allegiances*). Yang terjadi mereka semakin terlibat dalam rencana ekonomi dan sosial pemerintah, dan mempertimbangkan diri mereka sebagai "juru bicara" (*spokepersons*) untuk masyarakat urban, dan sampai derajat tertentu, kalangan petani miskin.²⁹ Di bawah pemerintahan "Kiri-Tengah", buruh mendapatkan hak-hak buruh dan memiliki "collective bargaining system" di mana negara memiliki peran yang signifikan sebagai mediator. Sementara itu selama tahun-tahun kekuasaan "Unidad Popular" (*Popular Unity*) di bawah Allende, serikat buruh memiliki hubungan yang erat dengan partai-partai sayap "Kiri", dan memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan swasta yang dinasionalisasi oleh negara.

Namun cerita tentang kejayaan

gerakan dan serikat buruh di Chili berakhir menyusul terjadinya kudeta militer, dengan nama sandi "Jakarta Operation", pada 11 September 1973.³⁰ Boleh dibilang setelah terbentuknya pemerintahan militer di bawah Jendral Pinochet, serikat buruh kemudian kehilangan peranannya. Rejim militer bertindak keras terhadap organisasi atau serikat buruh karena kedekatannya dengan "Unidad Popular" dan partai-partai sayap "Kiri" lainnya. Federasi serikat buruh yang utama, Federasi Buruh Bersatu (*Central Única de Trabajadores*), diberangus, dan banyak dari pimpinannya dibunuh, ditahan atau melarikan diri (*political exile*). Pemerintah kemudian memperkenalkan undang-undang perburuhan yang baru (*new labor code*), yang melarang pembentukan federasi serikat buruh, secara keras membatasi, atau bahkan melarang hak untuk mogok, dan memberikan kebebasan industriawan atau pemilik modal untuk merekrut dan memecah buruh, dan termasuk menangani perselisihan perburuhan dengan cara mereka sendiri. Dalam eksperimen neoliberalisme yang dijalankan pemerintah, yang merupakan aliansi militer, teknokrat dan modal, buruh semakin tidak memiliki tempat dalam politik nasional. Mereka mengalami subordinasi secara politik, dan marjinalisasi secara ekonomi.

Meskipun demikian, dalam pola demokrasi ini, ada proyek transisi yang dijalankan pemerintah di bawah Pinochet, dan pada saat bersamaan, meski bersifat non-interseksi, ada jalan yang dihela oleh gerakan dan serikat buruh. Sebetulnya proyek transisi yang di hela dari atas ini adalah upaya Pinochet untuk meninstitutionalisasi kekuasaan militer dan kepemimpinan pribadinya sendiri. Seluruh upaya ini memiliki tujuan agar seluruh proses transisi yang kemudian dijalankan ini sebagian besar harus bergerak di sekitar keputusan dan kebijakan Pinochet

sendiri. Setelah yakin peran dan posisinya sudah mapan, maka Pinochet berupaya mendorong perubahan tapi tidak lebih dari "protected democracy" di mana dalam proses tersebut kekuatan-kekuatan sosial-politik bergaris "Kiri" disingkirkan, dan militer ingin tetap mempertahankan peran dan posisi kekuasaannya.³¹

Jendral Pinochet sebagai seorang diktator memperkenalkan konstitusi 1980 dalam upayanya untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, dan menjadikan institusi militer sebagai organisasi yang tetap solid di bawah pimpinannya. Ini proyek dari atas yang memungkinkan dirinya akan tetap berkuasa hingga 1989. Setelah 1989, kekuasaannya sangat bergantung pada hasil referendum yang akan diadakan 1988 untuk memastikan apakah dirinya masih dikehendaki hingga 1997, atau jika tidak, maka harus diadakan pemilu untuk memilih presiden dan anggota Kongres. Kita pun kemudian tahu bahwa ada tekanan internasional, khususnya presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, dan partai-partai di tingkat internasional seperti Kristen Demokrat dan Sosialis Internasional, atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Chili. Demikian juga tekanan keras dari ILO (*International Labour Organization*) sebagai salah satu organ PBB yang bergerak pada isu-isu perburuhan, dan AFL-CIO (*American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations*) sebagai pusat serikat buruh nasional, federasi buruh terbesar di Amerika Serikat yang terdiri dari 56 serikat buruh nasional dan internasional (AFL-CIO merepresentasikan keanggotaan lebih dari 11 juta buruh berdasarkan statistik nasional pada Juni 2008).³² Sejak kudeta tahun 1973 hingga 1982, boleh dibilang kekuasaan pemerintahan militer di bawah Pinochet berjalan mulus tanpa adanya gerakan atau kekuatan oposisi yang berarti. Akibat perubahan

struktural ekonomi Chili, khususnya dengan ambruknya industri-industri besar tradisional yang sangat bergantung pada subsidi dan proteksi tarif negara, dan dikombinasikan dengan tingginya tingkat pengangguran urban di Chili, dan Amerika Latin pada umumnya, selama 1980an, menyebabkan anjloknya jumlah buruh yang ada, apalagi yang tergabung dalam serikat buruh. Tahun 1987, hanya sekitar 10% dari total angkatan kerja yang tergabung dalam serikat buruh, dan kira-kira 20% berasal dari buruh industri. Hanya di wilayah-wilayah tertentu seperti pertambangan tembaga (*copper mining*) misalnya, ada sekitar 60% buruhnya masuk serikat buruh, dan mereka merupakan serikat buruh yang independen.

Meski demikian, kalangan buruh yang paling menderita pada era tersebut, justru mulai mengkonsolidasikan diri kembali bahkan sudah sejak 1977. Mereka dengan cepat bergabung kembali, dari berbagai faksi dan sektor yang berbeda, dengan basis yang sama yakni oposisi terhadap kebijakan perburuhan dan ekonomi pemerintah yang tidak pro-rakyat, khususnya buruh. Sementara itu, kekuatan gereja, melalui *Vicaria de la Pastoral Obrera*, memberikan dukungan moral, material dan politik kepada para pemimpin serikat buruh, baik dari kalangan "Kiri" maupun Kristen Demokrat (*Partido Demócrata Cristiano*), dan menciptakan ruang untuk rekonsiliasi dan persatuan diantara kelompok-kelompok di dalam gerakan buruh.³³ Adalah "*Confederation of Copper Workers*" (*Confederación de Trabajadores del Cobre--CTC*), yang menjadi motor dari protes dan pemogokan buruh besar-besaran pada 1983 dengan koordinasi "*National Workers' Command*" (*Comando Nacional de Trabajadores--CNT*). Sementara kalangan buruh yang moderat pun mulai mengkonsolidasikan diri mereka dalam "*Workers' Democratic*

Federation" (*Central Democrática de Trabajadores--CDT*) yang pro-PDC (*Partido Demócrata Cristiano*).³⁴ Pada akhirnya, hasil dari dua arus besar ini, antara negosiasi elit dan gerakan pro-demokrasi di mana buruh ada di dalamnya, memang menghasilkan banyak kemajuan untuk demokrasi di Chili, meski harus diakui juga bahwa proses transisi demokrasi tersebut lebih banyak dikontrol oleh pemerintah dibandingkan kekuatan-kekuatan sosial-politik pro-demokrasi.

Catatan Penutup

Kekuatan aksi kolektif buruh di Amerika Latin memang tidak bisa dipandang sebelah mata, meski watak dan keberadaannya tidak sepenuhnya bisa relatif otonom sebagaimana yang muncul dan berkembang di Amerika Serikat dan Eropa (Barat). Karenanya tidak mengherankan juga, dalam banyak kasus di Amerika Latin, seringkali kelas buruh menjadi begitu konservatif terhadap perubahan, atau menjadi agen demokrasi yang tidak sepenuhnya maksimal dalam proses perubahan politik.

Jika kembali merujuk kepada Eva Bellin, ada dua variabel utama yang harus diperhatikan jika kita bicara mengenai buruh, serikat buruh atau gerakan buruh dalam kaitannya dengan proses demokratisasi.³⁵ Yang pertama adalah ketergantungan pada negara (*state dependence*). Ketergantungan pada negara di sini merujuk kepada sampai sejauh mana serikat buruh bergantung pada negara dalam hal dukungan politik, sumber keuangan, dan bantuan organisasional. Pada kenyataannya, kita memang lebih sering menemukan bahwa buruh di banyak negara, dengan kemampuannya dalam tindakan kolektif (*collective action*) untuk membangun pengaruhnya, lebih banyak bergantung pada negara dibandingkan sektor-sektor modal swasta.³⁶ Akibatnya mudah ditebak, ketergantungan ini

menyebabkan serikat buruh menjadi ragu-ragu dalam mendorong proses demokratisasi, apalagi jika negaranya memiliki watak otoritarian seperti yang biasanya terjadi di negara-negara Amerika Selatan pada periode 1960an hingga 1980an. Pada umumnya, serikat buruh seperti ini (*state-dependent organized labor*) memiliki keyakinan bahwa kepentingan mereka lebih terpelihara dengan baik melalui hubungan kolaboratifnya, dan bukan konfrontatif, dengan negara.

Yang *kedua* kita menyebutnya sebagai posisi aristokrat (*aristocratic position*). Ini merujuk kepada sampai sejauh mana serikat buruh yang memiliki keuntungan ekonomi (*economically privileged*) berhadapan dengan masyarakat pada umumnya (*general population*). Apabila serikat buruh memiliki banyak keuntungan ekonomi yang berasal dari negara, maka sebagai konsekuensi logisnya, mereka tidak terlalu memiliki rasa dan tindakan solidaritas (*dis-solidarity*) dengan kelompok-kelompok massa yang tidak terorganisir seperti kalan-

gan sektor informal dan pertanian. Pada titik ini kita melihat bahwa posisi aritokrat buruh adalah konsekuensi logis dari intervensi politik daripada sebuah refleksi dari kekuatan pasar yang sejati. Serikat buruh umumnya memandang kepentingannya lebih nyaman dalam relasinya dengan negara (meskipun tatanan kelembagaannya bersifat otoriter dan korporatis) daripada mempromosikan institusi-institusi yang membuat negara lebih akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (disebut sebagai demokrasi).

Memang benar bahwa gerakan dan serikat buruh dewasa ini di Amerika Latin, sebagaimana yang dicatat UNDP, masih merupakan aktor yang berperan dalam menyetujui berbagai kebijakan, mengorganisir demonstrasi dan mempengaruhi agenda-agenda publik. Bahkan dalam era kuatnya pasar bebas, korporatisme serikat buruh masih bisa sejalan dengan neoliberalisme di bawah kondisi-kondisi tertentu dengan intervensi negara, dan ini yang kemudian disebut sebagai neokorporatisme (*neocorporatism*).³⁷

Tapi, sebagaimana sudah disinggung sedikit sebelumnya, gerakan dan serikat buruh tidak selalu mencerminkan kepentingan massa secara luas. Sebaliknya, jika kita kembali mengutip Gary W. Wynia, kalangan elit dalam kelas buruh lah yang lebih sering diuntungkan dengan relasi-relasi kekuasaan yang ada dan sedang berjalan. Karenanya dalam banyak kasus, sebagaimana dalam logika elit di mana saja, mereka lebih peduli pada kepentingan dan proteksi mereka sendiri daripada perbaikan kesejahteraan yang lebih luas terhadap mereka yang bukan menjadi bagian dari organisasi buruh.³⁸ Jika demikian masalahnya, menempatkan gerakan dan serikat buruh di Amerika Latin sebagai salah satu agen demokrasi, boleh-boleh saja karena faktanya memang begitu dalam banyak studi kasus. Tapi yang lebih penting kita jangan sampai terjebak mengglorifikasi dan memistifikasi gerakan dan serikat buruh secara berlebihan sebagai aktor yang berperan besar dalam proses demokrasi (*nis*).

Catatan Belakang :

1 Dalam tulisan penggunaan kata kelas buruh, kekuatan buruh, dan serikat buruh digunakan secara bergantian dengan pemahaman yang kurang lebih sama. Memang lebih mudah sejauh ini kita langsung menunjuk orang-orangnya dalam arti siapa itu buruh itu, dan juga organisasi-organisasi dalam arti serikat buruh di lapangan daripada kita harus mendefinisikannya secara lengkap, apalagi tuntas, dalam tataran akademis siapa buruh dan serikat buruh itu. Jika pada akhirnya kita harus mendefinisikannya, maka hampir niscaya bahwa definisi itu biasanya merujuk pada tradisi marxian yang memang biasanya dikenal dengan pembicaraan mengenai kelas buruh tersebut. Meskipun kita pun tahu bahwa jika kita merujuk pada bab tentang 'kelas' dalam buku Das Capital, ternyata hanya beberapa baris saja yang bicara mengenai kelas, dan kemudian ditutup dengan catatan editorial 'manuskrip ini hanya sampai di sini'. Secara sederhana, kelas buruh (*working class*) adalah mereka yang tidak memiliki dan menguasai alat-alat produksi, dan karenanya mereka dipaksa atau terpaksa oleh keadaan seperti itu untuk menjual tenaganya untuk bekerja dan bisa hidup. Singkatnya, mereka tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga atau tubuhnya. Mereka bisa bekerja, baik secara manual maupun non-manual, atau kedua-duanya. Sebagai konsekuensinya, masih menurut tradisi marxis, kelas buruh ini berhadapan-

berdasarkan perbedaan ekonomi dan politik, dalam pertentangan kelas dengan kelas pemilik modal (kelas kapitalis). Sementara itu, kita bisa mengartikan serikat buruh sebagai organisasi yang menerjemahkan, mempromosikan dan memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kolektif dari buruh, terutama dalam hubungannya dengan pengusaha atau pemilik modal, tapi juga dalam kaitannya dengan pemerintah atau negara.

2 Lihat John Higley dan Richard Gunther (eds), *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Untuk kasus Chili ada baiknya lihat Verónica Montecinos, "Economic Policy Elites and Democratic Consolidation", Working Paper #191 - May 1993

3 Untuk lengkapnya lihat buku klasik yang ditulis oleh Guillermo O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics* (Berkeley: University of California, 1973)

4 Howard J. Wiarda dan Harvey F. Kline (eds), *Latin American Politics and Development*, sixth edition (Westview Press, 2007), hal. 45-46.

5 Lihat Gary W. Wynia, *The Politics of Latin American Development*,

- third edition (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hal. 59-63.
- 6 Ibid., hal. 59-60.
- 7 Gavin O'Toole, *Politics Latin America* (Person Education Limited, 2007), hal. 211-214.
- 8 Lihat J. Samuel Valenzuela, "Labor Movements in Transitions to Democracy: A Framenwork for Analysis", Working Paper Series # 104, The Helen Kellog Institute for International Studies – June 1988.
- 9 Ibid.,
- 10 Eva Rana Bellin, "Contingent Democrats: Industrialist, Labor, and Democratization in Late Developing Countries", *World Politics*, Vol. 52, No. 2, January 2000, hal. 177-178.
- 11 Lihat Ruth B. Collier dan James Mahoney, "Labor and Democratization: Comparing The First and Third Waves in Europe and Latin America", *Institute of Industrial Relation Working Paper Series*, no. 62, May 1995, hal. 34-35.
- 12 Lihat Ruth Berins Collier, *Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hal.
- 13 Collier dan Mahoney, loc.cit., hal.
- 14 O'Toole, op.cit., hal. 211.
- 15 Edward C. Epstein (ed.), *Labor Autonomy and the State in Latin America* (Boston and London: Unwin Hyman, 1989), hal. 305.
- 16 O'Toole, op.cit., hal. 211-212.
- 17 Collier dan Mahoney, loc.cit., hal. 41-43.
- 18 Collier, op.cit., hal. 117-118.
- 19 Ibid., hal, 118.
- 20 Valenzuela, loc.cit, hal. 1-2.
- 21 Collier, op.cit., hal. 134-135.
- 22 Margaret E. Keck, "The New Unionism in the Brazilian Transition" dalam Alfred Stepan (ed), *Democratizing Brazil: Problems of Transition and Consolidation* (Oxford: Oxford University Press, 1989), hal. 260-261.
- 23 Ibid., hal. 260.
- 24 Collier, op.cit., hal. 136.
- 25 Ibid., hal. 137-138.
- 26 Ibid., hal. 138-140.
- 27 Collier dan Mahoney, loc.cit., hal. 52-54.
- 28 Alan Angel, "Unios and Workers in Chile during the 1980s", dalam Paul W. Drake dan Iván Jaksic (eds), *The Struggle for Democracy in Chile (1982-1990)* (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1991), hal. 188-190.
- 29 Ibid., hal.188.
- 30 Lihat Arief Budiman, *Jalan Demokratis ke Sosialisme: Pengalaman Chili di bawah Allende* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).
- 31 Lihat Genaro Arriagada, *The Politics of Power: Pinochet* (Boston: Unwin Hyman, 1988)
- 32 Collier, op.cit., hal. 151-152.
- 33 Ibid., hal. 153.
- 34 Ibid., hal. 156-157.
- 35 Bellin, op.cit., hal. 183-185.
- 36 Lihat Claus Offe dan Helmut Wiesentahl, "Two Logics of Collective Action," dalam *Political Power and Social Theory*, Vol. 28, No. 2?April, 1999.
- 37 O'Toole, op.cit., hal. 214.
- 38 Wynia, op.cit., hal. 61.



Jl. Raya Pondok Gede No. 11, Kramat Jati, Jakarta Timur 13550
Telepon: +6221-87796916, Fax : +6221-8413954
Website: www.fspmi.org E-mail: dpp@fspmi.org

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI)

I. PENDAHULUAN

Pembentukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dilandasi oleh :

1. Ratifikasi Konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat jo Kepres No.83 Tahun 1998, UU 21/2000
2. Kongres I Garut 4 ~ 7 Februari 1999, lahirnya SPMI (6 Februari 1999)
3. Kongres II, Lembang 29 Agustus ~ 1 September 2001, SPMI dari Unitaris menjadi Federasi (FSPMI)
4. Kongres III, Bandung 24 ~ 27 Nopember 2006

II. ANGGOTA

FSPMI terdiri dari Serikat Pekerja Anggota (SPA):

1. SP Elektronik Elektrik (SPEE)
2. SP Automotif, Mesin & Komponen (SPAMK)
3. SP Logam (SPL)
4. SP Dok & Galangan Kapal (SPDG)
5. SP Dirgantara (SPD)
6. Afialiasi khusus yang dapat menjadi anggota FSPMI, baik dari BUMN maupun Aneka Industri.

III. VISI DAN MISI FSPMI

Visi

Membangun Serikat Pekerja yang Demokratis, Bebas, Representatif, Independen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab
2. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan keluarganya.
3. Meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja.

IV. PROGRAM KERJA FSPMI

A. 9 Program Kerja Utama FSPMI

1. Perlindungan dan Pembelaan
 - a. Meningkatkan kualitas & kuantitas PKB
 - b. Memantau pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan advokasi dan menyelesaikan perselisihan perburuhan
2. Pemberdayaan Pekerja Perempuan
 - a. Membentuk direktorat dan biro perempuan di seluruh perangkat organisasi.
 - b. Mendorong pekerja perempuan untuk aktif dalam berorganisasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
 - c. Mensosialisasikan dan mengkampanyekan permasalahan Gender dan isu-isu permasalahan pekerja perempuan.

3. Konsolidasi & Revitalisasi Organisasi
 - a. Mengorganisir pekerja yang belum terorganisir dengan target jumlah anggota 250.000 orang dan 500 unit kerja sampai tahun 2011
 - b. Memperkuat dan mengoptimalkan fungsi sekretaris jenderal, SPA dan audit sebagai prinsip dan tata kelola keuangan dan kinerja organisasi yang transparan dan bertanggungjawab
 4. Ekonomi dan Kesejahteraan
 - a. Mempromosikan terwujudnya undang-undang pengupahan sebagai acuan sistem pengupahan layak nasional dan sistem upah sektoral
 - b. Memperjuangkan terlaksananya jaring pengaman sosial melalui sistem Jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan
 - c. Mendorong tumbuhnya koperasi pekerja di setiap perusahaan
 - d. Membentuk Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia (INKOPBUMI) dan membuat kode etik usaha
 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - a. Mensosialisasi undang-undang dan peraturan K3
 - b. Menyelenggarakan Lokakarya dan pelatihan K3 sesuai prioritas
 - c. Melakukan monitoring dan pembentukan tim pelaksanaan K3 di tempat kerja
 6. Konsolidasi Keuangan
 - a. Mendorong disiplin anggota dalam membayar iuran sebesar 1% dari upah
 - b. Konsisten melaksanakan keputusan Kongres II tentang mekanisme pembayaran iuran anggota
 - c. Menyusun program anggaran penerimaan dan pengeluaran organisasi serta profesionalisme administrasi
 - d. Menyusun dan menyiapkan data keuangan untuk auditor sebagai laporan dan mengoptimalkan fungsi bendahara
 - e. Membuat PO tentang keuangan Organisasi dan laporan tahunan keuangan organisasi
 7. Pengembangan Kemampuan Informasi & Komunikasi
 - a. Mempromosikan seluruh perangkat organisasi memiliki perangkat keras dan perangkat lunak penunjang komunikasi
 - b. Menerbitkan brosur, buletin serta mendokumentasi kegiatan organisasi
 - c. Aktif membangun komunikasi dengan perangkat organisasi perburuhan lainnya di tingkat Nasional dan International
 8. Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi
 - a. Menyusun pedoman kurikulum dan silabus pendidikan
 - b. Mencetak juru didik yang standar
 - c. Melaksanakan pelatihan-pelatihan kaderisasi, peningkatan kemampuan kepemimpinan dan pengorganisasian.
 - d. Aktif dan bekerjasama dalam pelaksanaan aktifitas pendidikan dengan organisasi – organisasi perburuhan International, antara lain IMF, ACILS, FNV, SASK, IF Metal dan FES
 - e. Menyusun PO tentang pelaksanaan pendidikan dan buku panduan pendidikan
 - f. Membangun pola dan sistem kaderisasi
9. Membangun Solidaritas Pekerja
 - a. Berperan aktif menjadi dan sebagai anggota International Metalworkers' Federation (IMF)
 - b. Aktif dalam politik perburuhan dengan membuat kode etik berpolitik bagi organisasi
- ### B. Lima Pilar Pendukung FSPMI
1. Garda Metal
Alat perjuangan organisasi untuk melakukan penggalangan massa dan aksi-aksi demonstrasi dalam memperjuangkan isu buruh, isu kebangsaan dan isu solidaritas Internasional.
 2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSPMI
Alat perjuangan organisasi yang resmi tercatat di notaris dan Pengadilan Negeri Jakarta, berfungsi untuk melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota FSPMI (atau buruh lainnya) dalam menyelesaikan kasus persekusi perburuhan, kasus perdata maupun kasus pidana. LBH FSPMI terdiri dari 1 LBH tingkat pusat dan 9 LBH tingkat propinsi dengan jumlah pembela/pengacara lebih dari 70 orang yang berlatar belakang pendidikan S1 dan S2. Beberapa diantaranya sudah memiliki izin beracara dan sertifikat advokat.
 3. Koran Perjuangan diterbitkan oleh FSPMI
Sebagai media perjuangan organisasi dan alat propaganda isu-isu perburuhan secara nasional, karena selama ini tidak ada satupun surat kabar Nasional yang secara khusus memberitakan isu-isu perburuhan. Maka Koran Perjuangan yang hadir secara nasional dengan tираs lebih dari 7500 eksemplar bertujuan menjawab persoalan ini (Buruh dan masyarakat umum dapat berlangganan).
 4. Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia-INKOPBUMI
Alat perjuangan organisasi dalam upaya meningkatkan, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada pada anggota FSPMI (buruh Indonesia) serta bertujuan meningkatkan ekonomi organisasi
 5. Pusat Pendidikan Buruh (Training Centre) milik FSPMI
Alat perjuangan organisasi dalam rangka mencetak kader yang berkesinambungan, keilmuan, loyalitas dan militan dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan Bangsa Indonesia.
- ### C. Alat Propaganda FSPMI
- Terdiri dari Website FSPMI, e-mail, mailing list untuk umum,

leaflet FSPMI, Buku Saku Konstitusi, Program Kerja-PO FSPMI dan Koran Perdjoengan yang diterbitkan oleh FSPMI secara nasional satu bulan sekali.

D. Isu Utama FSPMI

Dalam perjuangan gerakan buruh maka FSPMI memperjuangkan isu utama yaitu upah layak, penolakan outsourcing, penggunaan PKWT sesuai Undang-Undang dan ada perlindungan yang jelas, menguatkan fungsi pengawasan., jaminan sosial (social security), penguatan, pemberlakuan hak-hak dasar buruh (jam kerja, lembur, cuti, bonus, pesangon) melalui PKB yang berpihak pada buruh dan perlindungan bila terjadi PHK.

V. DATA ANGGOTA FSPMI

(per Desember)	2005	2006	2007
Anggota	105.985	110.878	122.882
Iuran (Rp)/Th	1,43M	1,70M	1,96M
Jumlah PKB	84	113	130

Nilai iuran berasal dari 40% iuran anggota PUK yang disetorkan ke DPP

VI. HARTA KEKAYAAN FSPMI

FSPMI mempunyai kantor/gedung milik sendiri yaitu : kantor pusat di Jakarta, kantor cabang Batam dan kantor cabang Bekasi. Sedangkan kantor wilayah dan cabang yang lainnya masih menyewa yang dibayar dari iuran anggota. Selain itu, FSPMI memiliki pusat pelatihan milik sendiri (Training Center), yaitu di Cisarua-Bogor seluas 2000m2 (Tingkat Nasional) dan di kota Batam seluas 100m2. FSPMI juga memiliki mobil operasional dan alat-alat IT/kantor yang merupakan hasil dari pembayaran iuran anggota

VII. SUSUNAN PENGURUS FSPMI (Periode 2006-2011)

- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI
 - Presiden : Ir. H. Said Iqbal, ME.
 - Senior Wakil Presiden : Vonny Diananto, A.Md
 - Sekretaris Jenderal : Basri Hendrisman, A.Md
 - Bendahara Umum : H.M. Yadun Mufid, SE
- Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE)
 - Ketua Umum : Drs. Ridwan Monoarfa
 - Sekretaris Umum : Judy Winarno, ST
- Serikat Pekerja Automotif Mesin & Komponen (SPAMK)
 - Ketua Umum : Ir. Jefry Helian
 - Sekretaris Umum : M. Jamsari, SH
- Serikat Pekerja Logam (SPL)
 - Ketua Umum : Drs.R.H. Endang Thamrin
 - Sekretaris Umum : M. Taufik Hidayat, SH,SE
- Serikat Pekerja Dok & Galangan Kapal (SPDG)
 - Ketua Umum : Drs. Thamrin Mosii
 - Sekretaris Umum : H. Makmur Komarudin
- Serikat Pekerja Dirgantara (SPD)

- Ketua Caretaker : Obon Tabroni, SE
 - Sekretaris Caretaker : Drs. M. Syawal Harahap
7. Direktorat Perempuan
- Wakil Presiden : Aghni Dhamayanti
 - Direktur : Prihanani

VIII. KANTOR WILAYAH/CABANG

- DPW/PC Jakarta
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954
- DPW Jawa Barat/PC Cimahi
Telp : 022-6647846 Fax : 022-6031855 HP:081322225959
- DPW Banten/PC Tangerang
Telp/Fax : 021-5914985 HP : 08128618364
- DPW Jawa Timur/PC Mojokerto
Telp /Fax : 0321-619-919
- DPW Jawa Tengah/PC Semarang
Telp : 024-70278918/70767979
- DPW Lampung/PC Bandar Lampung
Telp/Fax : 0721-251036 HP : 08154013807
- DPW Sulsel/PC Makasar
Telp : 0411-860231 Fax : 0411-510096 HP:0411-859431
- DPW Gorontalo/PC Gorontalo
Telp : 0435-821678 Fax : 0435-822122 HP:0852561418333
- DPW Kepri/PC Batam-Bintan
Telp : 0778-7059001 Fax : 0778-371340 HP:085272739729
- PC Bogor-Depok
Telp /Fax : 021-77821354 HP : 0818109043
- PC Bekasi
Telp : 021-88333980 Fax : 021-88333968
HP:081310605189
- PC Karawang/Purwakarta
Telp/Fax : 0264-351778 HP : 08881701650
- PC Serang
Telp/Fax : 0254-403707 HP : 081585008556
- PC Cilegon
Telp/Fax : 0254-394134 HP : 08121201687
- PC Sidoarjo-Surabaya
Telp/Fax : 0321-619919 HP : 081330134048
- PC Pasuruan
Telp /Fax : 0321-619919 HP : 085230294419

IX. AFILIASI FSPMI (Nasional & Internasional)

Di tingkat nasional, FSPMI berafiliasi ke Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang beranggotakan 10 Federasi yaitu: SPN, FSPKEP, SP.PAR Reformasi, SP.PPMI, PGRI, SP KAHUTINDO, SP.FARKES Reformasi, ASPEK Indonesia, SP ISI, dan FSPMI.

Di tingkat International, FSPMI berafiliasi menjadi anggota International Metalworkers' Federation (IMF) yang berkantor pusat di Jenewa-Swiss yang beranggotakan lebih dari 25 juta anggota di 101 negara dengan 207 federasi metal sedunia.



Dilema Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-Cina

Judul Buku:

Garuda Terbelit Naga: Dampak
Kesepakatan Perdagangan
Bebas Bilateral ASEAN-China
Terhadap Perekonomian
Indonesia

Penulis:

Daniel Pambudi
Alexander C. Chandra

Penerbit:

Institute for Global Justice

Edisi:

Cetakan Pertama,
April 2006

Tebal:

xiv + 240 halaman



TERBITNYA buku karya Dr. Daniel Pambudi dan Dr. Alexander C. Chandra, dua orang ahli yang memiliki reputasi akademis di bidang ekonomi dan kajian regionalisme ini secara umum ditujukan untuk mempelajari dampak salah satu kesepakatan perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Buku yang diterbitkan oleh *Institute for Global Justice* (IGJ) pada April 2006 lalu setidaknya telah mengawali sebuah rintisan akademis terkait dampak buruh dari pelaksanaan perdagangan bebas regional ASEAN-Cina yang akhir-akhir ini mendapat sorotan banyak pihak.

Kata kunci buku ini terletak pada perseptif kritis yang digunakan kedua penulis dalam menganalisis dampak buruk yang akan dihadapi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, dengan menggunakan kombinasi metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua penulis berhasil menunjukkan indikator-indikator makroekonomi ASEAN dan Indonesia yang akan mengalami “pemburukan” terkait implementasi perdagangan bebas yang dilakukan oleh pemerintahan negara-negara di kawasan rumpun Asia ini terhadap Cina.

Kata kunci kedua, buku ini dengan lugas juga mendeskripsikan indikator-indikator elitis (non-demokratis) dari proses pembuatan kebijakan perdagangan bebas kawasan, tanpa melibatkan partisipasi publik secara intens, luas, dan memadai. Di sini, de-

mokratisasi pengambilan keputusan mendapat sorotan penulis karena secara teoritis pemerintahan demokratis pada *ghalib*-nya haruslah memposisikan diri sebagai fasilitator dan agregator yang baik bagi rakyatnya, apalagi jika keputusan tersebut akan berdampak signifikan bagi kepentingan ekonomi dan kedaulatan politik masyarakat negara bersangkutan.

Seperti kita tahu, hubungan antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) dan Republik Rakyat Cina (RRC) semakin dipererat setelah ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina (*ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA*). Fase awal dari perdagangan ini, dikenal dengan program panen awal (EHP), mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004, merupakan komitmen pemotongan tarif bagi produk-produk sektor pertanian ASEAN yang masuk ke pasar Cina. Meskipun rasa antusiasme mengenai potensi ekonomis kesepakatan perdagangan bebas ini kerap ditunjukkan oleh kalangan pembuat kebijakan, akademisi, dan para pelaku ekonomi dikedua belah pihak, namun kesepakatan perdagangan ini juga berpeluang gagal mengangkat beberapa elemen fundamental untuk mengedepankan keberlanjutan ekonomi dari para pelaku usaha, khususnya dari sisi ASEAN. Bahkan sebelum dilaksanakannya tahap awal ACFTA dan

EHP, banyak pelaku ekonomi di Asia Tenggara mengeluhkan membanjirnya berbagai produk pertanian dan industri dari Cina di kawasan ini.

Meskipun kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina (*ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA*) telah dilaksanakan sejak awal 2004, masih belum banyak literatur yang membahas secara lebih detail dan utuh terkait potensi dampak dari kesepakatan ini terhadap perekonomian Indonesia. Buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang tersedia mengenai ACFTA, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masih belum mengetahui makna dan menyadari potensi dampak sesungguhnya dari kesepakatan perdagangan bebas yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina tersebut.

Buku hasil penelitian ini mencoba menelaah dampak ekonomis program panen awal (*Early Harvest Programme/EHP*) terhadap salah satu negara anggota ASEAN, yakni Indonesia. Secara keseluruhan ada beberapa hipotesa kunci yang diangkat buku ini: (1) ACFTA sebenarnya memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi kecil (UMKM) di Indonesia, khususnya para petani; (2) pemerintah Indonesia belum mengeksplorasi mekanisme EHP secara penuh hingga dapat menguntungkan para petaninya; dan (3) ASEAN dan pemerintah Indone-

sia masih memonopoli kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam ACFTA. Buku ini mengangkat dua isu yang relevan dengan ketiga hipotesa di atas, yakni dampak ekonomis keseluruhan EHP terhadap sektor pertanian Indonesia dan tingkat keterwakilan proses pembuatan kebijakan ACFTA itu sendiri.

Dalam membahas berbagai isu penting terkait dampak ACFTA terhadap perekonomian Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kombinatorik antara kuantitatif ekonomis dengan kualitatif dinamis diharapkan dapat memberi gambaran secara lebih utuh dan obyektif terkait dampak positif dan negatif dari proses pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas bilateral ini.

Deskripsi Buku

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian, dimana masing-masing bagian membahas secara detail berbagai elemen yang berkenaan dengan proses kerjasama yang lebih dekat antara ASEAN dengan Cina. Bagian pertama dari buku ini membahas kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina sebagai komentar pendahuluan untuk memasuki jantung persoalan pokok yang menjadi tujuan utama penulisan buku ini.

Bagian Pertama secara elaboratif membahas relasi antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) dan Republik Rakyat Cina (RRC) semakin dipererat setelah ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina (*ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA*). Fase awal dari perdagangan ini dikenal dengan program panen awal (EHP) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004. Kesepakatan ini berisi komitmen pemotongan tarif bagi produk-produk sektor pertanian

ASEAN yang masuk ke pasar Cina. Meskipun rasa antusiasme mengenai potensi ekonomis kesepakatan perdagangan bebas ini kerap ditunjukkan oleh berbagai kalangan (terutama para pembuat kebijakan, akademisi, dan para pelaku ekonomi dikedua belah pihak), namun kesepakatan perdagangan ini juga berpeluang gagal mengangkat beberapa elemen fundamental untuk mengedepankan ekonomi keberlanjutan dari para pelaku usaha, khususnya dari sisi ASEAN. Bahkan sebelum dilaksanakannya tahap awal ACFTA dan EHP, banyak pelaku ekonomi di Asia Tenggara mengeluhkan membanjirnya berbagai produk pertanian dan industri dari China di kawasan ini (hal. 1-12).

Bagian Kedua dari buku ini terdiri dari tiga bahasan utama, yang secara keseluruhan membahas fenomena kesepakatan perdagangan bebas bilateral (*Bilateral Free Trade Agreement/BFTA*) yang harus dihadapi oleh ASEAN dan Cina (13-14). Bahasan kedua menilik motif utama yang mendasari pilihan negara-negara di kawasan ASEAN untuk mengadopsi strategi perdagangan melalui BFTA. Berkembangnya strategi diplomasi perdagangan melalui jalur bilateral ini semakin marak sejak akhir tahun 1990-an, dan mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk memikirkan kembali posisinya dalam arena perdagangan internasional. Selain itu, dalam bahasan kedua ini juga ditekankan ASEAN kini menjadi salah satu mitra BFTA yang paling sering didekati, baik negara-negara berkembang maupun negara-negara maju dari kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan bahkan Timur Tengah (hal. 15-24).

Namun demikian, kecenderungan negara-negara ASEAN yang masih berjalan sendiri-sendiri kerap menimbulkan kesan bahwa negara-negara kelompok kawasan ini lebih banyak didikte oleh negara-negara yang men-

jadi mitra dagang mereka. Kenyataan seperti ini kemudian memunculkan pertanyaan: Mengapa ASEAN dan negara-negara anggotanya tidak menggunakan daya tarik mereka sebagai satu alat tawar-menawar (*bargaining position*) dalam kesepakatan-kesepakatan BFTA yang sedang mereka kembangkan?. Sementara itu bahasan ketiga membahas hubungan antara ASEAN dan Cina (hal. 25-34) dan hubungan antara Indonesia dan Cina (hal. 34-39). Analisa dalam bab ini tidak saja meninjau dari perspektif ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dari perspektif politik dan keamanan strategis. Kenyataan memang cukup jelas bahwa hubungan antara ASEAN (Indonesia) dan Cina tidak hanya dapat dilihat dari kepentingan ekonomi semata, akan tetapi juga harus dilihat dari motif politik. Ini sangat relevan apabila kita melihat penandatanganan kesepakatan ini dari kacamata Cina. Ambisi Cina untuk menjadi kekuatan ekonomi dan politik dunia agaknya menarik negara-negara ASEAN untuk semakin dekat dengan negara Tirai Bambu tersebut. Realitas ini disebabkan kecenderungan negara-negara ASEAN yang lebih sering bersikap reaktif daripada aktif dalam memulai suatu inisiatif tertentu.

Berkembangnya Cina menjadi kekuatan dunia harus ditanggapi cepat oleh ASEAN. Kesepakatan BFTA berguna menjembatani ketakutan Jakarta (dimana lokasi Sekretariat ASEAN berada) akan kehilangan daya saing ekonomi maupun usaha agar bisa mempengaruhi kebijakan Beijing. Sebaliknya, Cina memandang negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari strateginya menjadi kekuatan dunia. Letak geografis Asia Tenggara yang sangat strategis dan terkenal akan kekayaan sumberdaya alamnya, membuat Cina tak dapat menghindari ASEAN. Cina memerlukan ASEAN untuk mendukung dirinya tak hanya menjadi kekuatan

ekonomi dan politik di Asia Pasifik (melalui proses integrasi kawasan Asia), namun juga Cina berambisi untuk menjadi kekuatan utama dunia.

Selanjutnya, pada bahasan keempat (“ACFTA Sebagai Masalah bagi ASEAN dan Indonesia”) dijabarkan secara rinci skeptisisme terhadap ACFTA. Apalagi hampir semua literatur yang membahas tentang ACFTA lebih banyak memberikan dukungan terhadap pelaksanaan perdagangan bebas regional, maka buku ini mencoba untuk melihat permasalahan ACFTA dari sudut pandang berbeda, yakni memberi rekomendasi kepada para pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha agar melihat ACFTA secara lebih kritis (hal. 41-49).

Bagian Ketiga buku ini membahas mengenai kerangka hukum ACFTA itu sendiri. Adapun bahasan pada Bagian Ketiga ini merinci secara lebih dalam seluk-beluk kerangka hukum dari teknis pelaksanaan ACFTA dan EHP antara ASEAN dan Cina. Selain kesepakatan ACFTA perlu pula dipahami secara lebih detail kesepakatan bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Cina. Meskipun ACFTA dan EHP seharusnya dilakukan antara seluruh negara ASEAN dengan Cina, namun mengingat bahwa masing-masing negara ASEAN memiliki kapasitas dan kesiapan yang berbeda dalam meliberalisasi pasar mereka, kelompok negara di kawasan ini mau tidak mau harus membiarkan masing-masing negara anggota untuk merundingkan sendiri kesepakatan-kesepakatan spesifik sesuai kapasitas dan kesiapan masing-masing dengan pihak Cina (hal. 53-57).

Oleh sebab itu juga dipresentasikan penjabaran mengenai teknis pelaksanaan ACFTA dan EHP antara Indonesia dan Cina. Menurut penulis, kesepakatan pelaksanaan EHP/ACFTA di Indonesia di atur di bawah dua peraturan, yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.01/2004 mengenai Ke-

tentuan Tarif Impor atas EHP/ACFTA; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 356/KMK.01/2004, mengenai Ketentuan Tarif di Bawah. Kedua ketentuan tersebut ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2004. EHP bilateral Indonesia-Cina bahwa langkah-langkah penurunan tarif mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004-2005, dimana tarif untuk produk-produk yang masuk dalam daftar EHP di antara kedua negara akan diturunkan hingga nol persen. Lebih dari itu, kesepakatan perdagangan bebas tidak hanya akan dilaksanakan dalam lingkup ASEAN-Cina, tetapi kedua pihak sepakat untuk melakukan liberalisasi tarif terhadap produk-produk tertentu guna mempercepat proses liberalisasi keseluruhan kedua negara. (hal. 58-61).

Bagian Keempat membahas masalah dampak pelaksanaan EHP terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pertanian (menggunakan analisis kuantitatif); termasuk didalamnya dibahas secara lebih detail persepsi pembuat kebijakan dan konstituen domestik Indonesia terhadap pelaksanaan EHP (menggunakan analisis kualitatif). Menurut penulis, analisis terkait dampak EHP/ACFTA difokuskan pada sektor pertanian karena kesepakatan EHP merupakan komitmen Cina untuk meliberalisasi sejumlah sektor pertaniannya secara unilateral. Dengan kata lain, pada tahun 2004 sampai 2006 Cina akan membuka diri terhadap produk-produk pertanian yang berasal dari negara-negara ASEAN tanpa pengecualian tarif (hal. 65-69)

Penulis menggunakan metode analisa model “kesimbangan umum terhitung” (*Computable General Equilibrium/CGE*) dan model analisa “kesimbangan dengan dimensi analisa ekonomi kawasan” (*Equilibrium Model with Economic Regional Analysis Dimension/EMERALD*). Kedua model analisis ini digunakan untuk

menganalisis dampak jangka pendek dan panjang terkait pelaksanaan EHP/ACFTA terhadap lapangan pekerjaan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), harga pasar, dan lain-lain di Indonesia (hal. 69-96).

Simulasi yang menggunakan metode analisis CGE dan EMERALD menunjukkan adanya hasil yang menarik, antara lain: (1) tingkat impor Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan tingkat ekspor; (2) kebijakan EHP juga menyebabkan berbagai biaya produksi di dalam negeri meningkat; (3) PDB riil akan mengalami penurunan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kondisi disebabkan Indonesia akan mengalami defisit perdagangan (hal. 97).

Terkait persepsi pembuat kebijakan dan konstituen domestik Indonesia, hasil analisis menunjukkan: (1) terjadi jurang (gap) persepsi antara pembuat kebijakan dan konstituen terkait implementasi EHP/ACFTA; (2) minimnya tingkat keterwakilan masyarakat sipil dalam kesepakatan EHP/ACFTA; (3) minimnya transparansi dalam penyusunan kebijakan public terkait implementasi EHP/ACFTA; dan berbagai kecenderungan negatif lainnya. Dari berbagai analisis kualitatif salah satu isu yang perlu dikedepankan adalah pentingnya demokratisasi dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, mungkin dapat ditarik satu benang merah bahwa partisipasi suatu negara dalam proses perdagangan bebas merupakan suatu hal yang kompleks, dan perlu dicari satu bentuk kompromi sehingga partisipasi negara (dan warga negara) bersangkutan dalam proses perdagangan bebas dapat mewakili kepentingan-kepentingan konstituen-konstituen domestik dengan kepentingan dan agenda yang berbeda-beda (hal. 131).

Dukungan atau pun penolakan terhadap ACFTA, menurut penulis,

sebenarnya bukanlah isu terpenting yang muncul dari analisa, tetapi bagaimana pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak sehingga proses perdagangan bebas ini dapat menguntungkan semua pihak. Tentu sangat disayangkan, bahwa sejauh ini pemerintah lebih mampu mengakomodasi kepentingan para pelaku usaha besar, dan meminggirkan keprihatinan yang ditunjukkan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok masyarakat yang paling marjinal, seperti buruh, petani, dan nelayan. Penolakkan terhadap proses perdagangan bebas dari para pelaku usaha kecil dan menengah muncul karena mereka merasa “ditinggalkan” dan “tidak mendapat keuntungan” dari mekanisme perdagangan bebas ini.

Proses pembuatan kebijakan ACFTA bahkan jauh lebih tidak demokratis karena ASEAN, sebagai satu kelompok kawasan, masih belum mampu membuka dirinya dan melakukan konsultasi dengan para pelaku usaha kecil dan menengah di semua negara ASEAN. Dengan kata lain, dari sisi ASEAN, pelaksanaan ACFTA sejauh ini masih merupakan cerminan dari kepentingan para industrialis di negara-negara ASEAN. Menurut penulis, hal ini barangkali problem serius yang ke depan perlu dibenahi oleh ASEAN dan pemerintah Indonesia. Potensi peranan pemerintah Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN sebenarnya cukup besar.

Sebagai salah satu negara yang paling demokratis di kawasan ASEAN, Indonesia seharusnya mampu mempengaruhi kebijakan ASEAN sehingga negara-negara yang tergabung dalam kelompok kawasan ini dapat membuka dirinya terhadap kepentingan rakyat Asia Tenggara secara lebih luas. Apa pun kebijakan ASEAN dan pemerintah Indonesia, baik mendu-

kung maupun menolak perdagangan bebas, hanya akan valid apabila kedua belah pihak tersebut melakukan konsultasi dengan publik secara *intens* dan meluas.

Least but not last, seperti telah diungkapkan di atas, harapan utama dalam penulisan buku ini adalah untuk memberikan pandangan alternatif terhadap pengambilan kebijakan dengan orientasi nilai liberal yang belakangan ini cenderung berkembang dikalangan para pembuat kebijakan nasional dan kelompok-kelompok kepentingan domestik.

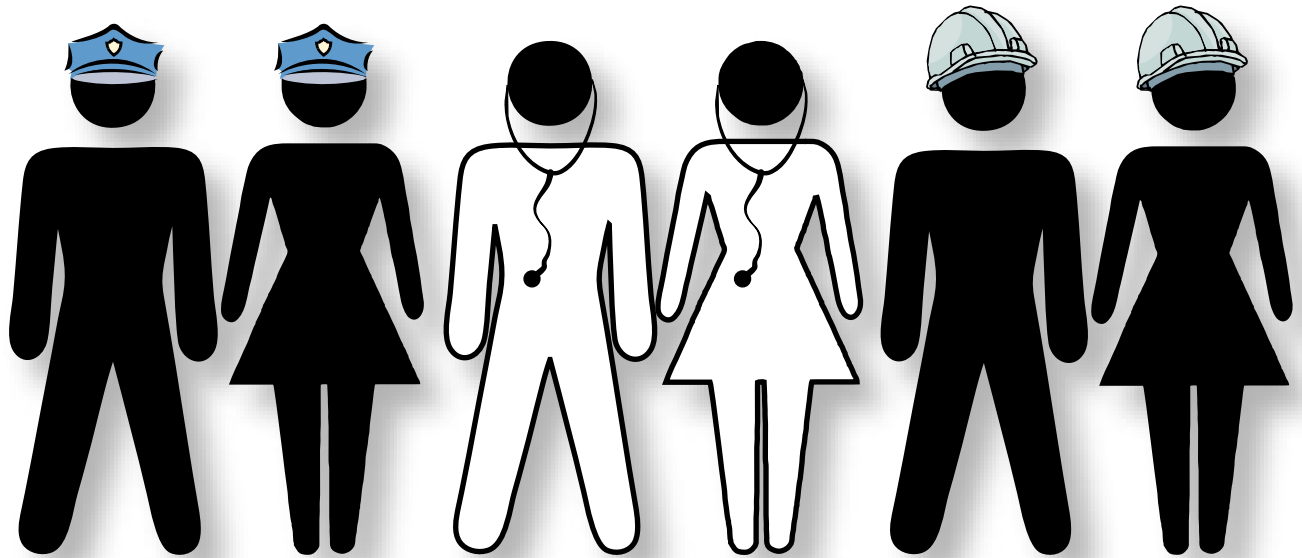
Namun demikian, seperti yang telah ditekankan di atas, masalah yang dihadapi Indonesia juga tidak sekedar masalah orientasi kebijakan perdagangan dan pro-pasar, tetapi lebih banyak elemen masalah yang sebenarnya muncul dari dalam negeri sendiri. Oleh sebab itu, penulis berharap buku ini dapat menjadi catatan dan masukan bagi pengambil keputusan, khususnya pada pemerintah Indonesia dalam konteks perdagangan nasional.

Yang pasti, karena diterbitkan pada April 2006 lalu, buku ini tidak mencantumkan data dan informasi mutakhir terkait indikator-indikator makro dan mikro yang berlangsung sepanjang tahun 2007 hingga 2010 yang berlangsung di negara-negara ASEAN maupun Indonesia. Seperti kita tahu, per 1 Januari 2010 lalu, kebijakan perdagangan bebas Indonesia-Cina sudah mulai diberlakukan. Di sisi lain, buku ini, juga terlalu menekankan konteks perdagangan bebas ASEAN-Cina dan Indonesia-Cina melulu pada sektor pertanian. Padahal, sektor manufaktur juga tak kalah hebat akan terkena dampak buruh dari perjanjian perdagangan bebas kawasan ini. Dengan demikian, kita tak akan menemukan data dan analisis yang bisa memberikan informasi terkait implikasi seperti apa yang akan dihadapi sektor manufaktur di

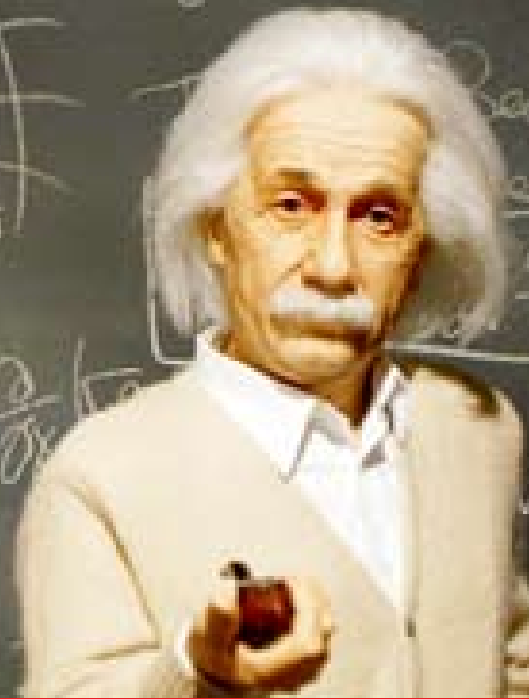
Indonesia atau negara-negara kawasan ASEAN dalam konteks perdagangan bebas dengan Cina.

Dalam ranah akademis, tidak ada sesuatu yang final. Sebuah kebenaran ilmiah (tesis) yang ditemukan saat ini, meminjam Karl Poper, harus siap menjadi hipotesis, bahkan siap digugurkan dengan temuan/tesis (ilmiah) yang mengacu pada asumsi-asumsi teoritis yang diyakini memiliki validitas yang lebih kuat. Namun demikian, sebagai sebuah hasil penelitian, buku ini menyimpan sejumlah data, informasi, dan analisis yang bisa mengantarkan khalayak pada sebuah “keraguan” (skeptisisme) akan hadirnya sebuah Indonesia yang lebih sejahtera dan bermartabat dengan perdagangan bebas. Buku ini, bahkan secara tegas dan lugas memberi panduan berharga bagi kita bahwa perdagangan bebas ternyata tak lebih dari instrumen neokolonialisme dan neo-imperialisme, penjabaran paling vulgar dari ideologi neoliberalisme; yang siap menerkam negeri yang lemah seperti Indonesia tercinta kita.

Buku ini, wajib dibaca oleh para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, industriawan, intelektual, mahasiswa, dan segenap pemangku kepentingan karena ia memberi warna berbeda tentang perdagangan bebas yang selama ini selalu di eja sebagai sebuah keharusan bagi setiap bangsa yang ingin menapaki jalan modernisasi dan pembangunan ekonominya secara benar. Buku ini layak dipertimbangkan sebagai referensi alternatif bagi seluruh anak bangsa yang merindukan tegaknya kedaulatan ekonomi dan politik bangsa, *dus* tersemayanya kesejahteraan sosial di negeri ini. Buku ini, memberi pelita, menuntun kita, bahwa jalan perdagangan bebas itu ternyata keliru. ■ **Launa**, Staf redaksi Jurnal Sosial Demokrasi



Hak kita sama
Pekerjaan kita sama
Upah kita seharusnya juga sama!



Saya yakin bahwa hanya ada satu jalan, singkirkan kejahatan (kapitalisme) ini, untuk itu usahakanlah membentuk sistem ekonomi sosial, disertai dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada tujuan sosial. (*Albert Einstein*)

